



LAPORAN GOVERNMENT FINANCE STATISTICS STRATEGIS

PRELIMINARY 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
JAMBI

Jalan Mayjen M. Y. Singadikane No. 45, Jambi 36122; TELEPON (0741) 668802; FAKSIMILI (0741) 668801; SUREL :
kanwil.jambi@gmail.com; SITUS : www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jambi

NOTA DINAS
NOMOR ND-215/WPB.06/2024

Yth. : Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah Provinsi Jambi
Periode Preliminary Tahun 2023
Tanggal : 26 Februari 2024

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER/34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor ND-118/PB.6/2024 tanggal 2 Februari 2024 hal Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) Tingkat Wilayah Periode Preliminary (TW 4) Tahun 2023, dengan ini kami sampaikan Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah Provinsi Jambi Periode *Preliminary* Tahun 2023 dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Ringkasan LKPK-TW LSKP-TW *Preliminary* Tahun 2023

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

A. Pendapatan	11.660.903.776.443
B. Belanja dan Transfer	28.725.638.425.816
C. Pembiayaan	1.138.666.944.971
D. Sisa Lebih (Kurang Pembiayaan)	(15.926.067.704.402)

Laporan Operasional Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

A. Pendapatan Operasional	26.639.221.324.611
B. Beban Operasional	24.464.467.104.214
C. Surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional	2.174.754.220.397
D. Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional	82.446.336.582
E. Pos Luar Biasa	-
F. Surplus (defisit) LO	82.446.336.582

Neraca Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

A. Aset	82.446.336.582
B. Kewajiban	1.321.723.335.003
C. Ekuitas	83.621.781.004.169

Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah

A. Pendapatan	35.800.032.107.652
B. Beban	26.073.149.044.804
C. Saldo Operasi Bruto	14.271.078.068.529
D. Saldo Operasi Neto	14.271.078.068.529
E. Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	7.185.250.297.346
F. Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto	7.085.827.771.183
G. Akuisisi Neto Aset Keuangan	7.038.224.556.972
H. Ketersediaan Kewajiban Neto	(47.603.214.211)

Neraca Konsolidasian Statistik Keuangan Pemerintah Umum

A. Kekayaan Bersih	84.307.069.352.441
B. Aset Non Keuangan	79.173.688.811.471
C. Aset Keuangan	6.455.103.875.972
D. Kewajiban	1.321.723.335.003

2. Ringkasan Analisis Risiko Keuangan adalah sebagai berikut:

Analisis Rasio Keuangan LKPK

A. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	506,21% (Baik)
B. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	36.132,11% (Baik)

Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

A. Kemandirian Keuangan Daerah	18,64% (Kurang)
B. Solvabilitas Anggaran	102% (Baik)
C. Solvabilitas Layanan	Rp10.499.925
D. Solvabilitas Operasional	1,15 (Kurang)
E. Fleksibilitas Keuangan	0,13 (Rendah)

Analisis Keseimbangan Fiskal LSKP

A. Keseimbangan Operasi Neto	Rp14.271.078.068.529 (Positif)
B. Keseimbangan Operasi Bruto	Rp14.271.078.068.529 (Positif)
C. Pinjaman Neto	Rp7.085.827.771.183 (Positif)
D. Keseimbangan Operasi Primer	Rp14.277.887.730.246 (Positif)
E. Keseimbangan Primer	Rp7.092.637.432.900 (Positif)

Analisis Fiskal Makroekonomi Lainnya LSKP

A. Pajak Langsung	5,98% (Rendah)
B. Pajak Tidak Langsung	19,79% (Baik)
C. Pajak Modal	0,46% (Rendah)
D. Belanja Konsumsi Final Pemerintah	Rp 15.906.355.587.466
E. Tabungan Bruto	Rp 14.629.657.707.414

Analisis Indikator Pembiayaan

A. Total Pembiayaan	Rp7.085.827.771.183 (Positif)
B. Pembiayaan dalam negeri	Rp7.085.827.771.183 (Positif)
C. Pembiayaan luar negeri	-
D. Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri	-
E. Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri	-

Analisis Indikator Kekayaan Utang

A. Utang Bruto	Rp 1.321.723.335.002
B. Utang Neto	Rp 1.321.723.335.002

3. *Softcopy* data sumber, kertas kerja, meta data, Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah Provinsi Jambi Periode *Preliminary* Tahun 2023, hasil analisis rasio keuangan dan resume pelaksanaan kegiatan juga diunggah pada tautan <https://s.id/lkpk-lskp-tw>.

Ditandatangani secara elektronik
Burhani AS



DAFTAR ISI

01

Gambaran Umum	1
Perkembangan Kondisi Keuangan	5
Permasalahan Pengelolaan Keuangan	6
Resume Pelaksanaan Kegiatan	7
Kesimpulan	9
Rekomendasi	9
Analisis Tematik	10

Laporan Realisasi Anggaran	14
Neraca	18
Laporan Operasional	23
Laporan Operasional Statistik	29
Neraca Statistik	32

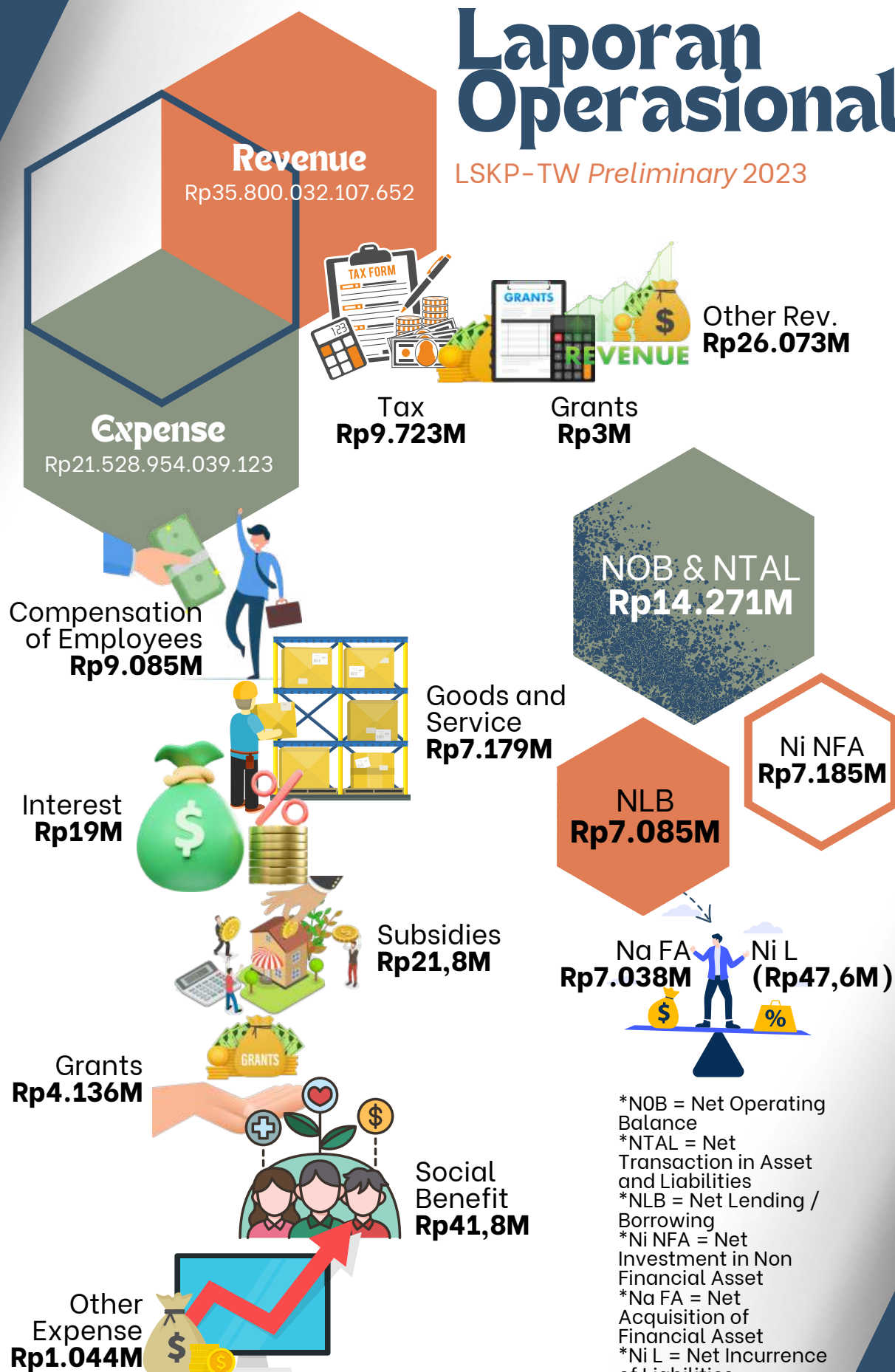
02

03

Metadata	35
Laporan Face	36
Analisis Rasio Keuangan	100

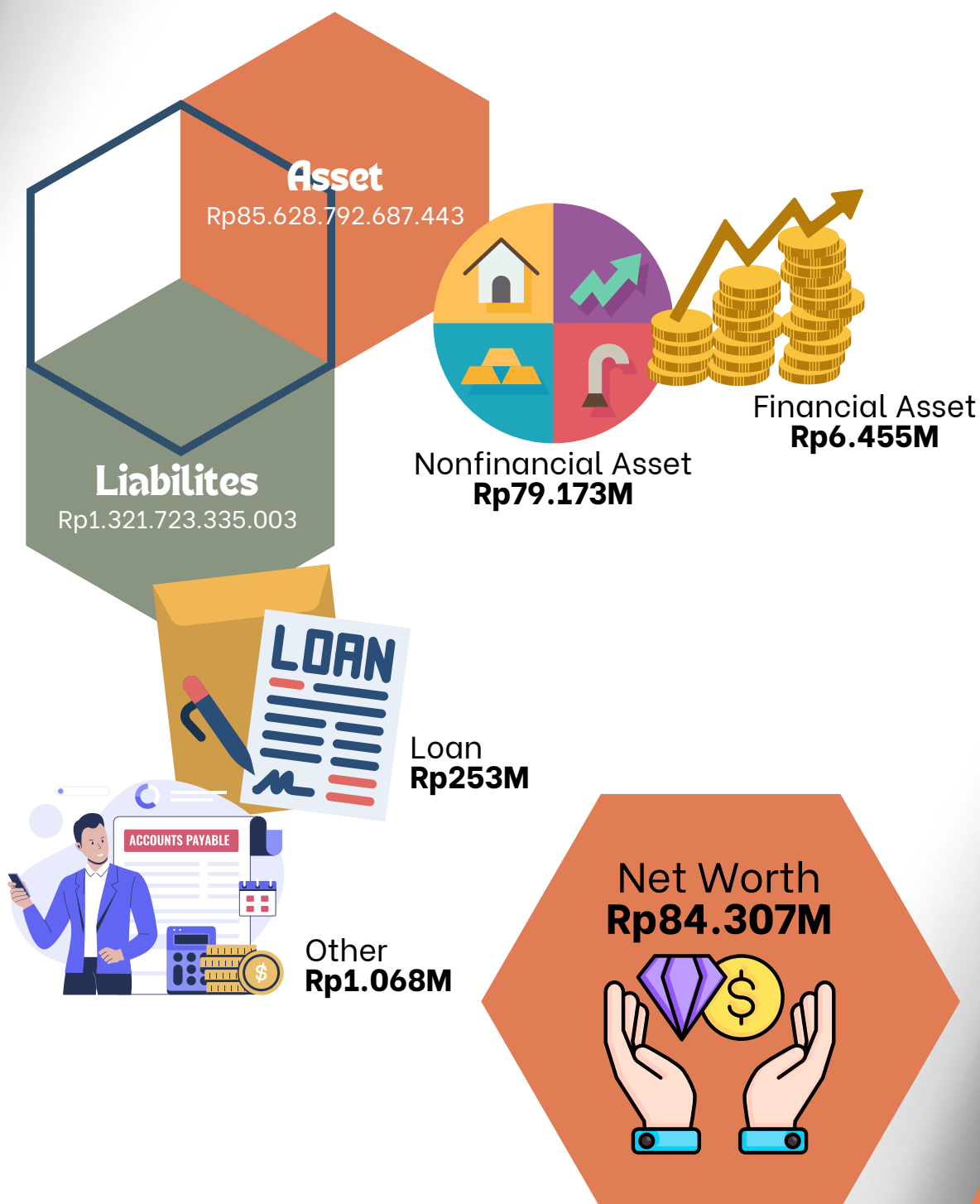
Laporan Operasional

LSKP-TW Preliminary 2023



Neraca

LSKP-TW Preliminary 2023



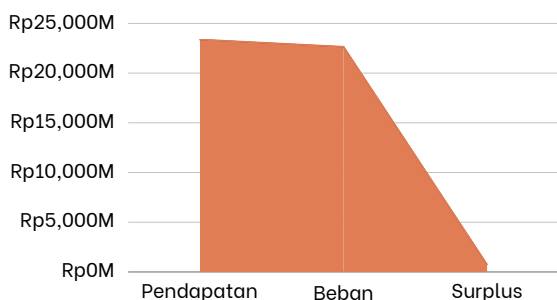
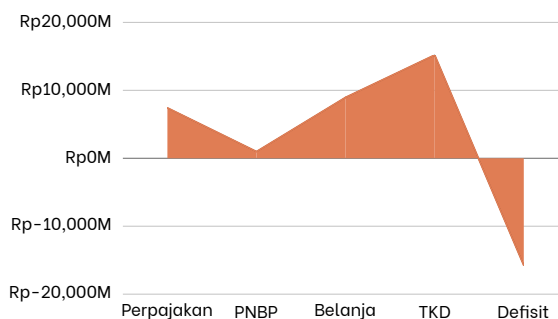


Flash Report

Gambaran Umum Kondisi
Keuangan LKPP-TW, LKPDK-TW,
LKPK-TW, LSKP-TW

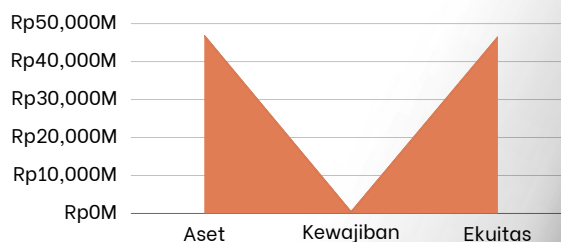
a. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah

Pada LRA Pemerintah Pusat terdapat Realisasi Pendapatan sebesar Rp8.391.884.727.468 yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan PNBPN dikurangi realisasi total Belanja dan Transfer ke Daerah sebesar Rp24.150.562.420.556 sehingga menghasilkan defisit sebesar Rp15.758.677.693.088. (Rincian pada Tabel LRA LKPP, hal.14)



Dari sisi akrual, Pendapatan-LO Pemerintah Pusat sebesar Rp23.370.202.275.63. Sedangkan Beban Operasional sebesar Rp22.643.051.074.718. Dengan kondisi tersebut, sehingga menghasilkan surplus atas kegiatan operasional sebesar Rp727.151.200.918. (Rincian pada tabel LO LKPP, hal.23)

Pada posisi Neraca Pemerintah Pusat tercatat memiliki Aset sebesar Rp46.816.848.199.560, Kewajiban sebesar Rp371.444.605.848, serta Ekuitas sebesar Rp46.445.403.593.712. (Rincian pada Tabel Neraca LKPP, hal. 18)

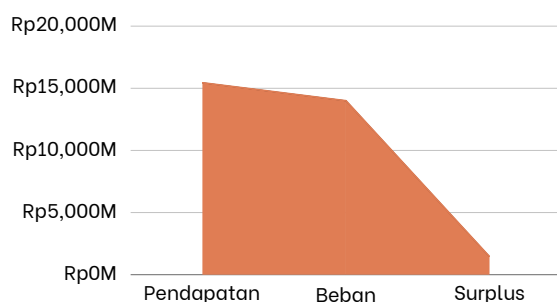
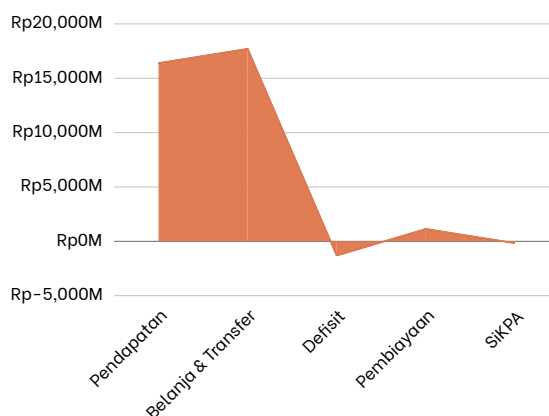


Flash Report

Gambaran Umum Kondisi
Keuangan LKPP-TW, LKPPDK-TW,
LKPK-TW, LSKP-TW

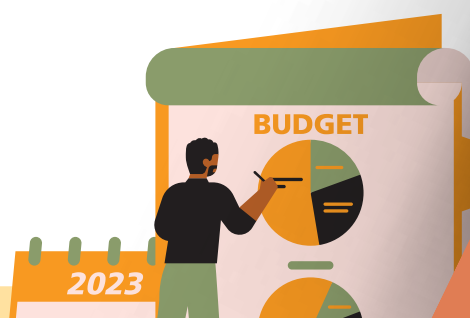
a. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Pada LRA Pemerintah Daerah terdapat Realisasi Pendapatan sebesar Rp16.398.487.623.960 serta realisasi total Belanja dan Transfer ke Daerah sebesar Rp17.704.544.580.245 menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp1.306.056.956.285. Sementara, dari pembiayaan dihasilkan sebesar Rp1.138.666.944.971, sehingga pada tahun 2023 Triwulan IV Pemerintah Daerah menyisakan sisa kurang atas penggunaan anggaran (SILPA) sebesar Rp167.390.011.314. (Rincian pada Tabel LRA LKPPDK, hal. 15)



Dari sisi aktual, Pendapatan-LO Pemerintah Daerah sebesar Rp15.441.467.651.844. Sedangkan Beban Operasional sebesar Rp12.102.253.147.659 dan Beban Transfer sebesar Rp1.891.611.484.706 sehingga menghasilkan surplus atas kegiatan operasional sebesar Rp1.447.603.019.479. (Rincian pada Tabel LO LKPPDK, hal. 25)

Pada posisi Neraca Pemerintah Daerah konsolidasian tercatat memiliki Aset sebesar Rp38.126.656.139.612, Kewajiban sebesar Rp950.278.729.155, serta Ekuitas sebesar Rp37.176.377.410.457. Kondisi ini dapat memberikan gambaran bahwa tingkat likuiditas yang sangat tinggi sebesar 39 kali. Artinya dengan Rp1 nilai kewajiban, dapat dijamin oleh ketersediaan aset sebesar Rp39. (Rincian pada Tabel Neraca LKPPDK, hal. 20)



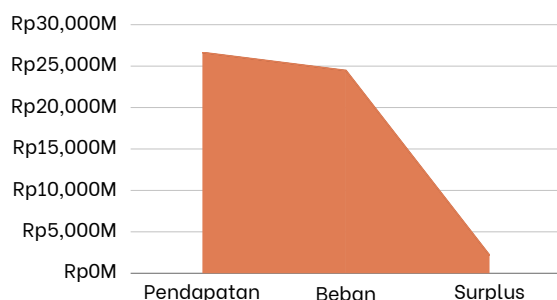
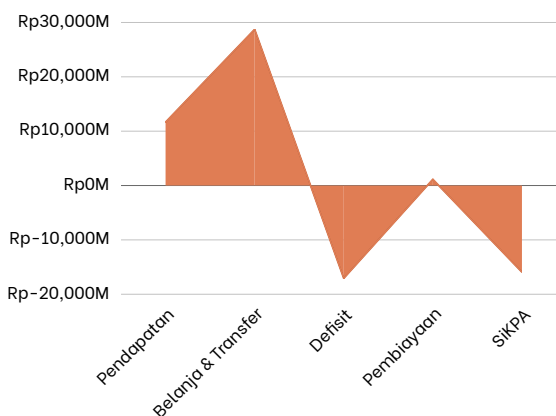


Flash Report

**Gambaran Umum Kondisi
Keuangan LKPP-TW, LKPKD-TW,
LKPK-TW, LSKP-TW**

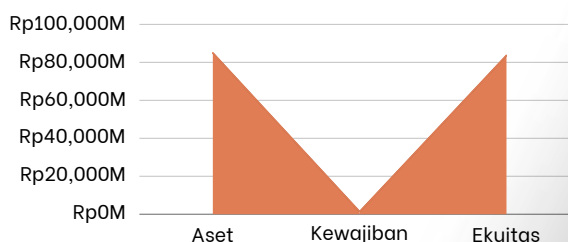
a. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah

Pada LRA Pemerintah konsolidasian terdapat Realisasi Pendapatan sebesar Rp11.660.903.776.443 dan realisasi belanja dan transfer ke daerah sebesar Rp28.725.638.425.816 sehingga menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp17.064.734.649.373. Pada tahun 2023 Triwulan III, pemerintah wilayah Provinsi Jambi mendapatkan pembiayaan sebesar Rp1.138.666.944.971, namun pembiayaan tersebut tetap tidak mampu untuk menutup defisit yang terjadi. (Rincian pada Tabel LRA LKPK, hal. 17)



Dari sisi akual, Pendapatan-LO Pemerintah Konsolidasian sebesar Rp26.639.221.324.611. Sedangkan Beban Operasional sebesar Rp24.464.467.104.214. Dengan kondisi tersebut, sehingga menghasilkan surplus atas kegiatan operasional sebesar Rp2.174.754.220.397. (Rincian pada Tabel LO LKPK, hal. 27)

Pada posisi Neraca Pemerintah konsolidasian tercatat memiliki Aset sebesar Rp84.943.504.339.172, Kewajiban sebesar Rp1.321.723.335.003, serta Ekuitas sebesar Rp83.621.781.004.169. Kondisi ini dapat memberikan gambaran bahwa tingkat likuiditas yang sangat tinggi sebesar 63 kali. Artinya dengan Rp1 nilai kewajiban, dapat dijamin oleh ketersediaan aset sebesar Rp63. (Rincian pada Tabel Neraca LKPK, hal. 21)

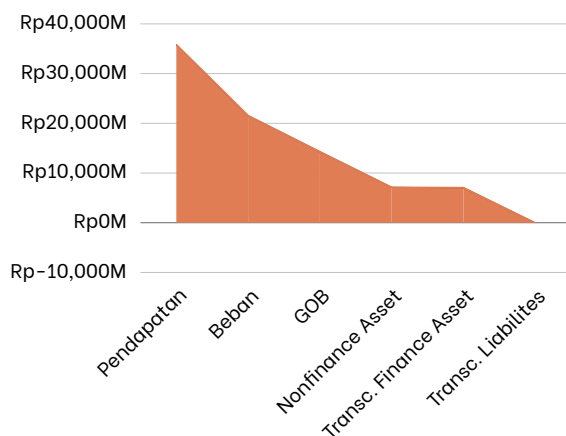
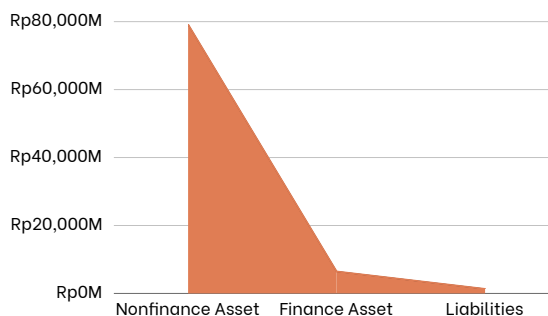


Flash Report

Gambaran Umum Kondisi
Keuangan LKPP-TW, LKPDK-TW,
LKPK-TW, LSKP-TW

a. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah

Kekayaan bersih GFS menunjukkan nilai positif. Nilai kekayaan bersih Rp84.307.069.352.441 didapat dari selisih antara total aset sebesar Rp85.628.792.687.443 dengan Kewajiban sebesar Rp1.321.723.335.003. Dapat diartikan bahwa nilai aset neto jauh lebih besar dibandingkan nilai kewajiban (63 berbanding 1). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat likuiditas keuangan pemerintah konsolidasian di wilayah Provinsi Jambi masih dalam batas aman. (Rincian pada Tabel Neraca LSKPU, hal. 34)



Kondisi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Konsolidasian menunjukkan surplus sebesar Rp14.271.078.068.529. Saldo peminjaman menunjukkan nilai positif sebesar Rp7.085.827.771.183 artinya di wilayah provinsi Jambi masih terdapat saldo peminjaman yang dapat dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan, biaya operasional dan pembangunan tanpa harus menerbitkan hutang yang baru. (Rincian pada Tabel LO LSKPU, hal. 31)



Flash Report

Perkembangan Kondisi Keuangan Berdasarkan Analisis Laporan Keuangan

Rasio solvabilitas jangka pendek pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Wilayah Provinsi Jambi sebesar 506,21% yang berarti kemampuan pemerintah konsolidasian dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sebesar 5,06 terhadap total aset lancar yang dimiliki. Artinya kondisi ini sangat baik dimana setiap 1 rupiah kewajiban jangka pendek dijamin 5,06 kali aset lancar. Besarnya Aset Lancar sangat dipengaruhi oleh tingginya Kas dan setara kas yang dimiliki oleh Pemerintah Konsolidasi yaitu sebesar Rp2.482.968.094.418 atau 45,14 persen dari total Aset Lancar Konsolidasian.

Sejalan dengan aset lancar yang dapat memenuhi kewajiban jangka pendek, ketersediaan total aset yang dimiliki pemerintah konsolidasian sanggup menutupi kewajiban jangka panjang dengan tingkat kesanggupan sebesar 36.132% yang berarti kemampuan pemerintah konsolidasian dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya sebesar 361,32 terhadap total aset yang dimiliki. Kondisi ini sangat baik dimana setiap 1 rupiah kewajiban jangka panjang dijamin 361,32 kali nilai total aset. Besarnya total aset sangat dipengaruhi oleh tingginya nilai aset tetap yaitu sebesar Rp76.972.871.494.283 atau 90,62 persen dari total aset.

Namun, kondisi nilai aset yang dimiliki cenderung berbanding terbalik dengan kondisi tingkat kemandirian keuangan daerah, Wilayah Provinsi Jambi berada pada kondisi tingkat “Rendah Sekali” dengan rata-rata perolehan 18,64% yang berarti bahwa partisipasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap perolehan total pendapatan daerah wilayah Provinsi Jambi masih minim. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah masih rendah, baik partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pembentuk PAD.

Dari sisi keseimbangan fiskal pemerintah konsolidasian, Operasi Neto Balancing (Net Operating Balance/NOB) menunjukkan nilai surplus sebesar Rp14.271.078.068.529 dimana nilai tersebut didapat dari Pendapatan GFS sebesar Rp35.800.032.107.652 dikurangi jumlah Beban GFS sebesar Rp21.528.954.039.123. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh mampu menyeimbangkan beban-beban pengeluaran selama Tahun 2023.



Flash Report

Permasalahan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Berdampak pada Kinerja Keuangan dan Statistik

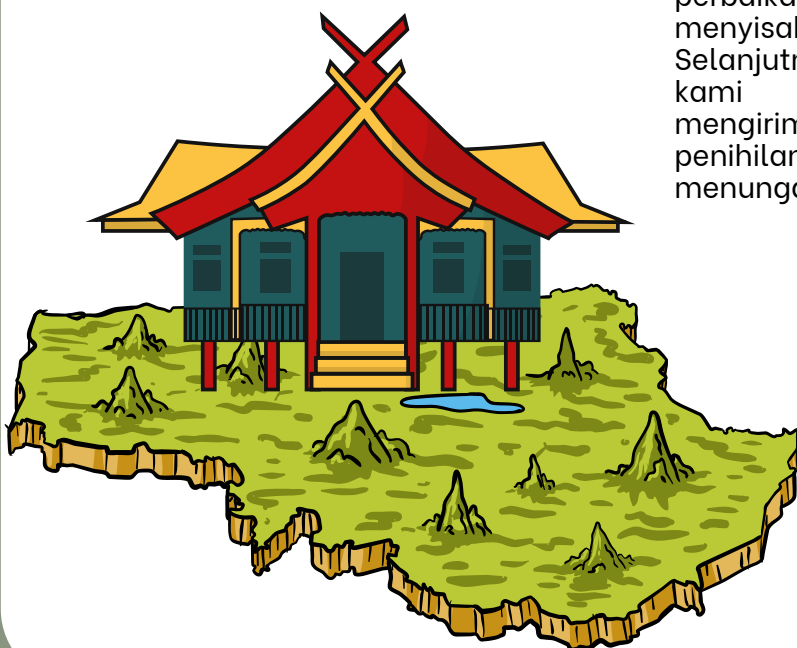


Pemda	Persentase Realisasi
Kab. Bungo	82,24%
Kota Jambi	92,29%
Provinsi Jambi	93,95%
Kab. Sarolangun	92,23%
Kota Sungai Penuh	91,45%
Kab. Tebo	92,94%
Kab. Tanjabbar	86,87%
Kab. Tanjabtim	89,67%
Kab. Muaro Jambi	96,13%
Kab. Merangin	93,20%
Kab. Batanghari	87,37%
Kab. Kerinci	89,98%
Rata-Rata Lingkup Provinsi	90,69%

1. Masih terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Belanja Transfer Pemerintah Pusat Rp15.194.720.437.654 dan Pendapatan Transfer yang dicatat oleh Pemerintah Daerah senilai Rp13.129.468.574.985 atau selisih Rp2.065.251.862.669.

2. Berdasarkan tabel di samping, sampai dengan 31 Desember 2023, secara keseluruhan realisasi belanja Pemerintah Daerah baru terealisasi dengan rata-rata sebesar 90,69% dari anggaran.

3. Terdapat perbedaan data antara Laporan FACE GFS dan GFS Table 1 (Revenue) dan Table 2 (Expenses) pada akun *Grants* dikarenakan perbaikan jurnal yang masih menyisakan selisih data. Selanjutnya, permasalahan telah kami tindaklanjuti dengan mengirimkan tiket ke HAI untuk penihilan penjurnalan dan sedang menunggu tindak lanjut.



Flash Report

Resume Pelaksanaan Kegiatan Bidang PAK Kanwil DJPb Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun 2023

1. Audiensi dengan Bupati Muaro Jambi

Audiensi dengan Bupati Muaro Jambi dilaksanakan pada hari Selasa, 14 November 2023 pada pukul 09.00 hingga 11.30 bertempat di Kantor Bupati Muaro Jambi dengan tujuan meningkatkan sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam hal menjaga kualitas pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan pemerintah daerah.



2. Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan pada Senin, 4 Desember 2023 sebagai sarana meningkatkan kerja sama antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi dengan seluruh pemerintah daerah di lingkup Provinsi Jambi dan memberikan peningkatan bekal pemahaman kepada pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas, akuntabel dan transparan.





3. Pendampingan Penyusunan dan Penyelesaian Permasalahan Laporan Keuangan UAPPA-W

Pendampingan Penyusunan dan Penyelesaian Permasalahan Laporan Keuangan UAPPA-W dilaksanakan di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi pada hari Selasa s.d. Rabu, tanggal 28 s.d. 29 November 2023 dengan maksud membantu menyelesaikan kepatuhan data laporan keuangan berupa to-do list, rekonsiliasi dan tutup periode serta permasalahan yang muncul terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan 2023 tingkat UAPPA-Wilayah.



Flash Report

Resume Pelaksanaan Kegiatan
Bidang PAK Kanwil DJPb Provinsi
Jambi Triwulan IV Tahun 2023

4. Kegiatan Bimtek Monitoring Kualitas Data (To-Do List) Dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 Tingkat UAPPA Wilayah (Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023)

Kegiatan Bimtek Monitoring Kualitas Data (To-Do List) Dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 Tingkat UAPPA Wilayah (Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023) dilaksanakan pada Jumat, 13 Oktober 2023 yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan To-Do List serta permasalahan yang muncul terkait dengan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III 2023 tingkat UAPPA-Wilayah dengan menyesuaikan pada regulasi terbaru yakni Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023.



Flash Report

Kesimpulan & Saran

Kesimpulan

Laporan Realisasi Anggaran pemerintah konsolidasi menunjukkan defisit-LRA sebesar minus Rp17.064.734.649.373. Posisi Neraca, tercatat pemerintah konsolidasi memiliki Aset sebesar Rp84.943.504.339.172, Kewajiban sebesar Rp1.321.723.335.003, serta Ekuitas sebesar Rp83.621.781.004.169 .

Tingkat Rasio Solvabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebesar 506,21% dan 36.132,11% yang menunjukkan Provinsi Jambi memiliki tingkat kewajiban yang sehat, namun Tingkat Kemandirian masih pada “Rendah Sekali” dengan rata-rata perolehan 18,64%.

Dalam Triwulan III ini, Kanwil DJPb Jambi telah melakukan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas data GFS, seperti Audiensi dengan Bupati Muaro Jambi, *Focus Group Discussion* (FGD) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pendampingan Penyusunan dan Penyelesaian Permasalahan Laporan Keuangan UAPPA-W dan Kegiatan Bimtek Monitoring Kualitas Data (To-Do List) Dan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 Tingkat UAPPA Wilayah (Sosialisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023).

Saran

Agar Pemda lebih aktif dalam memutakhirkan data TKD sesuai dengan data pada KPPN.

Agar Pemda mendorong realisasi Belanja pada APBD, penyerapan realisasi anggaran sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat.





A. PENDAHULUAN

Stunting merupakan suatu kondisi status gizi balita di bawah standar yang diukur melalui perbandingan tinggi badan dengan umur, sehingga menyebabkan terlambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak.

Menurut Kementerian Kesehatan, seorang balita dikatakan stunting jika nilai z-score nya kurang dari -2.00 standar deviasi (stunted/pendek) dan kurang dari -3.00 standar deviasi (severely stunted/sangat pendek). Stunting dapat terjadi mulai dari saat janin masih dalam kandungan dan baru terlihat ketika anak berusia dua tahun. Ciri dari anak yang mengalami stunting dapat dilihat berdasarkan tinggi badan dan berat badan anak yang lebih pendek dari anak seusianya, serta terlihat lebih kecil dari usianya padahal proporsi tubuh normal. Selain ciri fisik, ciri stunting lainnya adalah gangguan konsentrasi yang menyebabkan menurunnya kemampuan memori belajar anak dan anak mudah terserang penyakit infeksi. Anak balita yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan kurang maksimal, lebih rentan terhadap penyakit, dan berisiko menurunkan produktivitas yang kemudian secara luas, stunting akan menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperluas ketimpangan. Indonesia menjadi salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara lainnya dan menempati peringkat 5 di dunia dengan jumlah anak pendek terbanyak. Peringkat ini lebih baik dibanding negara India, Tiongkok, Nigeria, dan Pakistan, tetapi masih relatif lebih tinggi daripada negara-negara di Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Thailand.

Flash Report

Analisis Peran Daerah dalam Mencapai Target Stunting Tahun 2024

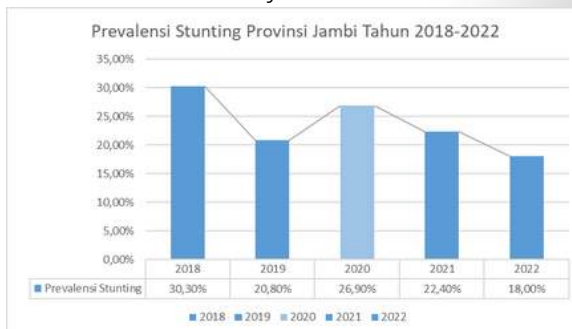
Grafik 1: Prevalensi Stunting Indonesia Tahun 2007-2022



Sumber : SSGI dan Riskesdas

Grafik 1 menunjukkan bahwa perkembangan prevalensi stunting di Indonesia mengalami tren penurunan. Dimulai dari tahun 2007 sebesar 36,80 persen dan menjadi 21,60 persen pada tahun 2022. Penurunan angka prevalensi stunting tersebut dikarenakan oleh upaya pemerintah yang terus melakukan skrining anemia terhadap ibu hamil, pemberian tablet tambah darah (TTD) kepada remaja putri dan ibu hamil, membantu pertumbuhan balita, dan mendorong pemberian ASI eksklusif serta melakukan edukasi kepada masyarakat. Namun, penurunan angka tersebut masih berada di atas standar yang ditetapkan WHO sebesar 20 persen. Harapannya, prevalensi stunting dapat menurun sebesar 14 persen yang menjadi target di tahun 2024. Oleh karena itu, diperlukan peran serta semua pihak terkait guna mencapai target tersebut terutama daerah yang memiliki tingkat prevalensi stunting di atas rata-rata nasional.

Grafik 2: Prevalensi Stunting Provinsi Jambi Tahun 2018-2022



Sumber : SSGI dan Riskesdas

*Data Prevalensi Stunting Indonesia dan Provinsi Jambi Tahun 2020 berupa prediksi yang bersumber dari SSGI & Riskesdas dikarenakan tidak terdapat data SSGI tahun tsb disebabkan kondisi pandemi COVID-19.



Flash Report

Analisis Peran Daerah dalam Mencapai Target Stunting Tahun 2024

Grafik 2 menunjukkan bahwa perkembangan prevalensi stunting di Jambi mengalami tren penurunan. Dimulai dari tahun 2018 sebesar 30,30 persen dan menjadi 18,00 persen pada tahun 2022. Penurunan angka prevalensi stunting tersebut dikarenakan oleh upaya pemerintah daerah.

B. LANDASAN TEORI

Melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting bermaksud untuk:

1. Menurunkan prevalensi Stunting;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
3. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
4. Memperbaiki pola asuh;
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
6. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Strategi Nasional tersebut dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, yang dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun. Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi stunting Pemerintah menetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024. Target antara prevalensi Stunting tersebut dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga pihak pendukung. Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024.

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan target prevalensi stunting yang harus dicapai yaitu sebesar 12% (dua belas persen) pada tahun 2024. Target optimis ini tentunya didukung dengan pengeluaran atau belanja pemerintah yang dilakukan terkait dengan Strategi Penurunan Stunting, sesuai dengan rincian belanja pada lampiran PMK Nomor 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023, seperti belanja untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, Bimbingan Keluarga, promosi konsumsi makanan bergizi, dan pengelolaan sistem air minum.

Pada tahun 2022 angka prevalensi stunting nasional mencapai 21,60%, sehingga masih terdapat selisih 7% dengan target tahun 2024 sebesar 14%. Angka Prevalensi Stunting di Provinsi Jambi tentu mempengaruhi angka Prevalensi Indonesia secara keseluruhan, maka karena itu sebagai bentuk peran partisipasi daerah, Provinsi Jambi juga harus bisa mencapai Target Prevalensi Stunting sebesar 14% atau bahkan lebih kecil, di tahun 2024. Pada tahun 2022 angka prevalensi stunting Provinsi Jambi mencapai 18,00%, sehingga masih terdapat selisih dengan target tahun 2024 provinsi sebesar 12% dan target nasional sebesar 14%.

C. METODOLOGI

Data yang digunakan dalam analisis ini yaitu data pengeluaran atau belanja pemerintah daerah yang dirilis oleh Kemendagri pada aplikasi SIPD serta data prevalensi stunting yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan pada Riskesdas dan SSGI.

Flash Report

Analisis Peran Daerah dalam Mencapai Target Stunting Tahun 2024

Metode analisis yang digunakan yaitu metode statistik deskriptif. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna (Walpole, 1995). Statistik Deskriptif mengacu pada transformasi data mentah kedalam suatu bentuk yang akan membuat pembaca lebih mudah mengerti dan menafsirkan maksud dari data atau angka yang ditampilkan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data diantaranya:

1. Membuat tabel ringkasan Belanja Pemerintah Daerah per Pemda Tahun 2023 dengan tagging Belanja Stunting.
2. Membanding realisasi Belanja Tagging Stunting antara Pagu dengan Realisasi Tahun 2023.
3. Membandingkan realisasi Belanja Tagging Stunting Realisasi Tahun 2023 dengan Angka Prevalensi Stunting Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Jambi.
4. Membuat Grafik berdasarkan data yang ada; dan
5. Mendeskripsikan data yang merupakan hasil perbandingan antara Realisasi Belanja dengan Prevalensi Stunting.

D. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Stunting telah menjadi perhatian Pemerintah dalam 3 tahun terakhir, Pemerintah kemudian membentuk tim percepatan penurunan angka Stunting dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian masalah yang menimpa masyarakat kalangan menengah ke bawah ini.

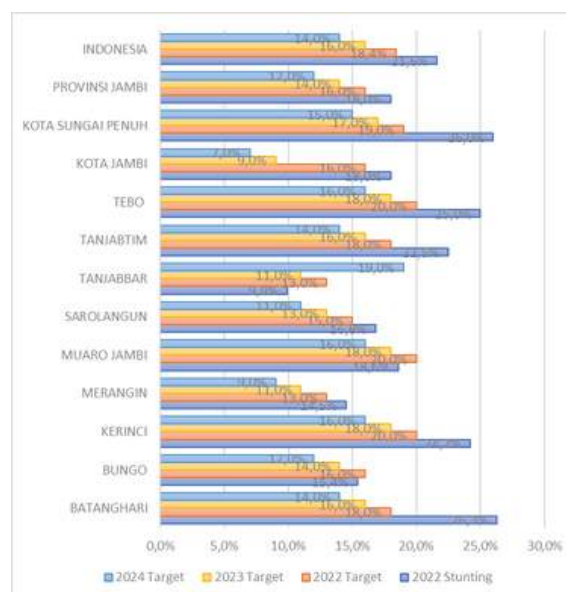
Grafik 3: Prevalensi Stunting Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Jambi Tahun 2022



Sumber : SSGI dan Riskesdas

Grafik 3 menunjukkan bahwa angka Prevalensi Stunting di Provinsi Jambi pada Tahun 2022 cukup variatif, beberapa Pemerintah Daerah sudah mendekati target 14% bahkan Kab. Tanjung Jabung Barat berhasil mencapai angka 9,9%, namun masih terdapat Pemerintah Daerah dengan angka diatas rata-rata nasional.

Grafik 4 : Perbandingan Target dan Prevalensi Stunting Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Jambi Tahun 2022



Sumber : PERDA Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD PROVINSI JAMBI 2021-2026 (diolah)

Tabel 1 Realisasi dan Target Prevalensi Stunting

Pemda	Stunting 2022	2022		2022		2022	
		Target	Selisih	Target	Selisih	Target	Selisih
Kab. Bungo	15,4%	16,0%	0,6%	14,0%	-1,4%	12,0%	-3,4%
Kota Jambi	18,0%	11,0%	-7,0%	9,0%	-9,0%	7,0%	-11,0%
Kab. Sarolangun	16,8%	15,0%	-1,8%	13,0%	-3,8%	11,0%	-5,8%
Kota Sungai Penuh	26,0%	19,0%	-7,0%	17,0%	-9,0%	15,0%	-11,0%
Kab. Tebo	25,0%	20,0%	-5,0%	18,0%	-7,0%	16,0%	-9,0%
Kab. Tanjabbar	9,9%	13,0%	3,1%	11,0%	1,1%	9,0%	-0,9%
Kab. Tanjabtim	22,5%	18,0%	-4,5%	16,0%	-6,5%	14,0%	-8,5%
Kab. Muaro Jambi	18,6%	20,0%	1,4%	18,0%	-0,6%	16,0%	-2,6%
Kab. Merangin	14,5%	13,0%	-1,5%	11,0%	-3,5%	9,0%	-5,5%
Kab. Batanghari	26,3%	18,0%	-8,3%	16,0%	-10,3%	14,0%	-12,3%
Kab. Kerinci	24,2%	20,0%	-4,2%	18,0%	-6,2%	16,0%	-8,2%
Provinsi Jambi	18,0%	16,0%	-2,0%	14,0%	-4,0%	12,0%	-6,0%
Indonesia	21,6%	18,4%	-3,2%	16,0%	-5,6%	14,0%	-7,6%

Sumber : PERDA Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD PROVINSI JAMBI 2021-2026 (diolah)

Flash Report

Analisis Peran Daerah dalam Mencapai Target Stunting Tahun 2024

Grafik 4 dan Tabel 1 menunjukkan bahwa angka Prevalensi Stunting di Provinsi Jambi pada Tahun 2022 sebesar 18% masih belum memenuhi target RPJMD untuk tahun 2022 sebesar 16% dan target nasional sebesar 18,4%. Hanya terdapat 3 Pemerintah Daerah yang dapat mencapai target yang telah ditentukan dalam RPJMD, antara lain Kabupaten Bungo sebesar 15,4% dari target 16%, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 18,6% dari target 20% dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar 9,9% dari target 13%.

Grafik 5 : Belanja Stunting Tahun 2023 Provinsi Jambi



Sumber : SIPD

Grafik 5 menunjukkan total realisasi belanja daerah dengan tagging stunting di lingkup Pemda Provinsi Jambi pada Tahun 2023 yaitu sebesar Rp769.038.794.595 atau 4,11% dari total belanja daerah sebesar Rp18.711.556.936.495.

Tabel 2 Persentase Belanja Stunting 2023

Pemda	Realisasi	Prevalensi 2022
Kab. Bungo	164,40%	15,40%
Kota Jambi	116,50%	18,00%
Provinsi Jambi	98,50%	-
Kab. Sarolangun	95,00%	16,80%
Kota Sungai Penuh	86,50%	26,00%
Kab. Tebo	83,30%	25,00%
Kab. Tanjabbar	82,70%	9,90%
Kab. Tanjabtim	80,30%	22,50%
Kab. Muaro Jambi	69,50%	18,60%
Kab. Merangin	69,00%	14,50%
Kab. Batanghari	66,00%	26,30%
Kab. Kerinci	54,30%	24,20%
PROVINSI JAMBI	88,4%	18%

Sumber : data series APBN (diolah)

Dapat kita lihat pada Grafik 4 dan Tabel 1, Pemerintah Daerah dengan realisasi tertinggi berdasarkan pagu yaitu Pemkab Bungo dengan realisasi hingga 164%, diikuti oleh Pemkot Jambi sebesar 116,5%. Sedangkan Pemerintah Daerah dengan realisasi terendah yaitu Pemkab Kerinci dengan realisasi 54,3%, dibawah Pemkab Batanghari sebesar 66%.

Jika seluruh Realisasi Belanja dijumlahkan, kita dapat melihat bahwa realisasi pada Pemda di lingkup Provinsi Jambi yaitu sebesar 88,4%.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Jika diasumsikan bahwa serapan belanja daerah dengan tagging stunting mempengaruhi angka prevalensi stunting, maka bisa kita simpulkan bahwa pada tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten Bungo akan mengalami penurunan angka prevalensi stunting yang cukup signifikan, relatif jika dibandingkan dengan Pemda lainnya. Walaupun belum mencapai target 14%, di tahun 2022 Kab. Bungo sudah memiliki angka prevalensi stunting dibawah rata-rata nasional, melihat tingginya serapan belanja pengentasan stunting Kab. Bungo di tahun 2023, diharapkan angka prevalensi stunting Kab. Bungo di tahun 2023 dapat menurun dibawah 14%.

Kesimpulan ini juga diharapkan berlaku untuk Pemerintah Kota Jambi dengan realisasi belanja stunting mencapai 116%. Dengan realisasi belanja stunting yang tinggi diharapkan dapat mengejar target prevalensi stunting yang masih selisih sebesar 7% di tahun 2022 dan selisih 9% di tahun 2023.





Flash Report

Analisis Peran Daerah dalam Mencapai Target Stunting Tahun 2024

Untuk Pemda dengan tingkat realisasi disekitar angka 80% - 99%, diperkirakan akan mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan Pemda dengan realisasi dibawah 80% diperkirakan akan mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan atau bahkan stagnan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk Pemkab Bungo dan Pemkot Jambi dapat dikatakan telah sudah berusaha melaksanakan tugas pengentasan stunting melalui realisasi belanja stunting yang sangat baik. Diharapkan dengan realisasi belanja yang baik tersebut dapat menekan angka prevalensi stunting sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Untuk Pemerintah Daerah dengan realisasi belanja 80-99% diharapkan dapat meningkatkan kinerja di tahun 2024 agar dapat mencapai target prevalensi stunting yang telah ditetapkan.

Bagi Pemerintah dengan realisasi dibawah 80%, perlu diberikan perhatian yang lebih, dikhawatirkan jika kinerja pada tahun 2024 sama dengan Tahun 2023, Pemerintah Daerah tidak dapat mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan, terutama Pemkab Batanghari dan Pemkab Kerinci. Kedua Pemda ini selain memiliki prevalensi stunting yang masih diatas rata-rata nasional, realisasi juga memiliki realisasi yang rendah di tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Walpole, Ronald E. (1995). Pengantar Statistika. PT Gramedia Pustaka Utama
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. (2019). Laporan Nasional Riskesdas 2018.

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. (2022). Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Tahun 2021.

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. (2023). Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SGSI) 2022.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2018). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) Periode 2018 - 2024.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun Anggaran 2023

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2023
A. Pendapatan	
I. Penerimaan Perpajakan	
1. Pajak Dalam Negeri	7.227.414.601.414
2. Pajak Perdagangan Internasional	185.191.008.351
Jumlah Penerimaan Perpajakan	7.412.605.609.765
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	
1. Pendapatan BLU	493.032.971.319
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	486.246.146.384
Jumlah PNBP	979.279.117.703
Jumlah Pendapatan (A.I + A.II)	8.391.884.727.468
B. Belanja	
I. Belanja Pemerintah Pusat per Wilayah	
1. Belanja Pegawai	2.621.680.581.102
2. Belanja Barang	3.170.872.299.236
3. Belanja Modal	3.136.703.196.964
4. Belanja Bantuan Sosial	26.585.905.600
Jumlah Belanja Pemerintah Pusat per Wilayah	8.955.841.982.902
II. Transfer ke Daerah	
1. Transfer Dana Perimbangan	
Dana Transfer Umum	10.848.306.494.322
a. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	3.175.976.912.925
b. Transfer Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	-
c. Transfer Dana Alokasi Umum	7.672.329.581.397
Dana Transfer Khusus	3.035.366.132.253
a. Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik	1.087.394.427.695
b. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.947.971.704.558
Jumlah Belanja Transfer Dana Perimbangan	13.888.672.626.575
2. Dana Insentif Daerah	123.590.462.500
3. Dana Desa	1.187.457.348.579
Jumlah Transfer Ke Daerah	15.194.720.437.654
Jumlah Belanja Negara (B.I + B. II)	24.150.562.420.556
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A – B)	(15.758.677.693.088)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2023
A. Pendapatan Pemerintah Daerah	
I. Pendapatan Asli Daerah	
1. Pajak Daerah	2.312.666.440.086
2. Retribusi Daerah	93.631.497.469
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	138.759.036.258
4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	699.453.847.365
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	3.244.510.821.178
II. Pendapatan Transfer	
1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	
a. Dana Bagi Hasil Pajak	931.705.383.622
b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	1.548.834.473.470
c. Dana Alokasi Umum	7.055.554.698.540
d. Dana Alokasi Khusus	2.530.465.122.237
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	12.066.559.677.869
2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	
a. Dana Penyesuaian	-
b. Dana Insentif Daerah	105.888.925.000
c. Dana Desa	957.019.972.116
d. Dana Bantuan Operasional Sekolah	-
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	1.062.908.897.116
3. Transfer Bantuan Keuangan	
a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	-
b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Lainnya	-
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	-
Jumlah Pendapatan Transfer	13.129.468.574.985
III. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	
1. Pendapatan Hibah	
a. Hibah dari Pemerintah Pusat	3.000.000.000
b. Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	-
c. Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	2.343.671.321
d. Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	19.164.556.476
Jumlah Pendapatan Hibah	24.508.227.797
2. Pendapatan Lainnya	
Pendapatan Lain-Lain	-
Jumlah Pendapatan Lainnya	-
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	24.508.227.797
Jumlah Pendapatan (A.I + A.II + A.III)	16.398.487.623.960
B. Belanja Negara	
I. Belanja Operasi	
1. Belanja Pegawai	6.339.994.193.099
2. Belanja Barang dan Jasa	4.794.764.915.996
3. Belanja Bunga	19.021.369.427
4. Subsidi	21.898.781.201
5. Hibah	551.748.025.139
6. Bantuan Sosial	15.218.494.097

URAIAN	31 DESEMBER 2023
Jumlah Belanja Operasi	11.742.645.778.959
II. Belanja Modal	
1. Belanja Modal Tanah	39.870.612.876
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	789.085.136.466
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.270.967.272.724
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.910.229.959.262
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	47.874.200.231
6. Belanja Modal Aset Lainnya	1.954.008.170
7. Belanja Modal BLUD	-
Jumlah Belanja Modal	4.059.981.189.729
III. Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	10.306.126.851
Jumlah Belanja Tak Terduga	10.306.126.851
Jumlah Belanja (B.I + B.II + B.III)	17.704.544.580.245
C. Transfer	
I. Transfer/Bagi Hasil ke Desa	
1. Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	33.067.664.936
2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.618.598.817
Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa	34.686.263.753
II. Transfer Bantuan Keuangan	
1. Bantuan Keuangan ke Kab./Kota Lainnya	44.539.944.321
2. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.812.385.276.632
3. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	1.856.925.220.953
Jumlah Transfer Pemerintah Daerah	1.891.611.484.706
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH (B + C)	17.704.544.580.245
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A-B-C)	(1.306.056.956.285)
E. Pembiayaan	
I. Penerimaan Pembiayaan	
1. Penggunaan SILPA	1.265.839.759.907
2. Pencairan Dana Cadangan	
3. Pinjaman Dalam Negeri	163.628.653.400
4. Penerimaan Kembali Piutang	
5. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.429.468.413.307
II. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	38.000.000.000
2. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	211.231.867.611
3. Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	-
4. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	41.569.600.725
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	290.801.468.336
Jumlah Pembiayaan (E.I - E.II)	1.138.666.944.971
F. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D-E)	(167.390.011.314)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2023
A. Pendapatan dan Hibah	
I. Pendapatan Perpajakan	9.725.272.049.851
1. Pajak Dalam Negeri	9.540.081.041.500
2. Pajak Perdagangan Internasional	185.191.008.351
II. Pendapatan Bukan Pajak	1.911.123.498.795
1. Bagian Pemerintah atas Laba BUMD dan BUMN	138.759.036.258
2. Pendapatan Bukan Pajak Lainnya	740.390.776.128
3. Bantuan Keuangan Pemda	-
4. Pendapatan BLU	1.031.973.686.409
III. Pendapatan Hibah	24.508.227.797
Pendapatan Hibah Dalam Negeri	24.508.227.797
Jumlah Pendapatan	11.660.903.776.443
B. Belanja	
I. Belanja Pemerintah	24.768.775.078.441
1. Belanja Pegawai	8.961.674.774.201
2. Belanja Barang dan Jasa	7.965.637.215.232
3. Belanja Modal	7.196.684.386.693
4. Bunga Utang	19.021.369.427
5. Subsidi	21.898.781.201
6. Hibah	551.748.025.139
7. Belanja Bantuan Sosial	41.804.399.697
8. Belanja Lain-Lain	10.306.126.851
II. Transfer	3.956.863.347.375
1. Transfer Pemda	1.891.611.484.706
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	34.686.263.753
Transfer Bantuan Keuangan	1.856.925.220.953
2. Transfer Pemerintah Pusat Ke Pemda yang tidak habis dieliminasi	2.065.251.862.669
Jumlah Belanja & Transfer	28.725.638.425.816
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(17.064.734.649.373)
D. Pembiayaan	
I. Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.429.468.413.307
1. SILPA TA sebelumnya	
2. Penerimaan Pinjaman Daerah	
3. Penerimaan Kembali Piutang	
4. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	
II. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	290.801.468.336
1. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	38.000.000.000
2. Pembayaran Utang Jangka Panjang lainnya	252.801.468.336
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)	1.138.666.944.971
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-(D+C)	(15.926.067.704.402)

**NERACA PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
PER 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2023
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Bank	
Kas di Bendahara Pengeluaran	75.254.000
Kas di Bendahara Penerimaan	5.411.681
Kas Lainnya dan Setara Kas	259.745.443.596
Kas pada BLU	331.457.664.645
Jumlah Kas dan Bank	591.283.773.922
Investasi Jangka Pendek	20.098.630.130
Belanja dibayar di muka	5.229.131.354
Uang Muka Belanja	15.189.790
Pendapatan yang Masih harus Diterima	310.094.077
Piutang	
Piutang Pajak	699.043.692.666
Piutang Bukan Pajak	208.371.472.958
Bagian Lancar TP/TGR	1.264.730.970
Piutang dari Kegiatan BLU	14.799.985.945
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(434.553.561.912)
Jumlah Piutang	488.926.320.627
Persediaan	1.391.080.680.729
Persediaan Belum Diregister	240.000
Jumlah Aset Lancar	2.496.944.060.629
Aset Tetap	
Tanah	28.879.782.746.335
Peralatan dan Mesin	5.160.444.106.367
Gedung dan Bangunan	3.737.225.268.165
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	14.091.972.872.417
Aset Tetap Lainnya	133.037.787.568
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.973.731.669.782
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	4.400.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(11.188.325.708.619)
Jumlah Aset Tetap	43.787.873.142.015
Piutang Jangka Panjang	
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	1.679.338.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	(55.207.530)
Jumlah Piutang Jangka Panjang	1.624.130.470
Aset Lainnya	
Aset Tak Berwujud	207.906.222.364
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	313.820.427.246
Dana Penjaminan	
Aset Lain-lain	204.534.812.136
Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP dan Kas Besi	
Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	(130.680.378.516)
Akum. Amortisasi Aset Lainnya	(65.174.216.784)
Jumlah Aset Lainnya	530.406.866.446
JUMLAH ASET	46.816.848.199.560

URAIAN	31 DESEMBER 2023
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Kepada Pihak Ketiga	241.292.694.444
Utang Transfer	58.786.123.495
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	64.881.972.499
Pendapatan Diterima Dimuka	5.935.793.475
Utang Jangka Pendek Lainnya	540.786.935
Uang Muka dari KUN	7.235.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	371.444.605.848
JUMLAH KEWAJIBAN	371.444.605.848
EKUITAS	
Ekuitas	46.445.403.593.712
JUMLAH EKUITAS	46.445.403.593.712
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	46.816.848.199.560

**NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
PER 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2023
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan Setara Kas	1.891.684.320.496
Investasi Jangka Pendek	-
Piutang Pendapatan	691.819.239.391
Piutang Lainnya	68.330.401.836
Penyisihan Piutang	(250.679.578.830)
Beban Dibayar Dimuka	11.343.156.487
Persediaan	591.195.949.089
Jumlah Aset Lancar	3.003.693.488.471
INVESTASI JANGKA PANJANG	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	15.370.008.219
Investasi Jangka Panjang Permanen	1.920.640.282.484
Jumlah Investasi Jangka Panjang	1.936.010.290.703
ASET TETAP	
Tanah	3.799.862.564.799
Peralatan dan Mesin	9.095.941.733.430
Gedung dan Bangunan	14.006.056.072.444
Jalan, Irigasi dan Jaringan	37.264.858.760.484
Aset Tetap Lainnya	1.218.895.085.500
Konstruksi Dalam Pengerjaan	454.185.416.526
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(32.654.801.280.915)
Jumlah Aset Tetap	33.184.998.352.268
ASET LAINNYA	
Aset Lain-lain	1.954.008.170
Jumlah Aset Lainnya	1.954.008.170
JUMLAH ASET	38.126.656.139.612
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	193.848.980
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	18.326.209.198
Utang Bunga	962.846.340
Pendapatan Diterima Dimuka	5.789.502.213
Utang Belanja	503.728.933.547
Utang Jangka Pendek Lainnya	186.185.910.607
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	715.187.250.885
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Utang Dalam Negeri	81.814.326.700
Utang Jangka Panjang Lainnya	153.277.151.570
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	235.091.478.270
JUMLAH KEWAJIBAN	950.278.729.155
EKUITAS	
JUMLAH EKUITAS	37.176.377.410.457
JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	38.126.656.139.612

NERACA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
PER 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2023
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan bank	2.482.968.094.418
Investasi Jangka Pendek	20.098.630.130
Belanja Dibayar Di Muka	16.572.287.841
Uang Muka Belanja	15.189.790
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	310.094.077
Piutang	998.396.383.025
Persediaan	1.982.276.869.818
Jumlah Aset Lancar	5.500.637.549.100
Investasi Jangka Panjang	
Investasi Non Permanen	15.370.008.219
Investasi Permanen	1.920.640.282.484
Jumlah Investasi Jangka Panjang	1.936.010.290.703
Aset Tetap	
Tanah	32.679.645.311.134
Peralatan dan Mesin	14.256.385.839.797
Gedung dan Bangunan	17.743.281.340.609
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	51.356.831.632.901
Aset Tetap Lainnya	1.351.932.873.068
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.427.917.086.308
Akumulasi Penyusutan	(43.843.126.989.534)
Aset Tetap Belum Diregister	4.400.000
Jumlah Aset Tetap	76.972.871.494.283
Piutang Jangka Panjang	
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
Tagihan TP/TGR	1.679.338.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR	(-55.207.530)
Jumlah Piutang Jangka Panjang	1.624.130.470
Aset Lainnya	
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	313.820.427.246
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
Aset Tak Berwujud	207.906.222.364
Aset Lain-lain	206.488.820.306
Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP dan Kas Besi	
Akumulasi Amortisasi – Aset Lainnya (ATB)	(195.854.595.300)
Jumlah Aset Lainnya	532.360.874.616
JUMLAH ASET	84.943.504.339.172
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	193.848.980
Utang Kepada Pihak Ketiga	745.021.627.991
Utang Bunga	962.846.340

URAIAN	31 DESEMBER 2023
Utang Subsidi	-
Utang Transfer	58.786.123.495
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	249.030.517.333
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	18.326.209.198
Utang yang Belum Ditagihkan	539.374.835
Pendapatan Diterima di Muka	9.990.944.324
Utang Belanja	-
Uang Muka	7.235.000
Utang jangka pendek lainnya	259.021.461.658
Utang Jangka Pendek Lainnya	3.773.129.236
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.086.631.856.733
Kewajiban Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	235.091.478.270
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	235.091.478.270
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	235.091.478.270
JUMLAH KEWAJIBAN	1.321.723.335.003
Ekuitas	
JUMLAH EKUITAS	83.621.781.004.169
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	84.943.504.339.172

**LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2/23**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2023
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	2.885.532.919.430
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	3.756.809.767.545
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	422.020.306.444
Pendapatan Cukai	1.077.122.000
Pendapatan Pajak Lainnya	73.379.094.154
Pendapatan Bea Masuk	22.390.776.736
Pendapatan Bea Keluar	162.744.195.000
Pendapatan Pajak Lain-Lain	1.412.100
Reklasifikasi dari Pajak yang belum Disetor Bendahara	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	7.323.952.769.209
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Pendapatan BLU	500.726.929.715
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	350.802.139.058
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	851.529.068.773
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	-
PENDAPATAN PENYESUAIAN	
Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	15.194.720.437.654
Jumlah Pendapatan Penyesuaian	15.194.720.437.654
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	23.370.202.275.636
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	2.752.243.997.805
Beban Persediaan	299.536.312.479
Beban Barang dan Jasa	1.528.694.863.338
Beban Pemeliharaan	324.312.536.205
Beban Perjalanan Dinas	375.430.630.313
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	813.046.669.918
Beban Bantuan Sosial	26.401.285.100
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.236.616.303.323
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	92.048.038.583
Beban Transfer	15.194.720.437.654
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	22.643.051.074.718
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	727.151.200.918
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS (DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2.229.794.108
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	37.512.312.645
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(35.282.518.537)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	-

URAIAN	31 DESEMBER 2023
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	141.836.911.969
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	24.108.056.850
Jumlah Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	117.728.855.119
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	82.446.336.582
SURPLUS/(DEFISIT) LO	809.597.537.500

LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2023
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	
Pendapatan Pajak Daerah-LO	2.312.666.440.086
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	93.631.497.469
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	138.759.036.258
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah-LO	699.453.847.365
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	3.244.510.821.178
PENDAPATAN TRANSFER	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	12.066.559.677.869
Bagi Hasil Pajak	931.705.383.622
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.548.834.473.470
Dana Alokasi Umum (DAU)	7.055.554.698.540
Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.530.465.122.237
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	105.888.925.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	
Bantuan Keuangan Daerah-LO	-
Jumlah Pendapatan Transfer	12.172.448.602.869
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	
Pendapatan Hibah	24.508.227.797
Pendapatan Lainnya	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	24.508.227.797
JUMLAH PENDAPATAN	15.441.467.651.844
BEBAN	
BEBAN OPERASI	
Beban Pegawai-LO	6.339.994.193.099
Beban Barang dan Jasa	5.154.372.284.696
Beban Bunga	19.021.369.427
Beban Subsidi	21.898.781.201
Beban Hibah	551.748.025.139
Beban Bantuan Sosial	15.218.494.097
Beban Penyusutan dan Amortisasi	
Beban Penyisihan Piutang	
Beban Lain-Lain	
Jumlah Beban Operasi	12.102.253.147.659
BEBAN TRANSFER	
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	33.067.664.936
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.618.598.817
Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah ke Pemerintah Daerah Lainnya	44.539.944.321
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.812.385.276.632
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
Jumlah Beban Transfer	1.891.611.484.706
JUMLAH BEBAN	13.993.864.632.365

URAIAN	31 DESEMBER 2023
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	1.447.603.019.479
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS NON OPERASIONAL	
Surplus penjualan aset non lancar	
Surplus dari kegiatan non operasional lainnya	
Jumlah Surplus Non Operasional	
DEFISIT NON OPERASIONAL	
Defisit penjualan aset non lancar	
Defisit Investasi Permanen	
Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya	
Jumlah Defisit Non Operasional	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	1.447.603.019.479
POS LUAR BIASA	
PENDAPATAN LUAR BIASA	
Pendapatan Luar Biasa	
BEBAN LUAR BIASA	
Beban Luar Biasa	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	
SURPLUS (DEFISIT)-LO	1.447.603.019.479

**LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2023
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
A. PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	2.885.532.919.430
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	3.756.809.767.545
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	422.020.306.444
Pendapatan Cukai	1.077.122.000
Pendapatan Perpajakan Pemerintah Daerah	2.312.666.440.086
Pendapatan Pajak Lainnya	73.377.682.054
Pendapatan Bea Masuk	22.390.776.736
Pendapatan Bea Keluar	162.744.195.000
Reklasifikasi dari Pajak yang belum Disetor Bendahara	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	9.636.619.209.295
B. PENDAPATAN BUKAN PAJAK	
Pendapatan Bagian Laba BUMN/BUMD/ Kekayaan Negara Dipisahkan	138.759.036.258
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO	1.139.328.797.894
Jumlah Pendapatan Bukan Pajak	1.278.087.834.152
C. PENDAPATAN TRANSFER	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan-LO	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	-
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	-
Bantuan Keuangan Daerah-LO	-
Jumlah Pendapatan Transfer	-
D. PENDAPATAN BLU	
Pendapatan Jasa Layanan Umum	470.523.265.773
Pendapatan Hibah BLU-LO	9.132.833.000
Pendapatan BLU Lainnya	21.070.830.942
Jumlah Pendapatan BLU	500.726.929.715
E. PENDAPATAN HIBAH	24.508.227.797
F. PENDAPATAN PENYESUAIAN AKRUAL	
Pendapatan Pelepasan dan Perolehan Aset	4.558.685.998
Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	15.194.720.437.654
Jumlah Pendapatan Penyesuaian Akrual	15.199.279.123.652
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	26.639.221.324.611
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	9.092.238.190.904
Beban Persediaan	299.540.164.479
Beban Barang	3.175.056.848.116
Beban Jasa	2.057.071.741.792
Beban Pemeliharaan	627.100.396.629
Beban Perjalanan Dinas	1.178.528.866.637
Beban BLU/BLUD	198.449.144.772

URAIAN	31 DESEMBER 2023
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	959.646.134.524
Beban Bunga	19.021.369.427
Beban Subsidi	21.898.781.201
Beban Hibah	551.748.025.139
Beban Bantuan Sosial	41.619.779.197
Beban lain-lain/beban tidak terduga	
Beban Penyusutan Aset Tetap	1.222.396.660.060
Beban Penyusutan Aset Lainnya/Amortisasi Aset Lainnya	14.219.643.263
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	92.048.038.583
Beban Transfer Pempus dan Dana Desa	3.022.271.834.785
Beban Transfer Pemda	1.891.611.484.706
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	24.464.467.104.214
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	2.174.754.220.397
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus (Defisit) Pempus Selisih Kurs Belum Trealisasi	486.871.274
Surplus (Defisit) Pempus Pelepasan Aset Non Lancar	(35.282.518.537)
Surplus (Defisit) Pempus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	117.241.983.845
Surplus (Defisit) Pemda Penjualan Aset Non Lancar	
Surplus (Defisit) Pemda Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
Jumlah Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	82.446.336.582
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	2.257.200.556.979
POS LUAR BIASA	
Pendapatan Luar Biasa	
Beban Luar Biasa	
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	
SURPLUS/(DEFISIT) LO	2.257.200.556.979

LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	Jumlah
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :		31 DESEMBER 2023
A1	Pendapatan	32.540.211.576.139
A11	Pajak	7.411.216.622.762
A12	Kontribusi Sosial	0
A13	Hibah	0
A14	Pendapatan Lainnya	25.128.994.953.377
A2	Beban	21.013.859.223.592
A21	Kompensasi Pegawai	2.745.969.150.890
A22	Penggunaan Barang dan Jasa	2.384.879.938.318
A23	Consumption of Fixed Capital	0
A24	Bunga	0
A25	Subsidi	0
A26	Hibah	15.194.720.437.654
A27	Manfaat Sosial	26.585.905.600
A28	Beban Lainnya	661.703.791.130
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	11.526.352.352.547
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	11.526.352.352.547
	TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN:	11.526.352.352.547
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	3.134.467.625.079
A311	Aset Tetap	3.101.245.353.282
A312	Perubahan Persediaan	0
A313	Barang Berharga	0
A314	Aset Non Produksi	33.222.271.797
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	8.391.884.727.468
	TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) :	
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	8.391.884.727.468
A321	Dalam Negeri	8.391.884.727.468
A322	Luar Negeri	
A323	Monetary gold and SDRs	
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	-
A331	Dalam Negeri	-
A332	Luar Negeri	
Pemeriksaan Vertikal: Perbedaan antara Saldo Neto Peminjaman/ Pinjaman dengan Pembiayaan (1-2-31=32-33-NLBz=0)		
SILPA Konsolidasian		

LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	Jumlah
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :		31 DESEMBER 2023
A1	Pendapatan	17.440.261.462.748
A11	Pajak	2.312.666.440.086
A12	Kontribusi Sosial	0
A13	Hibah	14.124.993.089.788
A14	Pendapatan Lainnya	1.002.601.932.874
A2	Beban	14.695.535.746.766
A21	Kompensasi Pegawai	6.339.994.193.099
A22	Penggunaan Barang dan Jasa	4.794.764.915.996
A23	Consumption of Fixed Capital	0
A24	Bunga	19.021.369.427
A25	Subsidi	21.898.781.201
A26	Hibah	3.122.056.329.445
A27	Manfaat Sosial	15.218.494.097
A28	Beban Lainnya	382.581.663.501
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	2.744.725.715.982
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	2.744.725.715.982
	TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN:	2.744.725.715.982
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	4.050.782.672.267
A311	Aset Tetap	4.010.912.059.391
A312	Perubahan Persediaan	0
A313	Barang Berharga	0
A314	Aset Non Produksi	39.870.612.876
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	(1.306.056.956.285)
	TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) :	
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	(1.353.660.170.496)
A321	Dalam Negeri	(1.353.660.170.496)
A322	Luar Negeri	
A323	Monetary gold and SDRs	
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	(47.603.214.211)
A331	Dalam Negeri	(47.603.214.211)
A332	Luar Negeri	
Pemeriksaan Vertikal: Perbedaan antara Saldo Neto Peminjaman/ Pinjaman dengan Pembiayaan (1-2-31=32-33-NLBz=0)		-
SILPA Konsolidasian		-

LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	Jumlah
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :		31 DESEMBER 2023
A1	Pendapatan	35.800.032.107.652
A11	Pajak	9.723.883.062.848
A12	Kontribusi Sosial	0
A13	Hibah	3.000.000.000
A14	Pendapatan Lainnya	26.073.149.044.804
A2	Beban	21.528.954.039.123
A21	Kompensasi Pegawai	9.085.963.343.989
A22	Penggunaan Barang dan Jasa	7.179.644.854.314
A23	Consumption of Fixed Capital	0
A24	Bunga	19.021.369.427
A25	Subsidi	21.898.781.201
A26	Hibah	4.136.335.835.864
A27	Manfaat Sosial	41.804.399.697
A28	Beban Lainnya	1.044.285.454.631
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	14.271.078.068.529
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	14.271.078.068.529
	TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN:	14.271.078.068.529
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	7.185.250.297.346
A311	Aset Tetap	7.112.157.412.673
A312	Perubahan Persediaan	0
A313	Barang Berharga	0
A314	Aset Non Produksi	73.092.884.673
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	7.085.827.771.183
	TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) :	
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	7.038.224.556.972
A321	Dalam Negeri	7.038.224.556.972
A322	Luar Negeri	
A323	Monetary gold and SDRs	
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	(47.603.214.211)
A331	Dalam Negeri	(47.603.214.211)
A332	Luar Negeri	
Pemeriksaan Vertikal: Perbedaan antara Saldo Neto Peminjaman/ Pinjaman dengan Pembiayaan (1-2-31=32-33-NLBz=0)		-
SILPA Konsolidasian		-

NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

Akun Statistik Keuangan Pemerintah	31 DESEMBER 2023
KEKAYAAN BERSIH	46.880.012.363.154
Aset Non Keuangan	45.395.540.501.944
Aset Tetap	15.102.220.170.815
Gedung dan Bangunan	13.559.887.662.991
Peralatan dan Mesin	1.224.109.940.483
Aset Tetap Lainnya	318.222.567.341
Persediaan	1.391.080.920.729
Aset Nonproduksi	28.902.239.410.400
Tanah	28.879.782.746.335
Aset tak Berwujud	22.456.664.065
Aset Keuangan	1.855.916.467.058
Uang dan Deposito	905.104.201.168
Surat Berharga Selain Saham	20.098.630.130
Pinjaman	0
Saham dan Ekuitas Lain	0
Piutang Lainnya	930.713.635.760
Aset Keuangan Domestik	1.855.916.467.058
Uang dan Deposito	905.104.201.168
Surat Berharga Selain Saham	20.098.630.130
Pinjaman	0
Saham dan Ekuitas Lain	0
Piutang Lainnya	930.713.635.760
Kewajiban	371.444.605.848
Surat Berharga Selain Saham	0
Pinjaman	0
Utang Lainnya	371.444.605.848
Kewajiban Domestik	371.444.605.848
Surat berharga selain saham	0
Pinjaman	0
Utang Lainnya	371.444.605.848
Kewajiban Luar Negeri	0
Surat berharga selain saham	0
Pinjaman	0
Utang Lainnya	0

NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

Akun Statistik Keuangan Pemerintah	31 DESEMBER 2023
KEKAYAAN BERSIH	37.427.056.989.286
Aset Non Keuangan	33.778.148.309.527
Aset Tetap	29.387.089.795.639
Gedung dan Bangunan	26.180.192.486.256
Peralatan dan Mesin	1.986.048.215.714
Aset Tetap Lainnya	1.220.849.093.670
Persediaan	591.195.938.089
Aset Nonproduksi	3.799.862.564.799
Tanah	3.799.862.564.799
Aset tak Berwujud	0
Aset Keuangan	4.599.187.408.914
Uang dan Deposito	1.891.684.320.496
Surat Berharga Selain Saham	15.370.008.219
Pinjaman	0
Saham dan Ekuitas Lain	1.920.640.282.484
Piutang Lainnya	771.492.797.715
Aset Keuangan Domestik	4.599.187.408.914
Uang dan Deposito	1.891.684.320.496
Surat Berharga Selain Saham	15.370.008.219
Pinjaman	0
Saham dan Ekuitas Lain	1.916.140.282.484
Piutang Lainnya	771.492.797.715
Kewajiban	950.278.729.154
Surat Berharga Selain Saham	0
Pinjaman	253.417.687.468
Utang Lainnya	696.861.041.686
Kewajiban Domestik	950.278.729.154
Surat berharga selain saham	0
Pinjaman	253.417.687.468
Utang Lainnya	696.861.041.686
Kewajiban Luar Negeri	0
Surat berharga selain saham	0
Pinjaman	0
Utang Lainnya	0

NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023

Akun Statistik Keuangan Pemerintah	31 DESEMBER 2023
KEKAYAAN BERSIH	84.307.069.352.441
Aset Non Keuangan	79.173.688.811.471
Aset Tetap	44.489.309.966.454
Gedung dan Bangunan	39.740.080.149.246
Peralatan dan Mesin	3.210.158.156.197
Aset Tetap Lainnya	1.539.071.661.011
Persediaan	1.982.276.869.818
Aset Nonproduksi	32.702.101.975.199
Tanah	32.679.645.311.134
Aset tak Berwujud	22.456.664.065
Aset Keuangan	6.455.103.875.972
Uang dan Deposito	2.796.788.521.664
Surat Berharga Selain Saham	35.468.638.349
Pinjaman	0
Saham dan Ekuitas Lain	1.916.140.282.484
Piutang Lainnya	1.922.638.880.128
Aset Keuangan Domestik	6.271.083.755.869
Uang dan Deposito	2.416.934.585.038
Surat Berharga Selain Saham	15.370.008.219
Pinjaman	0
Saham dan Ekuitas Lain	1.920.640.282.484
Piutang Lainnya	1.702.206.433.475
Kewajiban	1.321.723.335.003
Surat Berharga Selain Saham	0
Pinjaman	253.417.687.468
Utang Lainnya	1.068.305.647.535
Kewajiban Domestik	1.321.723.335.003
Surat berharga selain saham	0
Pinjaman	253.417.687.468
Utang Lainnya	1.068.305.647.535
Kewajiban Luar Negeri	0
Surat berharga selain saham	0
Pinjaman	0
Utang Lainnya	0

METADATA

INFORMASI DASAR

1. Nama Data	:	Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Preliminary Tahun 2023
2. Penyelenggara Statistik	:	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3. Alamat	:	Jalan M. Yoesoef Singedekane Nomor 45, Sungai Putri, Telanaipura, Kota Jambi 36122
4. Nomor Telepon	:	0741-6682202
5. Nomor Faksimili	:	0741-668801
6. Email	:	aklap.jambi@gmail.com

DEFINISI DATA

Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah merupakan laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi selama suatu periode berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts-SNA*), Manual Neraca Pembayaran (*The Balance of Payments Manual*), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (*The Monetary and Financial Statistics Manual*).

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) ini merupakan konsolidasi dari kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW). Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan ini adalah entitas pemerintah pusat tingkat wilayah dan seluruh pemerintah daerah.

LSKP-TW disusun terdiri dari:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintahan;
2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintahan;
3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah; dan
4. Metadata.

CAKUPAN DATA

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah meliputi:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.
2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

PERIODESASI PUBLIKASI

Preliminary Tahun 2023

WAKTU PUBLIKASI

Data *Preliminary* Tahun 2023 diterbitkan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode data.

STATUS DATA

Status angka LKPP-TW dan LSKP-TW bersifat sementara.

SUMBER DATA

1. Kertas kerja LSKPP-TW dan kertas kerja LSKPDK-TW;
2. Kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW;
3. Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Kementerian Negara/Lembaga;
4. Laporan Keuangan UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi;
5. LKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Jambi.

METODOLOGI

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah disusun dengan mengkonsolidasikan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dengan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW), LSKPP-TW, dan LSKPDK-TW disusun dengan melakukan *mapping* BAS detail kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW ke dalam GFS *Classification Assistant* yang menyediakan kerangka *mapping* masing-masing akun BAS detail ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

LSKP-TW disusun melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Penyusunan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) melalui *mapping* BAS detail data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW);
2. Penyusunan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW) melalui *mapping* BAS detail data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW); dan
3. Konsolidasian kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW menjadi LSKP-TW.

INTEGRITAS DATA

1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah berasal dari data *Preliminary* Tahun 2023 dari 453 UAKPA dari 44 Kementerian Negara/Lembaga yang berada pada lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, serta data LK UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
2. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *Preliminary* Tahun 2023, proses konsolidasi dilakukan terhadap 12 LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang merupakan LKPD tahun 2023.
3. Pemutakhiran data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.

AKSES DATA

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Jalan M. Yoesoef Singedekane Nomor 45, Sungai Putri, Telanaipura, Kota Jambi 36122. Sedangkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Nasional dapat diperoleh pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo Nomor 6 Jakarta Pusat.



REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH
dan
LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAMBI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2023**

FACE

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT
WILAYAH PROVINSI JAMBI**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

		(Dalam Rupiah)
Uraian		31 DESEMBER 2023
A. PENDAPATAN KONSOLIDASI		11.660.903.776.443
Pendapatan Perpajakan konsolidasi		9.725.272.049.851
Pendapatan Pajak Dalam Negeri		9.540.081.041.500
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional		185.191.008.351
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak		1.911.123.498.795
Pendapatan Sumber Daya Alam		
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan		138.759.036.258
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya		740.390.776.128
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		
Bantuan Keuangan - LRA		
Pendapatan Badan Layanan Umum		1.031.973.686.409
Pendapatan hibah		24.508.227.797
Pendapatan hibah dalam negeri		24.508.227.797
Pendapatan hibah luar negeri		
B. Belanja		28.725.638.425.816
Belanja pegawai		8.961.674.774.201
Belanja gaji dan tunjangan		8.414.149.289.103
Belanja honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan belanja pegawai transito		403.367.639.496
Belanja kontribusi sosial		144.157.845.602
Belanja barang dan jasa		7.965.637.215.232
Belanja barang		2.318.852.343.154
Belanja Jasa		2.061.017.147.179
Belanja Pemeliharaan		643.490.004.687
Belanja Perjalanan Dinas		1.151.207.447.861
Belanja Badan Layanan Umum (BLU)		410.550.194.294
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda		1.163.638.421.433
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS		216.881.656.624
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden		
Belanja Modal		7.196.684.386.693
Belanja Modal Tanah		73.092.884.673
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		877.616.396.334
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		1.686.212.466.413
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		4.394.645.067.986
Belanja Modal Lainnya		64.664.432.963
Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)		100.453.138.324
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang		19.021.369.427
Belanja Pembayaran Bunga Utang		19.021.369.427
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara		
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption		
Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara		
Belanja Denda		
Belanja Subsidi		21.898.781.201
Belanja Subsidi Perusahaan Negara		21.898.781.201
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Hibah		551.748.025.139
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri		
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional		138.153.332.997
Belanja Hibah Lainnya		413.594.692.142
Belanja Bantuan Sosial		41.804.399.697
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial		3.697.105.600
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial		
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial		
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial		22.888.800.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan		
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana		15.218.494.097
Belanja Lain-lain		10.306.126.851
Belanja Lain-lain		10.306.126.851
C. BELANJA TRANSFER		3.956.863.347.375
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH		1.891.611.484.706

TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	34.686.263.753
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	33.067.664.936
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.618.598.817
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	1.856.925.220.953
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	44.539.944.321
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.812.385.276.632
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
Transfer Dana Otonomi Khusus	
Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa	2.065.251.862.669
Dana Bagi Hasil	695.437.055.833
Dana Bagi Hasil Pajak	22.886.011.378
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	670.988.492.930
Dana Bagi Hasil Cukai	1.562.551.525
Dana Alokasi Umum	616.774.882.857
Dana Alokasi Umum	616.774.882.857
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana	17.701.537.500
Insentif Daerah	
Dana Otonomi Khusus	
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
Dana Insentif Daerah	17.701.537.500
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	504.901.010.016
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	504.901.010.016
Hibah ke Daerah	
Hibah ke Daerah	
Dana Desa	230.437.376.463
Dana Desa	230.437.376.463
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A-B-C)	(17.064.734.649.373)
E. Pembiayaan	1.138.666.944.971
Penerimaan Pembiayaan	1.429.468.413.307
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	1.429.468.413.307
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri	
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	
Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	
Pengeluaran Pembiayaan	290.801.468.336
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	252.801.468.336
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	
Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali	
Penyertaan Modal Negara	38.000.000.000
RDI/RPD	
Dukungan Infrastruktur	
Pengeluaran Investasi Pemerintah	
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	
Suspense Pembiayaan	
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+C)	(15.926.067.704.402)

NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

		(Dalam Rupiah)
Uraian		31 DESEMBER 2023
Aset		84.943.504.339.172
Aset lancar		5.500.637.549.100
Kas dan setara kas		2.482.968.094.418
Uang muka rekening BUN-khusus pusat		
Investasi jangka pendek		20.098.630.130
Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja		16.897.571.708
Piutang		998.396.383.025
Piutang Perpajakan		699.043.692.666
Piutang Bukan Pajak		900.190.712.349
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		3.777.349.123
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		1.264.730.970
Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman		
Piutang lain-lain		79.353.038.658
Penyisihan piutang tak tertagih		(685.233.140.742)
Persediaan		1.982.276.869.818
Piutang PFK		
Investasi jangka panjang		1.936.010.290.703
Investasi jangka panjang non permanen		15.370.008.219
Investasi jangka panjang permanen		1.920.640.282.484
Dana Bergulir Diragukan Tertagih		
Aset tetap		76.972.871.494.283
Tanah		32.679.645.311.134
Peralatan dan mesin		14.256.385.839.797
Gedung dan bangunan		17.743.281.340.609
Jalan, irigasi, dan jaringan		51.356.831.632.901
Aset tetap lainnya		1.351.932.873.068
Konstruksi dalam pengerjaan		3.427.917.086.308
Konsesi Jasa		
Akumulasi penyusutan		(43.843.126.989.534)
Aset Tetap Yang Belum Diregister		4.400.000
Properti Investasi		
Dana cadangan		
Dana cadangan		
Piutang jangka panjang		1.624.130.470
Tagihan piutang penjualan angsuran		
Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi		1.679.338.000
Piutang jangka panjang kredit pemerintah		
Piutang jangka panjang lainnya		
Penyisihan piutang jangka panjang		(55.207.530)
Aset lainnya		532.360.874.616
Kemitraan dengan pihak ketiga		
Aset tidak berwujud		207.906.222.364
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya		313.820.427.246
Dana Penjaminan		
Dana Kelolaan BLU		
Aset lain-lain		206.488.820.306
Aset Lainnya Dari Unit Pemerintah Lainnya		
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman		
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(195.854.595.300)
Kewajiban / Utang		1.321.723.335.003
Kewajiban jangka pendek		1.086.631.856.733
Utang perhitungan pihak ketiga		193.848.980
Utang kepada pihak ketiga		745.021.627.991
Utang bunga		962.846.340
Utang subsidi		
Utang Transfer		58.786.123.495
Bagian lancar utang jangka panjang		18.326.209.198
Utang surat perbendaharaan negara		
Utang Yang Belum Ditagihkan		539.374.835
Utang jangka pendek lainnya		259.021.461.658
Uang Muka		7.235.000
Utang Jangka Pendek Lainnya		3.773.129.236
Kewajiban jangka panjang		235.091.478.270
Utang jangka panjang dalam negeri		235.091.478.270

Utang jangka panjang luar negeri
Kewajiban Konsesi Jasa
Ekuitas

83.621.781.004.169

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)	
Uraian	2023
EKUITAS AWAL	44.024.483.423.608
Ekuitas Awal pemerintah Pusat	44.024.483.423.608
Ekuitas Awal Pemerintah Daerah	
Penyesuaian Ekuitas Awal	
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	44.024.483.423.608
SURPLUS / (DEFISIT) LO	2.257.200.556.979
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	
Penyesuaian Nilai Aset	
Koreksi SILPA	
Koreksi Nilai Persediaan	96.163.178.146
Selisih Revaluasi Aset	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(119.262.218.991)
Koreksi atas Reklasifikasi Aset	12.879.077.139
Koreksi Lain-lain	35.834.913.229.439
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	35.824.693.265.733
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1.515.403.757.849
KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI	
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	39.597.297.580.561
EKUITAS AKHIR	83.621.781.004.169

**LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
KEGIATAN OPERASIONAL	(2.739.129.099.094)
Pendapatan Operasional-LO	26.639.221.324.611
Pendapatan perpajakan-LO	9.636.619.209.295
Pendapatan pajak dalam negeri-LO	9.451.484.237.559
Pendapatan pajak perdagangan internasional-LO	185.134.971.736
Pendapatan bukan pajak-LO	1.278.087.834.152
Pendapatan sumber daya alam-LO	
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	138.759.036.258
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO	1.139.328.797.894
Pendapatan Transfer - LO	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
Bantuan Keuangan - LO	
Pendapatan BLU-LO	500.726.929.715
Pendapatan Jasa BLU - LO	470.523.265.773
Pendapatan Hibah BLU - LO	9.132.833.000
Pendapatan Lainnya BLU - LO	21.070.830.942
Pendapatan hibah-LO	24.508.227.797
Pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri-LO	24.508.227.797
Pendapatan lainnya-LO	15.199.279.123.652
Pendapatan lainnya Pemda	
Pendapatan Penyesuaian Akrua	4.558.685.998
Sub Total Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	15.194.720.437.654
Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	15.194.720.437.654
Beban Operasional	24.464.467.104.214
Beban pegawai	9.092.238.190.904
Beban gaji dan tunjangan	8.682.294.958.374
Beban honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan Beban pegawai transito	409.943.232.530
Beban persediaan	299.540.164.479
Beban barang dan jasa	8.195.853.132.470
Beban barang	3.175.056.848.116
Beban jasa	2.057.071.741.792
Beban pemeliharaan	627.100.396.629
Beban perjalanan dinas	1.178.528.866.637
Beban BLU/BLUD	198.449.144.772
Beban barang untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda/pihak ketiga	959.646.134.524
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil	
Presiden	
Beban bunga	19.021.369.427
Beban Pembayaran Bunga Utang	19.021.369.427
Beban Pembayaran Discount Surat Utang Negara	
Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption	
Beban Denda	
Beban subsidi	21.898.781.201
Beban subsidi kepada perusahaan publik	21.898.781.201
Beban subsidi kepada perusahaan swasta	
Beban Subsidi - Estimasi	
Beban hibah	551.748.025.139
Beban hibah kepada pemerintah negara lain	
Beban hibah kepada organisasi internasional	
Beban hibah kepada pemerintah daerah	138.153.332.997
Beban Hibah Lainnya	413.594.692.142
Beban bantuan sosial	41.619.779.197
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	3.507.413.100
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	5.072.000
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	22.888.800.000
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	15.218.494.097
Beban lain-lain/beban tidak terduga	
Beban Lain-lain	
Beban akrual lainnya	1.328.664.341.906

Beban Penyusutan Aset Tetap	1.222.396.660.060
Beban Penyusutan Aset Lainnya/Amortisasi Aset Lainnya	14.219.643.263
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	92.048.038.583
BEBAN TRANSFER	4.913.883.319.491
Transfer Pempus Ke Daerah Dan Dana Desa	3.022.271.834.785
Dana Bagi Hasil	695.437.055.833
Dana Bagi Hasil Pajak	22.886.011.378
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	670.988.492.930
Dana Bagi Hasil Cukai	1.562.551.525
Dana Alokasi Umum	616.774.882.857
Dana Alokasi Umum	616.774.882.857
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Alokasi Khusus Fisik	
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif Daerah	17.701.537.500
Dana Otonomi Khusus	
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
Dana Insentif Daerah	17.701.537.500
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	504.901.010.016
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	504.901.010.016
Hibah ke Daerah	
Hibah ke Daerah	
Dana Desa	1.187.457.348.579
Dana Desa	1.187.457.348.579
Beban Transfer Lain-lain	
Beban Suspense Transfer	
BEBAN TRANSFER PEMDA	1.891.611.484.706
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	33.067.664.936
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.618.598.817
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah dan Partai Politik	44.539.944.321
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.812.385.276.632
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	2.174.754.220.397
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS SELISIH KURS BELUM TEREALISASI	486.871.274
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PELEPASAN ASET NON LANCAR	(35.282.518.537)
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	117.241.983.845
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENJUALAN ASET NON LANCAR	
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	82.446.336.582
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	2.257.200.556.979
SURPLUS (DEFISIT) LO	2.257.200.556.979

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
1. PERHITUNGAN CATATAN SAL	
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	184.716.875.055
B. Penyesuaian Awal Saldo Anggaran Lebih	
Saldo Anggaran Lebih Awal Setelah Penyesuaian	184.716.875.055
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL	184.716.875.055
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(14.630.763.182.220)
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.1)	(14.446.046.307.165)
D. Penyesuaian SAL	
1. Penyesuaian Pembukuan	(53.687.982)
2. Penyesuaian Lain-lain	14.446.099.995.147
Total Penyesuaian SAL (A.II)	14.446.046.307.165
Rincian Penyesuaian Pembukuan:	
Koreksi SILPA	
Selisih Kurs (Unrealized)	
Koreksi Kas BUN	
Koreksi Kas KPPN	
Koreksi Kas BLU	
Koreksi Kas Hibah	
Koreksi Utang PFK	
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	(53.687.982)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	
Rincian Penyesuaian Catatan SAL/Lain-lain:	
Penyesuaian Transaksi RPL	
Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow	
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL	
Pembulatan	14.446.099.995.147
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I+A.II)	
2. PERHITUNGAN FISIK SAL	
SALDO AKHIR KAS BUN	
SALDO AKHIR KAS KPPN	
SALDO AKHIR KAS BLU	166.792.966.738
SALDO AKHIR KAS DI KL DARI HIBAH	247.696.616.837
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	68.019.000
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	
Saldo di Rek Escrow yang Memiliki Unsur SAL	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam bentuk Invoice	
Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	
Selisih Kiriman Uang	
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	
Pembiayaan diterima RKUN yang Ditangguhkan	
Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment)	
Penyetoran Dana Hibah Langsung Yang Disahkan	
Pengembalian Escrow PNPB	
Transito BLU	
Dana Optimalisasi Kas	
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	
Saldo Anggaran Lebih Akhir	

FACE

**LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT
WILAYAH**

LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
REVENUE	35.800.032.107.652
Taxes	9.723.883.062.848
Social contributions	
Grants	3.000.000.000
Other revenue	26.073.149.044.804
EXPENSE	21.528.954.039.123
Compensation of employees	9.085.963.343.989
Use of goods and services	7.179.644.854.314
Consumption of fixed capital	
Interests	19.021.369.427
Subsidies	21.898.781.201
Grants	4.136.335.835.864
Social benefits	41.804.399.697
Other expense	1.044.285.454.631
Gross operating balance (1-2+23+NOBz)	14.271.078.068.529
Net operating balance (1-2+NOBz)	14.271.078.068.529
NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES	14.271.078.068.529
Net/gross investment in nonfinancial assets	7.185.250.297.346
Fixed Assets	7.112.157.412.673
Weapon systems	617.451.853
Inventories	
Nonproduced assets	73.092.884.673
Net lending / borrowing (1-2+NOBz-31)	7.085.827.771.183
TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING):	
Net acquisition of financial assets [321+322+323]	7.038.224.556.972
Domestic debtors	7.038.224.556.972
External debtors	
Net incurrence of liabilities [331+332]	(47.603.214.211)
Domestic creditors	(47.603.214.211)
External creditors	
Vertical check: Difference between net lending/borrowing and financing (1-2-31=32-33-NLBz=0)	

NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2023
NET WORTH	84.307.069.352.441
Nonfinancial assets	79.173.688.811.471
Fixed assets	44.489.309.966.454
Buildings and structures	39.740.080.149.246
Dwellings	3.205.665.484.085
Buildings other than dwellings	14.247.335.546.922
Other structures	22.287.079.118.240
Land improvements	
Machinery and equipment	3.210.158.156.197
Transport equipment	3.210.158.156.197
Machinery and equipment other than transport equipment	
Information, computer, and telecommunications (ICT) equipment	
Machinery and equipment not elsewhere classified	
Other fixed assets	1.539.071.661.011
Cultivated biological resources	
Animal resources yielding repeat products	
Tree, crop, and plant resources yielding repeat products	
Intellectual property products	1.539.071.661.011
Research and development	63.873.242.036
Mineral exploration and evaluation	
Computer software and databases	197.739.732.352
Entertainment, literary, and artistic originals	(130.680.378.516)
Other intellectual property products	1.408.139.065.139
Inventories	1.982.276.869.818
Strategic stocks	671.273.950
Other inventories	1.981.605.595.868
Materials and supplies	798.108.945.737
Work in progress	
Finished goods	
Goods for resale	1.183.496.650.131
Military inventories	
Valuables	
Nonproduced assets	32.702.101.975.199
Land	32.679.645.311.134
Mineral and energy resources	
Other naturally occurring assets	
Noncultivated biological resources	
Water resources	
Other natural resources	
Radio spectrum	
Natural resources not elsewhere classified	
Intangible nonproduced assets	22.456.664.065
Contracts, leases, and licenses	22.456.664.065
Marketable operating leases	
Permits to use natural resources	
Permits to undertake specific activities	
Entitlement to future goods and services on an exclusive basis	22.456.664.065
Goodwill and marketing assets	
Financial assets [621+622]	6.455.103.875.972
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits [6212+6222]	2.796.788.521.664
Debt securities [6213+6223]	35.468.638.349
Loans [6216+6226]	
Equity and investment fund shares [6215+6225]	1.920.640.282.484
Equity [62151+62251]	1.920.640.282.484
Investment fund shares [62152+62252]	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]	
Nonlife insurance technical reserves [62161 + 62261]	
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]	
Pension entitlements [62163 + 62263]	
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]	
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]	
Financial derivatives [62171 + 62271]	

Employee stock options [62172 + 62272]	
Other accounts receivable [6218+6228]	1.702.206.433.475
Trade credit and advances [62181 + 62281]	393.915.117
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]	1.701.812.518.358
Domestic debtors	6.455.103.875.972
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits	2.796.788.521.664
Debt securities	35.468.638.349
Loans	
Equity and investment fund shares	1.920.640.282.484
Equity	1.920.640.282.484
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	1.702.206.433.475
Trade credit and advances	393.915.117
Miscellaneous other accounts receivable	1.701.812.518.358
External creditors	
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	
Trade credit and advances	
Miscellaneous other accounts receivable	
Liabilities [631+632]	1.321.723.335.003
Special Drawing Rights (SDRs) [6321]	
Currency and deposits [6212+6222]	
Debt securities [6213+6223]	
Loans [6216+6226]	253.417.687.468
Equity and investment fund shares [6215+6225]	
Equity [62151+62251]	
Investment fund shares [62152+62252]	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]	
Nonlife insurance technical reserves [62161 + 62261]	
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]	
Pension entitlements [62163 + 62263]	
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]	
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]	
Financial derivatives [62171 + 62271]	
Employee stock options [62172 + 62272]	
Other accounts payable [6218+6228]	1.068.305.647.535
Trade credit and advances [62181 + 62281]	49.217.993.035
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]	1.019.087.654.500
Domestic creditors	1.321.723.335.003
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	253.417.687.468
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	

Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	1.068.305.647.535
Trade credit and advances	49.217.993.035
Miscellaneous other accounts receivable	1.019.087.654.500
External creditors	
Special Drawing Rights (SDRs)	
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	
Trade credit and advances	
Miscellaneous other accounts receivable	

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES	
Cash receipts from operating activities	38.391.467.812.932
Taxes	21.272.549.738.033
Social Contribution	
Grants	3.000.000.000
Other Receipts	17.115.918.074.899
Cash payments for operating activities	10.645.312.423.471
Compensation of Employees	9.085.963.343.989
Purchase of Goods and Service	
Interest	19.021.369.427
Subsidies	21.898.781.201
Grants	432.339.074.526
Social Benefits	41.804.399.697
Other Payments	1.044.285.454.631
NET CASH INFLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	27.746.155.389.461
CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN NON FINANCIAL ASSETS	
Purchases of nonfinancial assets	8.008.285.778.609
Fixed Assets	7.935.192.893.936
Strategic Stocks	
Valuables	
Nonproduced Assets	73.092.884.673
Sales of nonfinancial assets	11.434.089.347
Fixed Assets	11.434.089.347
Strategic Stocks	
Valuables	
Nonproduced Assets	
NET CASH OUTFLOW FROM INVESTMENTS IN NONFINANCIAL ASSETS	7.996.851.689.262
CASH SURPLUS/DEFISIT	35.743.007.078.723
CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING)	
NET ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS OTHER THAN CASH	79.569.600.725
Domestic debtors	79.569.600.725
External creditors	
NET INCURRENCE OF LIABILITIES	(47.603.214.211)
Domestic creditors	(47.603.214.211)
External creditors	
NET CASH INFLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	(127.172.814.936)
NET CHANGE IN THE STOCK OF CASH	31.966.386.514
Vertical check: Difference between cash surplus/deficit and total net cash inflow from financial activities	35.711.040.692.209
.....Central government	
.....Budgetary central government	

LEMBAR PEMERIKSAAN DAN REVIU BERJENJANG

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Tanggal Cetak : 25 Februari 2024
Tanggal LKPP : 25 Februari 2024
Tanggal LKPD : 25 Februari 2024

LAPORAN REALISASI

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
 Ditandatangani secara elektronik Raudya Tuzzahra NIP 199807062021012001	 Ditandatangani secara elektronik Tri Djoko Yulianto NIP 197307111999031001	 Ditandatangani secara elektronik Leonard Rizal Tamba NIP 198301102004121002

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
 Ditandatangani secara elektronik Raudya Tuzzahra NIP 199807062021012001	 Ditandatangani secara elektronik Tri Djoko Yulianto NIP 197307111999031001	 Ditandatangani secara elektronik Leonard Rizal Tamba NIP 198301102004121002

NERACA

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
 Ditandatangani secara elektronik Raudya Tuzzahra NIP 199807062021012001	 Ditandatangani secara elektronik Tri Djoko Yulianto NIP 197307111999031001	 Ditandatangani secara elektronik Leonard Rizal Tamba NIP 198301102004121002



LAPORAN ARUS KAS

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
 Ditandatangani secara elektronik Raudya Tuzzahra NIP 199807062021012001	 Ditandatangani secara elektronik Tri Djoko Yulianto NIP 197307111999031001	 Ditandatangani secara elektronik Leonard Rizal Tamba NIP 198301102004121002

LAPORAN OPERASIONAL

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
 Ditandatangani secara elektronik Raudya Tuzzahra NIP 199807062021012001	 Ditandatangani secara elektronik Tri Djoko Yulianto NIP 197307111999031001	 Ditandatangani secara elektronik Leonard Rizal Tamba NIP 198301102004121002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
 Ditandatangani secara elektronik Raudya Tuzzahra NIP 199807062021012001	 Ditandatangani secara elektronik Tri Djoko Yulianto NIP 197307111999031001	 Ditandatangani secara elektronik Leonard Rizal Tamba NIP 198301102004121002



LAMPIRAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
A. Pendapatan Negara dan Hibah	
I. Pendapatan Perpajakan	7.412.605.609.765
1. Pajak Dalam Negeri	7.227.414.601.414
2. Pajak Perdagangan Internasional	185.191.008.351
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	979.279.117.703
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
3. Pendapatan Badan Layanan Umum	493.032.971.319
4. Pendapatan PNBP Lainnya	486.246.146.384
III. Pendapatan Hibah	
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	8.391.884.727.468
B. Belanja Negara	
I. Belanja Pemerintah Pusat	8.955.841.982.902
1. Belanja Pegawai	2.621.680.581.102
2. Belanja Barang	3.170.872.299.236
3. Belanja Modal	3.136.703.196.964
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	
5. Belanja Subsidi	
6. Belanja Hibah	
7. Bantuan Sosial	26.585.905.600
8. Belanja Lain-lain	
II. Transfer ke Daerah	15.194.720.437.654
1. Dana Transfer Umum	10.848.306.494.322
a. Dana Bagi Hasil	3.175.976.912.925
b. Dana Alokasi Umum	7.672.329.581.397
2. Dana Transfer Khusus	3.035.366.132.253
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	1.087.394.427.695
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.947.971.704.558
c. Hibah Kepada Daerah	
3. Dana Otonomi Khusus	
4. Dana Keistimewaan DIY	
5. Insentif Fiskal	123.590.462.500
6. Dana Desa	1.187.457.348.579
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	24.150.562.420.556
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(15.758.677.693.088)
D. Pembiayaan	
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Netto)	
1. Rekening Pemerintah	
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	
4. Surat Berharga Negara (Neto)	
a. Penerimaan Surat Berharga Negara	
b. Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara	
5. Pinjaman dalam negeri (Neto)	
a. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	
b. Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	
6. PMN/ Dana Investasi Pemerintah	
7. Kewajiban Penjaminan	
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	
9. Pembiayaan Lain-lain	
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	
a. Penarikan Pinjaman Program	
b. Penarikan Pinjaman Proyek	
2. Penerusan Pinjaman	
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)	
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran - SILPA (SIKPA) (D-C)	(15.758.677.693.088)

NERACA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2023
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas:	
Rekening Kas BUN di BI	
Rekening Pemerintah Lainnya	
Rekening Kas di KPPN	
Kas dalam Transito	
Kas di Bendahara Pengeluaran	75.254.000
Kas di Bendahara Penerimaan	5.411.681
Kas Lainnya dan Setara Kas	259.745.443.596
Kas pada Badan Layanan Umum	331.457.664.645
Jumlah Kas dan Setara Kas	591.283.773.922
Uang Muka Dari Rekening BUN	
Investasi Jangka Pendek	
Investasi dalam Deposito	
Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara	
Investasi Jangka Pendek BLU	20.098.630.130
Bagian Lancar Investasi Non Permanen	
Investasi Jangka Pendek Lainnya	
Jumlah Investasi Jangka Pendek	20.098.630.130
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	5.229.131.354
Uang Muka Belanja (prepayment)	15.189.790
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	310.094.077
Piutang:	
Piutang Perpajakan	699.043.692.666
Piutang Bukan Pajak	208.371.472.958
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	1.264.730.970
Piutang Penerusan Pinjaman	
Bagihan Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	
Piutang dari KUN (Uang Muka yang Akan Diterima)	
Piutang dari Kegiatan BLU	14.799.985.945
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	
Piutang PFK	
Jumlah Piutang (Bruto)	923.479.882.539
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(434.553.561.912)
Jumlah Piutang (Bersih)	488.926.320.627
Persediaan	1.391.080.680.729
Persediaan yang Belum Diregister	240.000
Jumlah Aset Lancar	2.496.944.060.629
Investasi Jangka Panjang	
Investasi Non Permanen	
Dana Restrukturisasi Perbankan	
Dana Bergulir	
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)	
Investasi dalam Obligasi	
Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan	
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	
Investasi Non Permanen Rekening Investasi BUN	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)	
Jumlah Investasi Non Permanen	
Investasi Permanen	
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	
Investasi Permanen Badan Layanan Umum	
Investasi Permanen Lainnya	
Jumlah Investasi Permanen	
Jumlah Investasi Jangka Panjang	
Aset Tetap	
Tanah	28.879.782.746.335
Peralatan dan Mesin	5.160.444.106.367
Gedung dan Bangunan	3.737.225.268.165
Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.091.972.872.417
Aset Tetap Lainnya	133.037.787.568

Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.973.731.669.782
Tanah Belum Diregister	
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	4.400.000
Aset Konsesi Jasa	
Jumlah Aset Tetap (Bruto)	54.976.198.850.634
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(11.188.325.708.619)
Jumlah Aset Tetap	43.787.873.142.015
Properti Investasi	
Properti Investasi	
Jumlah Properti Investasi (Bruto)	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	
Jumlah Properti Investasi (Bersih)	
Piutang Jangka Panjang	
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	1.679.338.000
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	
Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah	
Piutang Jangka Panjang Subsidi	
Piutang Jangka Panjang Lainnya	
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)	1.679.338.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	(55.207.530)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)	1.624.130.470
Aset Lainnya	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
Aset Tidak Berwujud	207.906.222.364
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	313.820.427.246
Dana Penjaminan	
Dana Kelolaan BLU	
Dana Jangka Panjang	
Aset Lain-lain	204.534.812.136
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	
Aset Lainnya yang Belum Diregister	
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)	726.261.461.746
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(130.680.378.516)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(65.174.216.784)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)	530.406.866.446
JUMLAH ASET	46.816.848.199.560
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	
Utang kepada Pihak Ketiga	241.292.694.444
Utang Bunga	
Utang Subsidi	
Belanja subsidi yang masih harus dibayar	
Utang Transfer	58.786.123.495
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	64.881.972.499
Pendapatan Diterima Dimuka	5.935.793.475
Pendapatan Yang Ditangguhkan	
Utang Kepada KUN	
Utang Kepada RPL	
Utang Jangka Pendek Lainnya	540.786.935
Hibah Yg Belum Disahkan	
Uang Muka Rekening Khusus	
Uang Muka	
Uang Muka Dari KPPN	7.235.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	371.444.605.848
Kewajiban Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	
Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN	

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	
Utang Jangka Panjang Subsidi	
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri	
Kewajiban Konsesi Jasa	
Kewajiban Konsesi Jasa	
Jumlah Kewajiban Konsesi Jasa	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	
JUMLAH KEWAJIBAN	371.444.605.848
EKUITAS	46.445.403.593.712
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	46.816.848.199.560

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
PROVINSI JAMBI**
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
EKUITAS AWAL	44.024.483.423.608
Penyesuaian Ekuitas Awal	
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	44.024.483.423.608
SURPLUS / (DEFISIT) LO	809.597.537.500
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	
Penyesuaian Nilai Aset	
Koreksi SILPA	
Koreksi Nilai Persediaan	96.163.178.146
Selisih Revaluasi Aset	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(119.262.218.991)
Koreksi Atas Reklasifikasi	12.879.077.139
Koreksi Lain-lain	106.138.838.461
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI	95.918.874.755
EKUITAS	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1.515.403.757.849
KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI	
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	2.420.920.170.104
EKUITAS AKHIR	46.445.403.593.712

LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	2.885.532.919.430
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	3.756.809.767.545
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	422.020.306.444
Pendapatan Cukai	1.077.122.000
Pendapatan Pajak Lainnya	73.379.094.154
Pendapatan Bea Masuk	22.390.776.736
Pendapatan Bea Keluar	162.744.195.000
Pendapatan Pajak Lain-lain	(1.412.100)
Jumlah Pendapatan Perpajakan	7.323.952.769.209
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Penerimaan Sumber Daya Alam	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	350.802.139.058
Pendapatan Badan Layanan Umum	500.726.929.715
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	851.529.068.773
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	
Jumlah Pendapatan Hibah	
PENDAPATAN PENYESUAIAN	
Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	15.194.720.437.654
Jumlah Pendapatan Penyesuaian	15.194.720.437.654
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	23.370.202.275.636
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	2.752.243.997.805
Beban Persediaan	299.536.312.479
Beban Barang dan Jasa	1.528.694.863.338
Beban Pemeliharaan	324.312.536.205
Beban Perjalanan Dinas	375.430.630.313
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	813.046.669.918
Beban Bunga	
Beban Subsidi	
Beban Hibah	
Beban Bantuan Sosial	26.401.285.100
Beban Transfer	15.194.720.437.654
Beban Lain-lain	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.236.616.303.323
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	92.048.038.583
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	22.643.051.074.718
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	727.151.200.918
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	2.229.794.108
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	37.512.312.645
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(35.282.518.537)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	141.836.911.969
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	24.108.056.850
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	117.728.855.119
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	82.446.336.582
POS LUAR BIASA	
Pendapatan Luar Biasa	
Beban Luar Biasa	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	
SURPLUS/(DEFISIT) LO	809.597.537.500

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
I. Arus Kas Masuk	
1. Penerimaan Perpajakan	
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	3.107.352.677.534
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	3.878.634.353.555
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	168.399.274.109
e. Pendapatan Cukai	1.077.122.000
f. Pendapatan Pajak Lainnya	71.951.174.216
g. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	185.191.008.351
Total Penerimaan Perpajakan	7.412.605.609.765
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
c. Pendapatan PNBPN Lainnya	484.010.574.499
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	493.032.971.319
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak	977.043.545.818
3. Penerimaan Hibah	
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)	8.389.649.155.583
II. Arus Kas Keluar	
1. Belanja Pegawai	2.621.680.581.102
2. Belanja Barang	3.170.872.299.236
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	
4. Belanja Subsidi	
5. Belanja hibah	
6. Belanja Bantuan Sosial	26.585.905.600
7. Belanja Lain-lain	
8. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	954.591.395.000
9. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.219.822.966.400
10. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	1.562.551.525
11. Dana Alokasi Umum	7.672.329.581.397
12. Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik)	1.087.394.427.695
13. Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	123.590.462.500
14. Transfer Lainnya	1.947.971.704.558
15. Dana Desa	1.187.457.348.579
16. Hibah Kepada Daerah	
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)	21.013.859.223.592
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)	(12.624.210.068.009)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
I. Arus Kas Masuk	
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	2.235.571.885
2. Penerimaan Kembali Investasi	
3. Penjualan Aset Program Restrukturisasi	
4. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	
5. Penerimaan Investasi Pemerintah	
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)	2.235.571.885
II. Arus Kas Keluar	
1. Belanja Modal	3.136.703.196.964
2. Pengeluaran Program Restrukturisasi	
3. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	
4. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	
5. Penyertaan Modal Negara	
6. Pengeluaran Dukungan Infrastruktur	
7. Pengeluaran Investasi Pemerintah	
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)	3.136.703.196.964
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)	(3.134.467.625.079)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
I. Arus Kas Masuk	
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	
3. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	
4. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri	
5. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	
6. Penerimaan Pembiayaan Lain	
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)	

II. Arus Kas Keluar	
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	
3. Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali	
4. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement	
5. Pengeluaran Pembiayaan Lain	
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)	
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Netto)	
2. Transito (Netto)	313.555.170.490
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	(53.687.982)
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (D)	313.501.482.508
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN	(15.445.176.210.580)
Penggunaan SAL	
Penyesuaian Pembukuan	(15.194.720.437.654)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	(30.639.896.648.234)
SALDO AWAL KAS	184.763.328.037
SALDO AKHIR KAS	(30.455.133.320.197)
Kas Lainnya & Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan	
Kas BLU yg Belum Disahkan/Lainnya	
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	
Kas Transito (Kiriman Uang)	
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	(30.455.133.320.197)

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL	
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(15.758.677.693.088)
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.1)	(15.758.677.693.088)
D. Penyesuaian SAL	
1. Penyesuaian Pembukuan	
2. Penyesuaian Lain-lain	
Total Penyesuaian SAL (A.II)	
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I+A.II)	(15.758.677.693.088)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
PENDAPATAN - LRA	16.398.487.623.960
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	3.244.510.821.178
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	2.312.666.440.086
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	93.631.497.469
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	138.759.036.258
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	699.453.847.365
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	13.129.468.574.985
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	12.066.559.677.869
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	1.062.908.897.116
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	
Bantuan Keuangan - LRA	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	24.508.227.797
Pendapatan Hibah - LRA	24.508.227.797
Dana Darurat - LRA	
Pendapatan Lainnya - LRA	
BELANJA	17.704.544.580.245
BELANJA OPERASI	11.742.645.778.959
Belanja Pegawai	6.339.994.193.099
Belanja Barang dan Jasa	4.794.764.915.996
Belanja Bunga	19.021.369.427
Belanja Subsidi	21.898.781.201
Belanja Hibah	551.748.025.139
Belanja Bantuan Sosial	15.218.494.097
BELANJA MODAL	4.059.981.189.729
Belanja Modal Tanah	39.870.612.876
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	789.085.136.466
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.270.967.272.724
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.910.229.959.262
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	47.874.200.231
Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	
Belanja Modal Aset Lainnya	1.954.008.170
Belanja Modal BLUD	
BELANJA TAK TERDUGA	10.306.126.851
Belanja Tak Terduga	10.306.126.851
TRANSFER	1.891.611.484.706
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	34.686.263.753
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	33.067.664.936
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.618.598.817
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	1.856.925.220.953
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	44.539.944.321
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.812.385.276.632
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT LRA	(1.306.056.956.285)
PEMBIAYAAN	1.138.666.944.971
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.429.468.413.307
Penggunaan SiLPA	1.265.839.759.907
Pencairan Dana Cadangan	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Pinjaman Dalam Negeri	163.628.653.400
Penerimaan Kembali Piutang	
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	
Pinjaman Luar Negeri	
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	290.801.468.336
Pembentukan Dana Cadangan	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	38.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	211.231.867.611
Pemberian Pinjaman Daerah	41.569.600.725
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	

Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	(167.390.011.314)
--	-------------------

NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2023
ASET	38.126.656.139.612
ASET LANCAR	3.003.693.488.471
Kas dan Setara Kas	1.891.684.320.496
Investasi Jangka Pendek	
Piutang Pendapatan	691.819.239.391
Piutang Lainnya	68.330.401.836
Penyisihan Piutang	(250.679.578.830)
Beban Dibayar Dimuka	11.343.156.487
Persediaan	591.195.949.089
Aset Untuk Dikonsolidasikan	
INVESTASI JANGKA PANJANG	1.936.010.290.703
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	15.370.008.219
Investasi Jangka Panjang Permanen	1.920.640.282.484
ASET TETAP	33.184.998.352.268
Tanah	3.799.862.564.799
Peralatan dan Mesin	9.095.941.733.430
Gedung dan Bangunan	14.006.056.072.444
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	37.264.858.760.484
Aset Tetap Lainnya	1.218.895.085.500
Konstruksi Dalam Pengerjaan	454.185.416.526
Akumulasi Penyusutan	(32.654.801.280.915)
DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	
ASET LAINNYA	1.954.008.170
Tagihan Jangka Panjang	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
Aset Tidak Berwujud	
Aset Lain-lain	1.954.008.170
KEWAJIBAN	950.278.729.155
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	715.187.250.885
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	193.848.980
Utang Bunga	962.846.340
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	18.326.209.198
Pendapatan Diterima Dimuka	5.789.502.213
Utang Belanja	503.728.933.547
Utang Jangka Pendek Lainnya	186.185.910.606
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	235.091.478.270
Utang Dalam Negeri	81.814.326.700
Utang Jangka Panjang Lainnya	153.277.151.570
EKUITAS	37.176.377.410.457

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
EKUITAS AWAL	
Surplus/Defisit-LO	1.447.603.019.479
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	35.728.774.390.978
Koreksi Nilai Persediaan (BAS level 4)	
Koreksi Nilai Persediaan	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	
Koreksi Lainnya	35.728.774.390.978
JUMLAH EKUITAS AKHIR	37.176.377.410.457

**LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
PENDAPATAN - LO	15.441.467.651.844
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	3.244.510.821.178
Pendapatan Pajak Daerah - LO	2.312.666.440.086
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	93.631.497.469
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	138.759.036.258
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	699.453.847.365
PENDAPATAN TRANSFER - LO	12.172.448.602.869
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	12.066.559.677.869
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	105.888.925.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
Bantuan Keuangan - LO	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	24.508.227.797
Pendapatan Hibah - LO	24.508.227.797
Dana Darurat - LO	
Pendapatan Lainnya - LO	
BEBAN	13.993.864.632.365
BEBAN OPERASI - LO	12.102.253.147.659
Beban Pegawai - LO	6.339.994.193.099
Beban Barang dan Jasa	5.154.372.284.696
Beban Bunga	19.021.369.427
Beban Subsidi	21.898.781.201
Beban Hibah	551.748.025.139
Beban Bantuan Sosial	15.218.494.097
Beban Penyusutan dan Amortisasi	
Beban Penyisihan Piutang	
Beban Lain-lain	
BEBAN TRANSFER	1.891.611.484.706
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	33.067.664.936
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.618.598.817
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	44.539.944.321
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1.812.385.276.632
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	1.447.603.019.479
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
DEFISIT NON OPERASIONAL	
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	1.447.603.019.479
POS LUAR BIASA	
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	
Pendapatan Luar Biasa - LO	
BEBAN LUAR BIASA	
Beban Luar Biasa	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	
SURPLUS/DEFISIT-LO	1.447.603.019.479

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Arus Masuk Kas	
Penerimaan Pajak Daerah	(2.312.666.440.086)
Penerimaan Retribusi Daerah	(93.631.497.469)
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(138.759.036.258)
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	(699.453.847.365)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	(931.705.383.622)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	(1.548.834.473.470)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	(7.055.554.698.540)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	(2.530.465.122.237)
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	
Penerimaan Dana Penyesuaian	
Penerimaan Hibah	(24.508.227.797)
Penerimaan Dana Darurat	
Penerimaan Lainnya	
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	
Jumlah Arus Masuk Kas	(15.335.578.726.844)
Arus Keluar Kas	
Pembayaran Pegawai	6.339.994.193.099
Pembayaran Barang	4.794.764.915.996
Pembayaran Bunga	19.021.369.427
Pembayaran Subsidi	21.898.781.201
Pembayaran Beban Hibah	551.748.025.139
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	15.218.494.097
Pembayaran Tak Terduga	10.306.126.851
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	33.067.664.936
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	1.618.598.817
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	1.618.598.817
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	
Jumlah Arus Keluar Kas	11.789.256.768.380
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(27.124.835.495.224)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Arus Masuk Kas	
Pencairan Dana Cadangan	
Penjualan atas Tanah	
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Penjualan Aset Tetap Lainnya	
Penjualan Aset Lainnya	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	
Jumlah Arus Masuk Kas	

Arus Keluar Kas	
Pembentukan Dana Cadangan	
Perolehan Tanah	
Perolehan Peralatan dan Mesin	735.977.652.171
Perolehan Gedung dan Bangunan	1.267.578.645.551
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.907.894.397.172
Perolehan Aset Tetap Lainnya	31.486.187.995
Perolehan Aset Lainnya	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	38.000.000.000
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	
Jumlah Arus Keluar Kas	3.980.936.882.889
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(3.980.936.882.889)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Masuk Kas	
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	(163.628.653.400)
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Jumlah Arus Masuk Kas	(163.628.653.400)
Arus Keluar Kas	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	81.814.326.700
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	129.417.540.911
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Jumlah Arus Keluar Kas	211.231.867.611
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(374.860.521.011)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	
Arus Masuk Kas	
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Masuk Kas	
Arus Keluar Kas	
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Keluar Kas	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	
Kenaikan/Penurunan Kas	(31.480.632.899.124)
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	
Saldo Akhir Kas	(31.480.632.899.124)

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI JAMBI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2023
Saldo Anggaran Lebih Awal	
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
Sub Total	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	
Sub Total	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (BAS level 4)	
Lain-lain	
Saldo Anggaran Lebih Akhir	

LAMPIRAN I
NERACA SALDO BUKU BESAR
AKRUAL

NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
1110100- Kas di Kas Daerah	0	1715121369254,26839	1715121369254,26839
1110200- Kas di Bendahara Penerimaan	0	26896927,0503378169	26896927,0503378169
1110300- Kas di Bendahara Pengeluaran	0	290760096,35972626597	290760096,35972626597
1110400- Kas di BLUD	0	127284184658,39505029	127284184658,39505029
1110500- Kas Lainnya	0	48961109559,92593707	48961109559,92593707
111611- Kas di Bendahara Pengeluaran	2.086.000	62.420.000	64.506.000
111613- Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	12.384.000	(1.636.000)	10.748.000
111711- Kas di Bendahara Penerimaan	5.790.552	(378.871)	5.411.681
111821- Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	252.534.203	(135.884.258)	116.649.945
111822- Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	0	247.696.616.837	247.696.616.837
111825- Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	179.027.335	1.636.601.162	1.815.628.497
111826- Kas Lainnya di BLU	4.051.422.446	6.065.125.871	10.116.548.317
111911- Kas dan Bank - BLU	369.526.656.074	(38.068.991.429)	331.457.664.645
1130100- Piutang Pajak Daerah	0	295150226040,86	295150226040,86
1130200- Piutang Retribusi	0	30161158609,76	30161158609,76
1130300- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	37.555.672.600	37.555.672.600
1130400- Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0	106164695489,96	106164695489,96
1130500- Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0	98.196.313.056	98.196.313.056
1130600- Piutang Transfer Pemerintah Lainnya	0	24.041.384.545	24.041.384.545
1130700- Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0	98.237.528.513	98.237.528.513
1130800- Piutang Pendapatan Lainnya	0	2312260536,72	2312260536,72
113311- Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	0	20.098.630.130	20.098.630.130
1140300- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0	68.631.250	68.631.250
1140400- Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0	3708717873,24	3708717873,24
114112- Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	5.216.691.162	12.440.192	5.229.131.354
114115- Belanja Modal Dibayar di Muka (prepaid)	28.229.790.858	(28.229.790.858)	0
114211- uang muka belanja pegawai (prepayment)	17.811.780	(2.621.990)	15.189.790
114311- Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	2.351.611.953	(2.041.517.876)	310.094.077
114ZZZZ- Piutang Lainnya (BAS Level 4)	0	64553052712,99	64553052712,99
1150100- Penyisihan Piutang Pendapatan	0	-248673020080,27	-248673020080,27
1150200- Penyisihan Piutang Lainnya	0	-2006558749,35	-2006558749,35
115121- Piutang PPh Pasal 21	14.293.712.042	(4.023.215.923)	10.270.496.119
115122- Piutang PPh Pasal 22	1.685.382.080	113.426.260	1.798.808.340
115124- Piutang PPh Pasal 23	41.837.254.433	(12.852.453.164)	28.984.801.269
115125- Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	17.122.654.781	(668.896.669)	16.453.758.112
115126- Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	164.626.332.190	3.309.421.796	167.935.753.986
115127- Piutang PPh Pasal 26	151.359.388	228.844.637	380.204.025
115128- Piutang PPh Final	17.091.472.358	297.105.040	17.388.577.398
115131- Piutang PPN Dalam Negeri	237.637.826.643	17.846.210.942	255.484.037.585
115153- Piutang PBB Perkebunan	24.683.597.392	20.608.044.153	45.291.641.545
115154- Piutang PBB Perhutanan	15.050.395.423	22.751.780.836	37.802.176.259
115155- Piutang PBB Pertambangan	38.264.547.753	43.516.601.647	81.781.149.400
115159- Piutang PBB Lainnya	1.346.764.339	(911.964.735)	434.799.604
115165- Piutang Bea Materai	60.742.000	(34.558.000)	26.184.000
115172- Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	9.972.000	0	9.972.000
115173- Piutang Bunga/Denda Penagihan PPh	12.816.972.023	979.235.034	13.796.207.057
115174- Piutang Bunga/Denda Penagihan PPN	21.579.921.400	(374.795.433)	21.205.125.967
115211- Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	129.801.807.525	(4.725.953.824)	125.075.853.701
115212- Piutang Lainnya	37.856.995	5.963.884	43.820.879
115231- Piutang Transfer Dana Perimbangan	311.348.447	82.940.449.931	83.251.798.378
115239- Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa Lainnya	1.404.592.222	(1.404.592.222)	0
115421- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	32.122.174	1.232.608.796	1.264.730.970
115711- Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	10.469.754.847	(4.186.562.627)	6.283.192.220
115741- Piutang dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	793.324.000	7.621.992.200	8.415.316.200
115811- Piutang Sewa Tanah - BLU	82.500.000	(40.000.000)	42.500.000
115891- Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	149.487.611	(90.510.086)	58.977.525
1160300- Beban Jasa Dibayar Dimuka	0	6634401340,38	6634401340,38
116112- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang	(120.263.856.814)	(10.688.126.552)	(130.951.983.366)

Pajak PPh Non Migas			
116113- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPN	(139.838.254.535)	(4.183.210.015)	(144.021.464.550)
116115- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PBB dan BPHTB	(44.420.303.750)	(11.669.314.493)	(56.089.618.243)
116117- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Lainnya	(7.988.358.879)	(8.433.444.050)	(16.421.802.929)
116211- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	(75.088.444.219)	(10.570.959.889)	(85.659.404.108)
116212- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	(189.285)	(28.081.032)	(28.270.317)
116421- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	(28.659.574)	(1.236.071.396)	(1.264.730.970)
116611- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	(52.348.774)	20.932.813	(31.415.961)
116641- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	(3.966.620)	(38.109.961)	(42.076.581)
116711- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Tanah BLU	(41.250.000)	(1.250.000)	(42.500.000)
116791- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	(747.438)	452.551	(294.887)
116ZZZZ- Beban Dibayar Dimuka (BAS Level 4)	0	4708755147,05	4708755147,05
117111- Barang Konsumsi	91.237.990.087	32.363.451.471	123.601.441.558
117112- Amunisi	44.285.657.136	5.132.977.062	49.418.634.198
117113- Bahan untuk Pemeliharaan	563.505.874	(118.602.050)	444.903.824
117114- Suku Cadang	2.188.575.839	1.872.805.389	4.061.381.228
117122- Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	59.990.375.000	(14.855.187.322)	45.135.187.678
117123- Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	5.647.936.940	(2.480.267.620)	3.167.669.320
117124- Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	18.185.294.971	(4.285.698.319)	13.899.596.652
117125- Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.056.945.433.461	(258.283.870.972)	798.661.562.489
117126- Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	135.442.680.092	(134.220.348.356)	1.222.331.736
117127- Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	10.215.454	95.973.480	106.188.934
117128- Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	967.136.772	493.391.230	1.460.528.002
117129- Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat – Dalam Proses	71.856.409.760	240.467.993.074	312.324.402.834
117131- Bahan Baku	19.873.020.785	9.506.225.055	29.379.245.840
117141- Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	965.915.700	193.357.500	1.159.273.200
117151- Persediaan BTD, BDN, dan BMMN	0	7.150.000	7.150.000
117191- Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	838.574.020	(167.300.070)	671.273.950
117199- Persediaan Lainnya	7.736.803.211	(1.376.893.925)	6.359.909.286
117911- Persediaan yang belum diregister	0	240.000	240.000
117ZZZZ- Persediaan (BAS Level 4)	0	591195949089,43	591195949089,43
1210600- Investasi Non Permanen Lainnya	0	15370008218,5	15370008218,5
1220100- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	1920640282484,38	1920640282484,38
131111- Tanah	28.833.055.810.490	46.726.935.845	28.879.782.746.335
131ZZZZ- Tanah (BAS Level 4)	0	3799862564798,92	3799862564798,92
132111- Peralatan dan Mesin	4.662.226.834.942	498.217.271.425	5.160.444.106.367
132ZZZZ- Peralatan dan Mesin (BAS Level 4)	0	9095941733429,57	9095941733429,57
133111- Gedung dan Bangunan	3.519.940.340.224	217.284.927.941	3.737.225.268.165
133ZZZZ- Gedung dan Bangunan (BAS Level 4)	0	14006056072444,12	14006056072444,12
134111- Jalan dan Jembatan	8.657.526.382.181	622.560.474.429	9.280.086.856.610
134112- Irigasi	4.494.046.746.217	132.740.958.244	4.626.787.704.461
134113- Jaringan	218.702.402.447	(33.604.091.101)	185.098.311.346
134ZZZZ- Jalan, Irigasi, dan Jaringan (BAS Level 4)	0	37264858760484,31	37264858760484,31
135111- Aset Tetap Renovasi	41.700.427.426	(305.967.180)	41.394.460.246
135121- Aset Tetap Lainnya	94.345.689.800	(2.702.362.478)	91.643.327.322
135ZZZZ- Aset Tetap Lainnya (BAS Level 4)	0	1218895085499,97	1218895085499,97
1360100- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	454185416526,1	454185416526,1
136111- Konstruksi Dalam pengerjaan	1.008.778.012.873	1.964.953.656.909	2.973.731.669.782
1370100- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	-7109893517715,814	-7109893517715,814
1370200- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	-2937990714208,019	-2937990714208,019
1370300- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	0	-22358270151368,573	-22358270151368,573
1370400- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	-248646897622,607	-248646897622,607

137111- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.530.304.664.568)	(406.029.501.316)	(3.936.334.165.884)
137211- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(429.977.023.590)	(101.582.760.490)	(531.559.784.080)
137311- Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(5.030.682.833.105)	(605.116.288.839)	(5.635.799.121.944)
137312- Akumulasi Penyusutan Irigasi	(807.983.364.980)	(186.271.647.899)	(994.255.012.879)
137313- Akumulasi Penyusutan Jaringan	(81.835.656.104)	407.427.634	(81.428.228.470)
137411- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(8.525.468.969)	(423.926.393)	(8.949.395.362)
139111- Aset Tetap yang Belum Diregister	0	4.400.000	4.400.000
152111- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	1.797.292.970	(117.954.970)	1.679.338.000
1540100- Aset Lain-lain	0	1.954.008.170	1.954.008.170
156311- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(1.317.930.820)	1.262.723.290	(55.207.530)
162141- Paten	800.000	0	800.000
162151- Software	47.096.226.758	8.673.984.601	55.770.211.359
162161- Lisensi	1.907.252.065	20.548.612.000	22.455.864.065
162171- Hasil Kajian/Penelitian	64.698.497.770	(825.255.734)	63.873.242.036
162191- Aset Tak Berwujud Lainnya	110.677.457.892	(44.891.002.988)	65.786.454.904
162311- Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	19.650.000	19.650.000
163119- Dana lainnya	639.791.238	(435.318.482)	204.472.756
163139- Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	0	313.615.954.490	313.615.954.490
166112- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	142.209.045.849	6.131.599.000	148.340.644.849
166113- Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	5.724.884.137	50.469.283.150	56.194.167.287
169122- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(122.761.947.148)	(7.918.431.368)	(130.680.378.516)
169314- Akumulasi Amortisasi Paten	(480.000)	(80.000)	(560.000)
169315- Akumulasi Amortisasi Software	(28.445.501.709)	(9.867.536.791)	(38.313.038.500)
169316- Akumulasi Amortisasi Lisensi	(884.471.829)	(1.205.953.847)	(2.090.425.676)
169317- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	(21.777.068.749)	(2.446.387.821)	(24.223.456.570)
169318- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(500.673.960)	(46.062.078)	(546.736.038)
211ZZZZ- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (BAS Level 4)	0	-193848979,64	-193848979,64
212111- Belanja pegawai yang masih harus dibayar	(5.857.109.144)	(6.286.109.723)	(12.143.218.867)
212112- Belanja barang yang masih harus dibayar	(4.275.622.683)	1.969.285.870	(2.306.336.813)
212113- Belanja modal yang masih harus dibayar	0	(32.298.801.168)	(32.298.801.168)
212121- Utang kepada Pihak Ketiga BLU	(3.715.045.953)	1.245.409.766	(2.469.636.187)
212191- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	(202.011.982)	(181.136.262.420)	(181.338.274.402)
212192- Dana Pihak Ketiga	(179.027.335)	(1.636.601.162)	(1.815.628.497)
212193- Dana Pihak Ketiga BLU	(3.278.286.502)	(5.642.512.008)	(8.920.798.510)
212ZZZZ- Utang Bunga (BAS Level 4)	0	(962.846.340)	(962.846.340)
213ZZZZ- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (BAS Level 4)	0	(18.326.209.198)	(18.326.209.198)
2140100- Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	0	-118939563,33	-118939563,33
2140400- Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	0	-1615411800,83	-1615411800,83
214ZZZZ- Pendapatan Diterima Dimuka (BAS Level 4)	0	-4055150849,05	-4055150849,05
2150100- Utang Belanja Pegawai	0	-10111611363,6	-10111611363,6
2150200- Utang Belanja Barang dan Jasa	0	-46017483740,05	-46017483740,05
2150300- Utang Belanja Modal	0	(98.592.946.168)	(98.592.946.168)
2150600- Utang Belanja Lain-lain	0	-291672448889,2	-291672448889,2
215111- Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar	0	(58.786.123.495)	(58.786.123.495)
215ZZZZ- Utang Belanja (BAS Level 4)	0	-57334443386,48	-57334443386,48
2160500- Utang Jangka Pendek Lainnya	0	(2.037.365.772)	(2.037.365.772)
216ZZZZ- Utang Jangka Pendek Lainnya (BAS Level 4)	0	-184148544834,47	-184148544834,47
218111- Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	(539.374.835)	(539.374.835)
219111- Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	(446.555.265)	459.474	(446.095.791)
219112- Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	(58.824.742.318)	(5.536.227.749)	(64.360.970.067)
219116- Utang Kelebihan Bayar Bea Masuk	(18.870.026)	(56.036.615)	(74.906.641)
219211- Pendapatan Sewa Diterima di Muka	(448.622.457)	133.756.807	(314.865.650)
219212- Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	(28.335.252.793)	23.301.707.272	(5.033.545.521)
219214- Pendapatan Diterima di Muka BLU	(200.244.225)	(387.138.079)	(587.382.304)
219511- Uang Muka dari KPPN	(7.235.000)	0	(7.235.000)
219961- Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	(1.412.100)	0	(1.412.100)
2210100- Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan	0	(81.814.326.700)	(81.814.326.700)
2220100- Utang Jangka Panjang Lainnya	0	(153.277.151.570)	(153.277.151.570)
3110100- Ekuitas	0	-37136466324776,99	-37136466324776,99
311111- SAL	8.897.108.929.960	0	8.897.108.929.960
313111- Ditagihkan ke Entitas Lain	(9.044.057.593.038)	(23.705.136.279.635)	(32.749.193.872.673)

313121- Diterima dari Entitas Lain	142.140.204.030	7.795.560.824.912	7.937.701.028.942
313211- Transfer Keluar	0	406.768.188.041	406.768.188.041
313221- Transfer Masuk	0	(905.749.922.929)	(905.749.922.929)
391111- Ekuitas	(43.838.050.607.884)	15.194.720.437.654	(28.643.330.170.230)
391113- Koreksi Nilai Persediaan	0	(96.163.178.146)	(96.163.178.146)
391116- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	119.634.354.678	119.634.354.678
391118- Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	(372.135.687)	(372.135.687)
391119- Koreksi Lainnya	3.146.206.361	(106.574.156.943)	(103.427.950.582)
391121- Ekuitas Transaksi Lainnya	0	435.318.482	435.318.482
391131- Pengesahan Hibah Langsung	0	(295.424.503.860)	(295.424.503.860)
391133- Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(6.142.502.032)	(6.142.502.032)
391151- Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	(12.879.077.139)	(12.879.077.139)
3920300- Koreksi terhadap Ekuitas Lainnya	0	-35728774390977,9548	-35728774390977,9548
399911- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrual dari Kas BP KL	(7.235.000)	0	(7.235.000)
399912- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrual dari Kas BLU KL	(184.763.328.037)	0	(184.763.328.037)
411111- Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	(200.000)	(200.000)
411112- Pendapatan PPh Gas Bumi	0	(1.219.751)	(1.219.751)
411119- Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	(5.992.892)	(5.992.892)
411121- Pendapatan PPh Pasal 21	0	(885.857.288.847)	(885.857.288.847)
411122- Pendapatan PPh Pasal 22	0	(197.781.704.695)	(197.781.704.695)
411123- Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	0	(6.726.846.916)	(6.726.846.916)
411124- Pendapatan PPh Pasal 23	0	(352.177.343.348)	(352.177.343.348)
411125- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	0	(44.751.854.196)	(44.751.854.196)
411126- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	0	(917.929.985.761)	(917.929.985.761)
411127- Pendapatan PPh Pasal 26	0	(11.395.740.625)	(11.395.740.625)
411128- Pendapatan PPh Final	0	(466.008.097.738)	(466.008.097.738)
411129- Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	0	(493.369.748)	(493.369.748)
411141- Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	0	(1.586.728.255)	(1.586.728.255)
411148- Pendapatan PPh Final Ditanggung Pemerintah	0	(816.546.658)	(816.546.658)
411211- Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	(3.718.849.936.378)	(3.718.849.936.378)
411212- Pendapatan PPN Impor	0	(25.708.280.085)	(25.708.280.085)
411219- Pendapatan PPN Lainnya	0	(4.101.458.820)	(4.101.458.820)
411221- Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	0	(6.788.255.372)	(6.788.255.372)
411222- Pendapatan PPnBM Impor	0	(1.069.800)	(1.069.800)
411229- Pendapatan PPnBM Lainnya	0	(1.146.436)	(1.146.436)
411241- Pendapatan PPN Ditanggung Pemerintah	0	(1.359.620.654)	(1.359.620.654)
411313- Pendapatan PBB Perkebunan	0	(108.798.648.376)	(108.798.648.376)
411314- Pendapatan PBB Perhutanan	0	(55.159.655.783)	(55.159.655.783)
411315- Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	0	(43.374.040.055)	(43.374.040.055)
411316- Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	0	(214.471.703.274)	(214.471.703.274)
411317- Pendapatan PBB Pertambangan Panas Bumi	0	(1.212.907.756)	(1.212.907.756)
411319- Pendapatan PBB Lainnya	0	996.648.800	996.648.800
411511- Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	0	(13.782.000)	(13.782.000)
411514- Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	(1.063.340.000)	(1.063.340.000)
411611- Pendapatan Bea Meterai	0	(2.741.555.000)	(2.741.555.000)
411612- Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	0	(67.571.399.098)	(67.571.399.098)
411613- Pendapatan PPn Batubara	0	(192.627.528)	(192.627.528)
411619- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	(22.047.587)	(22.047.587)
411621- Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	(2.709.630.955)	(2.709.630.955)
411622- Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	(141.833.986)	(141.833.986)
412111- Pendapatan Bea Masuk	0	(20.488.579.000)	(20.488.579.000)
412113- Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	(774.887.000)	(774.887.000)
412114- Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	0	(1.127.226.736)	(1.127.226.736)
412123- Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	(84.000)	(84.000)
412211- Pendapatan Bea Keluar	0	(162.744.195.000)	(162.744.195.000)
419999- Pendapatan Pajak lain-lain	0	1.412.100	1.412.100
424111- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	(147.715.870.270)	(147.715.870.270)
424112- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	(319.789.714.216)	(319.789.714.216)
424119- Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	(3.017.681.287)	(3.017.681.287)
424222- Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
424231- Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Barang / Jasa	0	(8.049.833.000)	(8.049.833.000)
424242- Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam	0	(83.000.000)	(83.000.000)

Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa			
424311- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	(40.000.000)	(40.000.000)
424312- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	(5.363.047.839)	(5.363.047.839)
424422- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	(10.586.607.200)	(10.586.607.200)
424911- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	(3.943.118.960)	(3.943.118.960)
424915- Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(779.706.888)	(779.706.888)
424919- Pendapatan Lain-lain BLU	0	(103.677.228)	(103.677.228)
424921- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	(158.377.000)	(158.377.000)
424922- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	(365.955.847)	(365.955.847)
424923- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	(506.016.868)	(506.016.868)
424924- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	(4.030.000)	(4.030.000)
425112- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	(2.591.236.600)	(2.591.236.600)
425119- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	(14.589.400)	(14.589.400)
425122- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	(1.466.391.871)	(1.466.391.871)
425129- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	(763.402.237)	(763.402.237)
425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(3.018.251.486)	(3.018.251.486)
425132- Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	(5.180.000)	(5.180.000)
425133- Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	(33.317.589)	(33.317.589)
425139- Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	(725.420)	(725.420)
425151- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	(654.963.180)	(654.963.180)
425211- Pendapatan Paspor	0	(19.309.700.000)	(19.309.700.000)
425213- Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	(1.062.950.000)	(1.062.950.000)
425214- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	(916.300.000)	(916.300.000)
425219- Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	(76.761.539)	(76.761.539)
425231- Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	(3.150.000)	(3.150.000)
425232- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	(15.780.000)	(15.780.000)
425233- Pendapatan Ongkos Perkara	0	(290.212.000)	(290.212.000)
425236- Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	0	(7.366.161.599)	(7.366.161.599)
425237- Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	0	(3.508.952.000)	(3.508.952.000)
425238- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	0	(11.190.618.011)	(11.190.618.011)
425239- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	(615.732.962)	(615.732.962)
425241- Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(888.331.000)	(888.331.000)
425243- Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(17.469.941.606)	(17.469.941.606)
425246- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	0	(650.000.000)	(650.000.000)
425249- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(318.111.000)	(318.111.000)
425252- Pendapatan Perizinan Pertanian	0	(750.000)	(750.000)
425255- Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(100.000)	(100.000)
425259- Pendapatan Perizinan Lainnya	0	(673.477.842)	(673.477.842)
425261- Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(5.791.755.000)	(5.791.755.000)
425262- Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(5.366.450.000)	(5.366.450.000)
425263- Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	0	(32.095.100.000)	(32.095.100.000)
425264- Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)	0	(1.095.620.000)	(1.095.620.000)
425265- Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	0	(35.525.700.000)	(35.525.700.000)
425266- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	0	(17.494.100.000)	(17.494.100.000)
425267- Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	0	(412.050.000)	(412.050.000)
425268- Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	0	(1.204.050.000)	(1.204.050.000)
425269- Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	0	(2.935.000.000)	(2.935.000.000)

425273- Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	0	(3.216.880.000)	(3.216.880.000)
425274- Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	0	(3.484.750.000)	(3.484.750.000)
425275- Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	0	(267.915.000)	(267.915.000)
425276- Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu	0	(6.250.022.870)	(6.250.022.870)
425289- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	(113.157.605)	(113.157.605)
425311- Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	0	(2.574.554.560)	(2.574.554.560)
425313- Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	(19.575.000)	(19.575.000)
425314- Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	0	(1.224.020.000)	(1.224.020.000)
425315- Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	0	(88.075.000)	(88.075.000)
425321- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	0	(765.905.000)	(765.905.000)
425331- Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	0	(3.055.240.822)	(3.055.240.822)
425332- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	(20.000)	(20.000)
425341- Pendapatan Pelayanan Pertanahan	0	(51.188.681.052)	(51.188.681.052)
425351- Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	0	(10.090.200.000)	(10.090.200.000)
425359- Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	0	(818.025.000)	(818.025.000)
425411- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	(542.975.000)	(542.975.000)
425412- Pendapatan Biaya Pendidikan	0	(17.854.563.579)	(17.854.563.579)
425419- Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	(250.500.000)	(250.500.000)
425429- Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	(1.652.000)	(1.652.000)
425432- Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	(9.231.373.000)	(9.231.373.000)
425433- Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	0	(34.850.000)	(34.850.000)
425434- Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0	(360.000)	(360.000)
425435- Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	0	(422.063)	(422.063)
425511- Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	0	(58.000.000)	(58.000.000)
425513- Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	0	(29.829.124.881)	(29.829.124.881)
425514- Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	0	(8.051.146.240)	(8.051.146.240)
425515- Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	0	(3.623.163.654)	(3.623.163.654)
425516- Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	(441.346.881)	(441.346.881)
425518- Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	0	(2.061.305.430)	(2.061.305.430)
425519- Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	(788.124.834)	(788.124.834)
425531- Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	0	(132.425.000)	(132.425.000)
425533- Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI	0	(155.835.686)	(155.835.686)
425611- Pendapatan Wisata Alam	0	(297.485.000)	(297.485.000)
425612- Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(97.376.840)	(97.376.840)
425691- Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	(13.188.950)	(13.188.950)
425699- Pendapatan Jasa Lainnya	0	(820.697.568)	(820.697.568)
425764- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	(52.083.154)	(52.083.154)
425781- Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	0	(24.150.000)	(24.150.000)
425782- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	(5.437.199.133)	(5.437.199.133)
425784- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	(2.098.547.412)	(2.098.547.412)
425785- Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	(8.704.504)	(8.704.504)
425791- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	(1.509.586.250)	(1.509.586.250)
425811- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	(8.533.845.404)	(8.533.845.404)
425839- Pendapatan Denda Lainnya	0	(11.702.857)	(11.702.857)
425911- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(794.674.355)	(794.674.355)
425912- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(2.184.802.079)	(2.184.802.079)
425913- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(5.585.809.341)	(5.585.809.341)
425917- Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(27.000.000)	(27.000.000)
425919- Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan	0	(103.510.745.277)	(103.510.745.277)

Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu			
425931- Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	(7.321.800)	(7.321.800)
425991- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	(608.400)	(608.400)
425999- Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	(38.555.447)	(38.555.447)
491111- Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	0	(486.871.274)	(486.871.274)
491421- Pendapatan Sitaan/Rampasan	0	(4.558.685.998)	(4.558.685.998)
491429- Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	(10.300.770.486)	(10.300.770.486)
491511- Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	(16.649.624.219)	(16.649.624.219)
499991- Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	0	(15.194.720.437.654)	(15.194.720.437.654)
511111- Belanja Gaji Pokok PNS	0	602.885.545.197	602.885.545.197
511119- Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	9.142.514	9.142.514
511121- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	43.084.685.400	43.084.685.400
511122- Belanja Tunj. Anak PNS	0	13.048.519.682	13.048.519.682
511123- Belanja Tunj. Struktural PNS	0	7.948.014.850	7.948.014.850
511124- Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	113.374.160.288	113.374.160.288
511125- Belanja Tunj. PPh PNS	0	8.406.799.546	8.406.799.546
511126- Belanja Tunj. Beras PNS	0	34.135.682.630	34.135.682.630
511129- Belanja Uang Makan PNS	0	107.788.419.049	107.788.419.049
511134- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	83.801.300	83.801.300
511139- Belanja Tunjangan SAR PNS	0	654.200.000	654.200.000
511151- Belanja Tunjangan Umum PNS	0	7.003.329.502	7.003.329.502
511152- Belanja Tunjangan Profesi Guru	0	232.072.543.259	232.072.543.259
511153- Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	54.438.527.575	54.438.527.575
511154- Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	0	7.763.707.000	7.763.707.000
511158- Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	2.801.595.000	2.801.595.000
511161- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	0	26.327.824.770	26.327.824.770
511169- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	0	426.240	426.240
511171- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	0	1.472.256.242	1.472.256.242
511172- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	0	461.842.794	461.842.794
511173- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	0	1.576.255.000	1.576.255.000
511174- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri	0	182.825.000	182.825.000
511175- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	0	44.673.382	44.673.382
511176- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	0	1.396.040.340	1.396.040.340
511179- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	0	4.839.293.000	4.839.293.000
511191- Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI	0	240.510.000	240.510.000
511193- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	0	673.695.000	673.695.000
511211- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	0	449.439.418.750	449.439.418.750
511219- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	0	7.388.220	7.388.220
511221- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	0	32.184.843.279	32.184.843.279
511222- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	0	10.306.057.797	10.306.057.797
511223- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	0	21.703.475.000	21.703.475.000
511225- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	0	3.675.488.999	3.675.488.999
511226- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	0	39.944.040.588	39.944.040.588
511228- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	0	244.569.999.000	244.569.999.000
511232- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI	0	310.650.000	310.650.000
511233- Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	0	1.526.050.000	1.526.050.000
511234- Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI	0	554.025.000	554.025.000
511235- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI	0	163.400.000	163.400.000
511236- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	0	643.068.000	643.068.000
511238- Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI	0	1.793.720.000	1.793.720.000
511239- Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI	0	2.712.999.375	2.712.999.375
511241- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI	0	16.800.000	16.800.000
511244- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	0	8.908.848.300	8.908.848.300
511332- Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	16.577.549.200	16.577.549.200
511511- Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	823.147.004	823.147.004
511512- Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	47.129.912.970	47.129.912.970
511513- Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS	0	1.564	1.564
511519- Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0	125.034.000	125.034.000
511521- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	0	15.812.077.255	15.812.077.255
511522- Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	0	12.041.670.000	12.041.670.000
511611- Belanja Gaji Pokok PPPK	0	23.049.481.664	23.049.481.664
511619- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	306.256	306.256
511621- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	1.581.965.460	1.581.965.460
511622- Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	456.688.722	456.688.722
511624- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	2.797.755.000	2.797.755.000
511625- Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	1.525.428.990	1.525.428.990
511628- Belanja Uang Makan PPPK	0	4.913.741.800	4.913.741.800
512211- Belanja Uang Lembur	0	13.625.301.000	13.625.301.000

512212- Belanja Uang Lembur PPPK	0	3.991.000	3.991.000
512411- Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	383.890.995.458	383.890.995.458
512414- Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	12.422.945.072	12.422.945.072
521111- Belanja Keperluan Perkantoran	0	195.494.602.029	195.494.602.029
521112- Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	65.025.001.268	65.025.001.268
521113- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	3.587.191.266	3.587.191.266
521114- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1.923.536.847	1.923.536.847
521115- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	48.816.835.828	48.816.835.828
521119- Belanja Barang Operasional Lainnya	0	231.014.004.358	231.014.004.358
521131- Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	754.038.725	754.038.725
521211- Belanja Bahan	0	128.521.080.473	128.521.080.473
521213- Belanja Honor Output Kegiatan	0	301.628.798.226	301.628.798.226
521219- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	138.704.955.196	138.704.955.196
521231- Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	309.110.000	309.110.000
521233- Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	0	4.844.950.000	4.844.950.000
521241- Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	103.774.049	103.774.049
521252- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	556.613.659	556.613.659
521253- Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	31.000.000	31.000.000
521254- Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	0	19.000.000	19.000.000
521811- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	3.646.375	3.646.375
522111- Belanja Langganan Listrik	0	40.628.567.377	40.628.567.377
522112- Belanja Langganan Telepon	0	2.365.004.051	2.365.004.051
522113- Belanja Langganan Air	0	3.569.519.082	3.569.519.082
522119- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	5.393.647.974	5.393.647.974
522121- Belanja Jasa Pos dan Giro	0	42.094.990	42.094.990
522131- Belanja Jasa Konsultan	0	33.419.529.189	33.419.529.189
522141- Belanja Sewa	0	51.598.825.689	51.598.825.689
522151- Belanja Jasa Profesi	0	20.784.784.122	20.784.784.122
522161- Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	84.942.000	84.942.000
522191- Belanja Jasa Lainnya	0	49.431.563.259	49.431.563.259
522192- Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	46.078.000	46.078.000
523111- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	60.118.498.066	60.118.498.066
523119- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	2.347.911.973	2.347.911.973
523121- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	82.841.902.183	82.841.902.183
523129- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	1.358.824.962	1.358.824.962
523131- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	88.657.099.235	88.657.099.235
523132- Belanja Pemeliharaan Irigasi	0	37.225.547.600	37.225.547.600
523133- Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	23.464.607.597	23.464.607.597
523199- Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	2.547.905.461	2.547.905.461
524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	197.194.348.395	197.194.348.395
524112- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0	308.777.592	308.777.592
524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	32.762.642.978	32.762.642.978
524114- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	79.898.026.079	79.898.026.079
524119- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	37.677.990.508	37.677.990.508
524211- Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	302.504.131	302.504.131
525111- Belanja Gaji dan Tunjangan	0	124.291.418.522	124.291.418.522
525112- Belanja Barang	0	85.292.934.599	85.292.934.599
525113- Belanja Jasa	0	80.728.579.972	80.728.579.972
525114- Belanja Pemeliharaan	0	10.834.922.555	10.834.922.555
525115- Belanja Perjalanan	0	27.286.340.630	27.286.340.630
525119- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	31.929.539.525	31.929.539.525
525162- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	498.090.676	498.090.676
526122- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	500.000.000	500.000.000
526123- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	1.310.000.000	1.310.000.000
526124- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	11.505.000.000	11.505.000.000
526312- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0	104.178.248.000	104.178.248.000

571111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	0	1.928.900.600	1.928.900.600
571112- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang	0	1.578.512.500	1.578.512.500
573112- Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	0	5.072.000	5.072.000
574111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	22.888.800.000	22.888.800.000
591111- Belanja Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	412.006.103.464	412.006.103.464
591211- Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	100.726.297.004	100.726.297.004
591311- Belanja Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	516.635.082.946	516.635.082.946
591312- Belanja Penyusutan Irigasi	0	185.620.996.659	185.620.996.659
591313- Belanja Penyusutan Jaringan	0	6.848.739.674	6.848.739.674
591411- Belanja Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	559.440.313	559.440.313
592114- Belanja Amortisasi Paten	0	80.000	80.000
592115- Belanja Amortisasi Software	0	9.516.184.356	9.516.184.356
592116- Belanja Amortisasi Lisensi	0	1.205.953.847	1.205.953.847
592117- Belanja Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0	2.446.387.821	2.446.387.821
592118- Belanja Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	26.062.078	26.062.078
592222- Belanja Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	1.024.975.161	1.024.975.161
593111- Belanja Persediaan konsumsi	0	170.047.058.586	170.047.058.586
593112- Belanja Persediaan amunisi	0	1.373.299.701	1.373.299.701
593113- Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	3.224.679.826	3.224.679.826
593114- Belanja Persediaan suku cadang	0	11.659.823.847	11.659.823.847
593121- Belanja Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	3.852.000	3.852.000
593122- Belanja Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	29.066.934.695	29.066.934.695
593123- Belanja Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	9.385.318.660	9.385.318.660
593124- Belanja Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	10.892.032.810	10.892.032.810
593125- Belanja persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	433.279.444.337	433.279.444.337
593126- Belanja Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	137.156.755.224	137.156.755.224
593128- Belanja Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	75.769.084.192	75.769.084.192
593131- Belanja Persediaan bahan baku	0	103.863.710.503	103.863.710.503
593141- Belanja Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	255.545.070	255.545.070
593149- Belanja persediaan lainnya	0	23.996.698.619	23.996.698.619
593311- Belanja Penyesuaian Nilai Persediaan	0	23.753.199.455	23.753.199.455
594112- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPh Non Migas	0	18.828.251.735	18.828.251.735
594113- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPN	0	13.237.254.947	13.237.254.947
594115- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PBB dan BPHTB	0	23.407.496.246	23.407.496.246
594117- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Lainnya	0	9.548.498.431	9.548.498.431
594211- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	0	26.951.480.706	26.951.480.706
594212- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	(435.504)	(435.504)
594411- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	(17.400)	(17.400)
594611- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	0	31.415.961	31.415.961
594651- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	0	42.076.581	42.076.581
594931- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	2.016.880	2.016.880
595112- Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	1.533.308.234	1.533.308.234
595113- Belanja Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	30.812.900	30.812.900
595122- Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin – BLU	0	9.716.300	9.716.300

596111- Kerugian Pelepasan Aset	0	37.512.312.645	37.512.312.645
596121- Belanja Persediaan Rusak/Usang	0	242.330.465	242.330.465
596211- Belanja Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	112.526.930	112.526.930
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	186.383.238.000	186.383.238.000
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	17.736.556.000	17.736.556.000
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	114.456.721.000	114.456.721.000
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	632.159.725.000	632.159.725.000
611213- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	0	591.473.000	591.473.000
611214- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	0	3.263.682.000	3.263.682.000
612111- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	0	505.927.443.000	505.927.443.000
612112- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%	0	2.372.965.000	2.372.965.000
612211- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	0	881.604.915.000	881.604.915.000
612212- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%	0	11.623.363.000	11.623.363.000
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap	0	9.477.810.000	9.477.810.000
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	553.336.107.000	553.336.107.000
612412- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - luran Tetap	0	111.847.000	111.847.000
612413- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - luran Produksi (Royalti)	0	1.286.816.000	1.286.816.000
612511- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	0	111.818.000	111.818.000
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	47.829.902.400	47.829.902.400
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	5.578.797.000	5.578.797.000
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	15.416.564.000	15.416.564.000
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	185.144.619.000	185.144.619.000
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	1.562.551.525	1.562.551.525
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	5.548.034.633.000	5.548.034.633.000
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	446.780.424.000	446.780.424.000
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	32.999.997.914	32.999.997.914
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	811.723.099.455	811.723.099.455
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	477.473.143.028	477.473.143.028
621125- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	0	355.318.284.000	355.318.284.000
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	1.087.394.427.695	1.087.394.427.695
643111- Insentif Fiskal	0	123.590.462.500	123.590.462.500
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	780.038.558.529	780.038.558.529
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	6.772.546.788	6.772.546.788
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	16.170.798.950	16.170.798.950
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	715.265.526.647	715.265.526.647
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	262.054.625.100	262.054.625.100
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	49.183.213.000	49.183.213.000
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	4.897.771.000	4.897.771.000
654821- Dana Pelayanan Kepariwisata	0	3.257.265.000	3.257.265.000
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	66.952.931.544	66.952.931.544
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	20.127.418.000	20.127.418.000
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	5.800.000.000	5.800.000.000
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	1.914.400.000	1.914.400.000
655311- Dana Fasilitasi Penanaman Modal	0	5.966.400.000	5.966.400.000
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	6.570.250.000	6.570.250.000
655511- Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	0	3.000.000.000	3.000.000.000
662111- Belanja Dana Desa	0	1.187.457.348.579	1.187.457.348.579
8110100- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	0	(547.173.774.460)	(547.173.774.460)
8110200- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) -	0	(426.911.982.345)	(426.911.982.345)

LO			
8110300- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	0	(467.001.827.374)	(467.001.827.374)
8110400- Pajak Air Permukaan - LO	0	(1.258.325.995)	(1.258.325.995)
8110500- Pajak Rokok - LO	0	(229.162.017.074)	(229.162.017.074)
8110600- Pajak Hotel - LO	0	(28.092.422.716)	(28.092.422.716)
8110700- Pajak Restoran - LO	0	(97.307.022.164)	(97.307.022.164)
8110800- Pajak Hiburan - LO	0	(18.338.036.409)	(18.338.036.409)
8110900- Pajak Reklame - LO	0	(16.343.664.323)	(16.343.664.323)
8111000- Pajak Penerangan Jalan - LO	0	(231.493.217.859)	(231.493.217.859)
8111100- Pajak Parkir - LO	0	(7.407.470.429)	(7.407.470.429)
8111200- Pajak Air Tanah - LO	0	(1.250.960.497)	(1.250.960.497)
8111300- Pajak Sarang Burung Walet - LO	0	(276.521.267)	(276.521.267)
8111400- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	0	(14.726.535.184)	(14.726.535.184)
8111500- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	0	(61.891.418.962)	(61.891.418.962)
8111600- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	0	(164.031.243.028)	(164.031.243.028)
8120100- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	0	(41.776.353.800)	(41.776.353.800)
8120700- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	0	(36.196.982.073)	(36.196.982.073)
8122600- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	0	(15.658.161.596)	(15.658.161.596)
8130100- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	0	(209.497.429)	(209.497.429)
8130200- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN - LO	0	(138.549.538.829)	(138.549.538.829)
8140100- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	0	(5.426.372.327)	(5.426.372.327)
8140200- Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	0	(3.772.145.135)	(3.772.145.135)
8140300- Penerimaan Jasa Giro - LO	0	(29.545.831.732)	(29.545.831.732)
8140400- Pendapatan Bunga - LO	0	(31.605.785.903)	(31.605.785.903)
8140500- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	0	(29.176.410.389)	(29.176.410.389)
8140600- Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO	0	(1.172.490.506)	(1.172.490.506)
8140700- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	0	(1.135.167.118)	(1.135.167.118)
8140800- Pendapatan Denda Pajak - LO	0	(8.507.907.456)	(8.507.907.456)
8140900- Pendapatan Denda Retribusi - LO	0	(245.731.092)	(245.731.092)
8141100- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	0	(16.822.970.279)	(16.822.970.279)
8141300- Pendapatan dari Pengembalian -LO	0	(33.102.320.338)	(33.102.320.338)
8142000- Pendapatan BLUD - LO	0	(538.940.715.090)	(538.940.715.090)
8210100- Bagi Hasil Pajak - LO	0	-931705383621,9187	-931705383621,9187
8210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0	-1548834473469,541	-1548834473469,541
8210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0	-7055554698540,121	-7055554698540,121
8210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0	-2530465122237,4214	-2530465122237,4214
8220400- Dana Insentif Daerah (DID)	0	(105.888.925.000)	(105.888.925.000)
8310100- Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	0	(3.000.000.000)	(3.000.000.000)
8310300- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	0	(2.343.671.321)	(2.343.671.321)
8310400- Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	0	(19.164.556.476)	(19.164.556.476)
9110100- Beban Gaji dan Tunjangan - LO	0	3.790.145.092.717	3.790.145.092.717
9110200- Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	0	2.318.702.461.963	2.318.702.461.963
9110300- Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	0	231.146.638.419	231.146.638.419
9120100- Beban Bahan Pakai Habis	0	1.120.355.346.262	1.120.355.346.262
9120200- Beban Persediaan Bahan/ Material	0	359607368699,7	359607368699,7
9120300- Beban Jasa Kantor	0	1.849.707.186.059	1.849.707.186.059
9121500- Beban Perjalanan Dinas	0	803.098.236.324	803.098.236.324
9121800- Beban Pemeliharaan	0	302.787.860.424	302.787.860.424
9122000- Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	146.603.316.606	146.603.316.606
9123100- Beban Barang dan Jasa BLUD	0	355.331.313.697	355.331.313.697
9123200- Beban Barang dan Jasa dana BOS	0	216.881.656.624	216.881.656.624
9130100- Bunga Utang Pinjaman	0	19.021.369.427	19.021.369.427
9140100- Beban Subsidi	0	21.898.781.201	21.898.781.201
9150100- Beban Hibah kepada Pemerintah	0	137.832.632.997	137.832.632.997
9150200- Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	0	320.700.000	320.700.000
9150400- Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0	15.965.067.957	15.965.067.957
9150500- Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0	356.310.468.693	356.310.468.693
9150600- Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan	0	41.319.155.492	41.319.155.492

Pendidikan Dasar***			
9160100- Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0	7.474.499.097	7.474.499.097
9160200- Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0	7.743.995.000	7.743.995.000
9210100- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	33.067.664.936	33.067.664.936
9220100- Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	1.618.598.817	1.618.598.817
9230200- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	0	44.539.944.321	44.539.944.321
9240100- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	1.812.385.276.632	1.812.385.276.632
9910100- Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Daerah	0	1447603019479,3	1447603019479,3
Jumlah	0	-35688863305297,9704 5855713	-35688863305297,970458 55713

LAMPIRAN II

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
111611- Kas di Bendahara Pengeluaran	1.043.000	62.420.000	63.463.000
111613- Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	6.192.000	(1.636.000)	4.556.000
111822- Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	0	247.696.616.837	247.696.616.837
111911- Kas dan Bank - BLU	184.763.328.037	(17.970.361.299)	166.792.966.738
212191- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	(53.687.982)	53.687.982	0
311911- Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung	55.635.393.458	0	55.635.393.458
313111- Ditagihkan ke Entitas Lain	(32.020.939.170.087)	(24.812.070.050.299)	(56.833.009.220.386)
313121- Diterima dari Entitas Lain	21.993.345.939.425	9.137.167.584.181	31.130.513.523.606
391111- Ekuitas	9.787.912.171.096	15.194.720.437.654	24.982.632.608.750
399911- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akruai dari Kas BP KL	(7.235.000)	(60.784.000)	(68.019.000)
399915- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari Akun Aset/Kewajiban	53.687.982	(53.687.982)	0
399918- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari Koreksi Kas KPPN	(717.661.929)	0	(717.661.929)
4110100- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	0	(547.173.774.460)	(547.173.774.460)
4110200- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	0	(426.911.982.345)	(426.911.982.345)
4110300- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	0	(467.001.827.374)	(467.001.827.374)
4110400- Pajak Air Permukaan - LRA	0	(1.258.325.995)	(1.258.325.995)
4110500- Pajak Rokok - LRA	0	(229.162.017.074)	(229.162.017.074)
4110600- Pajak Hotel - LRA	0	(28.092.422.716)	(28.092.422.716)
4110700- Pajak Restoran - LRA	0	(97.307.022.164)	(97.307.022.164)
4110800- Pajak Hiburan - LRA	0	(18.338.036.409)	(18.338.036.409)
4110900- Pajak Reklame - LRA	0	(16.343.664.323)	(16.343.664.323)
4111000- Pajak Penerangan Jalan - LRA	0	(231.493.217.859)	(231.493.217.859)
4111100- Pajak Parkir - LRA	0	(7.407.470.429)	(7.407.470.429)
411111- Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	(200.000)	(200.000)
411112- Pendapatan PPh Gas Bumi	0	(1.219.751)	(1.219.751)
411119- Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	(5.992.892)	(5.992.892)
4111200- Pajak Air Tanah - LRA	0	(1.250.960.497)	(1.250.960.497)
411121- Pendapatan PPh Pasal 21	0	(903.046.493.114)	(903.046.493.114)
411122- Pendapatan PPh Pasal 22	0	(182.740.128.657)	(182.740.128.657)
411123- Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	0	(46.709.341)	(46.709.341)
411124- Pendapatan PPh Pasal 23	0	(376.385.008.933)	(376.385.008.933)
411125- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	0	(48.701.126.409)	(48.701.126.409)
411126- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	0	(1.095.985.878.486)	(1.095.985.878.486)
411127- Pendapatan PPh Pasal 26	0	(14.591.335.946)	(14.591.335.946)
411128- Pendapatan PPh Final	0	(485.355.214.257)	(485.355.214.257)
411129- Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	0	(493.369.748)	(493.369.748)
4111300- Pajak Sarang Burung Walet - LRA	0	(276.521.267)	(276.521.267)
4111400- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	0	(14.726.535.184)	(14.726.535.184)
4111500- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	0	(61.891.418.962)	(61.891.418.962)
4111600- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	0	(164.031.243.028)	(164.031.243.028)
411211- Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	(3.866.038.387.282)	(3.866.038.387.282)
411212- Pendapatan PPN Impor	0	(1.002.940.781)	(1.002.940.781)
411219- Pendapatan PPN Lainnya	0	(4.101.458.820)	(4.101.458.820)
411221- Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	0	(7.489.350.436)	(7.489.350.436)
411222- Pendapatan PPnBM Impor	0	(1.069.800)	(1.069.800)
411229- Pendapatan PPnBM Lainnya	0	(1.146.436)	(1.146.436)
411313- Pendapatan PBB Perkebunan	0	(94.848.897.615)	(94.848.897.615)
411314- Pendapatan PBB Perhutanan	0	(43.105.506.765)	(43.105.506.765)
411315- Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	0	(19.566.029.164)	(19.566.029.164)
411316- Pendapatan PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	0	(10.878.840.565)	(10.878.840.565)
411511- Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	0	(13.782.000)	(13.782.000)
411514- Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	(1.063.340.000)	(1.063.340.000)
411611- Pendapatan Bea Meterai	0	(2.776.113.000)	(2.776.113.000)
411612- Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	0	(67.571.399.098)	(67.571.399.098)
411613- Pendapatan PPn Batubara	0	(192.627.528)	(192.627.528)
411619- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	(22.047.587)	(22.047.587)
411621- Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	(807.992.428)	(807.992.428)
411622- Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	(580.994.575)	(580.994.575)

4120100- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	0	(41.776.353.800)	(41.776.353.800)
4120700- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	0	(36.196.982.073)	(36.196.982.073)
412111- Pendapatan Bea Masuk	0	(20.488.579.000)	(20.488.579.000)
412113- Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	(774.887.000)	(774.887.000)
412114- Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)	0	(1.183.263.351)	(1.183.263.351)
412123- Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	(84.000)	(84.000)
412211- Pendapatan Bea Keluar	0	(162.744.195.000)	(162.744.195.000)
4122600- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	0	(15.658.161.596)	(15.658.161.596)
4130100- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	0	(209.497.429)	(209.497.429)
4130200- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN - LRA	0	(138.549.538.829)	(138.549.538.829)
4140100- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	0	(5.426.372.327)	(5.426.372.327)
4140200- Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	0	(3.772.145.135)	(3.772.145.135)
4140300- Penerimaan Jasa Giro - LRA	0	(29.545.831.732)	(29.545.831.732)
4140400- Pendapatan Bunga - LRA	0	(31.605.785.903)	(31.605.785.903)
4140500- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	0	(29.176.410.389)	(29.176.410.389)
4140600- Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA	0	(1.172.490.506)	(1.172.490.506)
4140700- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0	(1.135.167.118)	(1.135.167.118)
4140800- Pendapatan Denda Pajak - LRA	0	(8.507.907.456)	(8.507.907.456)
4140900- Pendapatan Denda Retribusi - LRA	0	(245.731.092)	(245.731.092)
4141100- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	0	(16.822.970.279)	(16.822.970.279)
4141300- Pendapatan dari Pengembalian	0	(33.102.320.338)	(33.102.320.338)
4141800- Pendapatan BLUD - LRA	0	(538.940.715.090)	(538.940.715.090)
4210100- Bagi Hasil Pajak - LRA	0	-931705383621,9187	-931705383621,9187
4210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	0	-1548834473469,541	-1548834473469,541
4210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	0	-7055554698540,121	-7055554698540,121
4210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	0	-2530465122237,4214	-2530465122237,4214
4220400- Dana Insentif Daerah	0	(105.888.925.000)	(105.888.925.000)
4220500- Dana Desa	0	(957.019.972.116)	(957.019.972.116)
424111- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	(151.613.173.897)	(151.613.173.897)
424112- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	(322.413.320.598)	(322.413.320.598)
424119- Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	(3.330.768.087)	(3.330.768.087)
424222- Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
424311- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	(43.000.000)	(43.000.000)
424312- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	(5.484.038.839)	(5.484.038.839)
424422- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	(3.253.874.000)	(3.253.874.000)
424911- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	(3.950.270.390)	(3.950.270.390)
424915- Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(766.546.342)	(766.546.342)
424919- Pendapatan Lain-lain BLU	0	(103.677.228)	(103.677.228)
424921- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	(156.877.000)	(156.877.000)
424922- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	(369.955.847)	(369.955.847)
424923- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	(543.439.091)	(543.439.091)
424924- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	(4.030.000)	(4.030.000)
425112- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	(2.591.236.600)	(2.591.236.600)
425119- Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	(14.589.400)	(14.589.400)
425122- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	(1.472.169.648)	(1.472.169.648)
425129- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	(763.402.237)	(763.402.237)
425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(2.932.076.142)	(2.932.076.142)
425132- Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	(5.180.000)	(5.180.000)
425139- Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0	(725.420)	(725.420)
425151- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	(693.603.047)	(693.603.047)
425211- Pendapatan Paspor	0	(19.336.150.000)	(19.336.150.000)

425213- Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	(1.062.950.000)	(1.062.950.000)
425214- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	(916.300.000)	(916.300.000)
425219- Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	(76.761.539)	(76.761.539)
425231- Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	(3.150.000)	(3.150.000)
425232- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	(15.780.000)	(15.780.000)
425233- Pendapatan Ongkos Perkara	0	(286.634.000)	(286.634.000)
425236- Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	0	(7.366.161.599)	(7.366.161.599)
425237- Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	0	(3.024.254.000)	(3.024.254.000)
425238- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	0	(11.190.618.011)	(11.190.618.011)
425239- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	(615.732.962)	(615.732.962)
425241- Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(888.331.000)	(888.331.000)
425243- Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(6.143.504.084)	(6.143.504.084)
425246- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	0	(650.000.000)	(650.000.000)
425249- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(318.111.000)	(318.111.000)
425252- Pendapatan Perizinan Pertanian	0	(750.000)	(750.000)
425255- Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(100.000)	(100.000)
425259- Pendapatan Perizinan Lainnya	0	(571.064.016)	(571.064.016)
425261- Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(5.791.755.000)	(5.791.755.000)
425262- Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(5.366.450.000)	(5.366.450.000)
425263- Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	0	(32.095.100.000)	(32.095.100.000)
425264- Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)	0	(1.095.620.000)	(1.095.620.000)
425265- Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	0	(35.525.700.000)	(35.525.700.000)
425266- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	0	(17.494.100.000)	(17.494.100.000)
425267- Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	0	(412.050.000)	(412.050.000)
425268- Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	0	(1.204.050.000)	(1.204.050.000)
425269- Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	0	(2.935.000.000)	(2.935.000.000)
425273- Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	0	(3.216.880.000)	(3.216.880.000)
425274- Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	0	(3.484.750.000)	(3.484.750.000)
425275- Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	0	(267.915.000)	(267.915.000)
425276- Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu	0	(6.250.022.870)	(6.250.022.870)
425289- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	(113.157.605)	(113.157.605)
425311- Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	0	(2.574.554.560)	(2.574.554.560)
425313- Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	(19.575.000)	(19.575.000)
425314- Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	0	(1.224.020.000)	(1.224.020.000)
425315- Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	0	(88.075.000)	(88.075.000)
425321- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	0	(765.905.000)	(765.905.000)
425331- Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	0	(3.055.240.822)	(3.055.240.822)
425332- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	(20.000)	(20.000)
425341- Pendapatan Pelayanan Pertanahan	0	(28.404.933.865)	(28.404.933.865)
425351- Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	0	(10.090.200.000)	(10.090.200.000)
425359- Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	0	(818.025.000)	(818.025.000)
425411- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	(542.975.000)	(542.975.000)
425412- Pendapatan Biaya Pendidikan	0	(17.393.063.579)	(17.393.063.579)
425419- Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	(250.500.000)	(250.500.000)
425429- Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	(1.652.000)	(1.652.000)
425432- Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	(9.231.373.000)	(9.231.373.000)
425433- Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi	0	(34.850.000)	(34.850.000)

dan Geofisika			
425434- Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	0	(360.000)	(360.000)
425435- Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	0	(422.063)	(422.063)
425511- Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	0	(58.000.000)	(58.000.000)
425513- Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	0	(29.791.854.790)	(29.791.854.790)
425514- Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	0	(8.051.146.240)	(8.051.146.240)
425515- Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	0	(3.623.163.654)	(3.623.163.654)
425516- Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	(441.346.881)	(441.346.881)
425518- Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	0	(2.143.654.105)	(2.143.654.105)
425519- Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	(788.124.834)	(788.124.834)
425531- Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	0	(99.765.000)	(99.765.000)
425611- Pendapatan Wisata Alam	0	(297.485.000)	(297.485.000)
425612- Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(97.376.840)	(97.376.840)
425619- Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	0	(238.250)	(238.250)
425691- Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	(13.188.950)	(13.188.950)
425699- Pendapatan Jasa Lainnya	0	(820.697.568)	(820.697.568)
425764- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	(52.151.930)	(52.151.930)
425781- Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	0	(24.150.000)	(24.150.000)
425782- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	(5.412.499.411)	(5.412.499.411)
425784- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	(2.098.547.412)	(2.098.547.412)
425785- Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	(8.704.504)	(8.704.504)
425791- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	(362.810.250)	(362.810.250)
425792- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0	(3.480.000)	(3.480.000)
425811- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	(8.597.852.012)	(8.597.852.012)
425839- Pendapatan Denda Lainnya	0	(4.671.455)	(4.671.455)
425911- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(867.870.885)	(867.870.885)
425912- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(2.232.732.871)	(2.232.732.871)
425913- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(16.625.950.497)	(16.625.950.497)
425917- Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(27.000.000)	(27.000.000)
425919- Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(152.951.592.919)	(152.951.592.919)
425931- Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	(7.321.800)	(7.321.800)
425991- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	(16.512.810)	(16.512.810)
425999- Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	(38.625.447)	(38.625.447)
4310100- Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA	0	(3.000.000.000)	(3.000.000.000)
4310300- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	0	(2.343.671.321)	(2.343.671.321)
4310400- Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA	0	(19.164.556.476)	(19.164.556.476)
499991- Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	0	(15.194.720.437.654)	(15.194.720.437.654)
5110100- Belanja Gaji dan Tunjangan	0	3.790.145.092.717	3.790.145.092.717
5110200- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0	2.174.544.616.361	2.174.544.616.361
5110300- Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	0	231.146.638.419	231.146.638.419
5110800- Belanja Pegawai Dana BOS	0	861.387.500	861.387.500
5110900- Belanja Pegawai Dana BLUD	0	143.296.458.102	143.296.458.102
511111- Belanja Gaji Pokok PNS	0	602.912.650.739	602.912.650.739
511119- Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	9.143.243	9.143.243
511121- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	43.073.893.490	43.073.893.490
511122- Belanja Tunj. Anak PNS	0	13.045.701.932	13.045.701.932
511123- Belanja Tunj. Struktural PNS	0	7.945.134.850	7.945.134.850
511124- Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	113.402.965.288	113.402.965.288
511125- Belanja Tunj. PPh PNS	0	8.405.085.871	8.405.085.871
511126- Belanja Tunj. Beras PNS	0	34.126.992.230	34.126.992.230
511129- Belanja Uang Makan PNS	0	108.232.074.199	108.232.074.199
511134- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	83.801.300	83.801.300

511139- Belanja Tunjangan SAR PNS	0	654.200.000	654.200.000
511151- Belanja Tunjangan Umum PNS	0	7.002.219.502	7.002.219.502
511152- Belanja Tunjangan Profesi Guru	0	232.072.543.259	232.072.543.259
511153- Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	54.438.527.575	54.438.527.575
511154- Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	0	7.763.707.000	7.763.707.000
511158- Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	2.801.595.000	2.801.595.000
511161- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	0	26.327.824.770	26.327.824.770
511169- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	0	426.240	426.240
511171- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	0	1.472.256.242	1.472.256.242
511172- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	0	461.842.794	461.842.794
511173- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	0	1.576.255.000	1.576.255.000
511174- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri	0	182.825.000	182.825.000
511175- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	0	44.673.382	44.673.382
511176- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	0	1.396.040.340	1.396.040.340
511179- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	0	4.803.124.000	4.803.124.000
511191- Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI	0	240.510.000	240.510.000
511193- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	0	673.695.000	673.695.000
511211- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	0	449.439.418.750	449.439.418.750
511219- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	0	7.388.220	7.388.220
511221- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	0	32.184.843.279	32.184.843.279
511222- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	0	10.306.057.797	10.306.057.797
511223- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	0	21.703.475.000	21.703.475.000
511225- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	0	3.675.488.999	3.675.488.999
511226- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	0	39.944.040.588	39.944.040.588
511228- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	0	244.569.999.000	244.569.999.000
511232- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI	0	310.650.000	310.650.000
511233- Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	0	1.526.050.000	1.526.050.000
511234- Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI	0	554.025.000	554.025.000
511235- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI	0	163.400.000	163.400.000
511236- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	0	643.068.000	643.068.000
511238- Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI	0	1.793.720.000	1.793.720.000
511239- Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI	0	2.712.999.375	2.712.999.375
511241- Belanja Tunjangan Medis TNI/POLRI	0	16.800.000	16.800.000
511244- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	0	8.908.848.300	8.908.848.300
511332- Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	16.577.549.200	16.577.549.200
511511- Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	823.147.004	823.147.004
511512- Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	47.129.912.970	47.129.912.970
511513- Belanja Pembulatan Gaji Pegawai Non PNS	0	1.564	1.564
511519- Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0	125.034.000	125.034.000
511521- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	0	15.812.077.255	15.812.077.255
511522- Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	0	11.997.670.000	11.997.670.000
511611- Belanja Gaji Pokok PPPK	0	23.048.972.900	23.048.972.900
511619- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	306.177	306.177
511621- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	1.581.668.810	1.581.668.810
511622- Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	456.570.062	456.570.062
511624- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	2.816.655.000	2.816.655.000
511625- Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	1.525.139.310	1.525.139.310
511628- Belanja Uang Makan PPPK	0	4.808.256.800	4.808.256.800
5120100- Belanja Bahan Pakai Habis	0	1.120.355.346.262	1.120.355.346.262
5120300- Belanja Jasa Kantor	0	1.849.707.186.059	1.849.707.186.059
5121500- Belanja Perjalanan Dinas	0	803.098.236.324	803.098.236.324
5121800- Belanja Pemeliharaan	0	302.787.860.424	302.787.860.424
5122000- Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	146.603.316.606	146.603.316.606
512211- Belanja Uang Lembur	0	13.610.301.000	13.610.301.000
512212- Belanja Uang Lembur PPPK	0	3.991.000	3.991.000
5123000- Belanja Barang dan Jasa BLUD	0	355.331.313.697	355.331.313.697
5123100- Belanja Barang dan Jasa dana BOS	0	216.881.656.624	216.881.656.624
512411- Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	377.687.566.000	377.687.566.000
512414- Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	12.065.781.496	12.065.781.496
5130100- Bunga Utang Pinjaman	0	19.021.369.427	19.021.369.427
5140100- Belanja Subsidi	0	21.898.781.201	21.898.781.201
5150100- Belanja Hibah kepada Pemerintah	0	137.832.632.997	137.832.632.997
5150200- Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya	0	320.700.000	320.700.000
5150400- Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0	15.965.067.957	15.965.067.957
5150500- Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0	356.310.468.693	356.310.468.693

5150600- Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar ***	0	41.319.155.492	41.319.155.492
5160100- Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0	7.474.499.097	7.474.499.097
5160200- Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0	7.743.995.000	7.743.995.000
521111- Belanja Keperluan Perkantoran	0	196.110.014.612	196.110.014.612
521112- Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	64.881.831.309	64.881.831.309
521113- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	3.592.591.266	3.592.591.266
521114- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1.927.849.067	1.927.849.067
521115- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	48.833.795.828	48.833.795.828
521119- Belanja Barang Operasional Lainnya	0	231.347.748.546	231.347.748.546
521131- Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	744.749.067	744.749.067
521211- Belanja Bahan	0	135.494.245.873	135.494.245.873
521213- Belanja Honor Output Kegiatan	0	301.602.868.826	301.602.868.826
521219- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	139.528.206.559	139.528.206.559
521231- Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	309.110.000	309.110.000
521233- Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	0	4.844.950.000	4.844.950.000
521241- Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	103.774.049	103.774.049
521252- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	614.811.659	614.811.659
521253- Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	19.635.900	19.635.900
521811- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	59.056.896.386	59.056.896.386
521813- Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	0	11.466.500	11.466.500
521821- Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	894.255.680	894.255.680
521822- Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	2.742.443.310	2.742.443.310
521831- Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	88.245.000	88.245.000
521832- Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	5.254.356.043	5.254.356.043
521841- Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	493.151.412	493.151.412
521ZZZZ- Belanja Modal Tanah (BAS Level 4)	0	39.870.612.876	39.870.612.876
5220100- Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0	30.739.546.111	30.739.546.111
5220400- Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0	73.901.881.308	73.901.881.308
5220900- Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0	3.544.223.076	3.544.223.076
522111- Belanja Langganan Listrik	0	40.661.745.345	40.661.745.345
522112- Belanja Langganan Telepon	0	2.350.002.802	2.350.002.802
522113- Belanja Langganan Air	0	3.510.825.786	3.510.825.786
522119- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	5.381.287.723	5.381.287.723
5221200- Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	0	2.774.809.741	2.774.809.741
522121- Belanja Jasa Pos dan Giro	0	42.508.490	42.508.490
5221300- Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0	4.706.179.747	4.706.179.747
522131- Belanja Jasa Konsultan	0	33.788.403.189	33.788.403.189
5221400- Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	0	139.368.985.835	139.368.985.835
522141- Belanja Sewa	0	55.221.970.404	55.221.970.404
522151- Belanja Jasa Profesi	0	20.787.884.122	20.787.884.122
5221600- Belanja modal Pengadaan Komputer	0	64.870.172.668	64.870.172.668
522161- Belanja Jasa kepada BLU dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	84.942.000	84.942.000
5221800- Belanja modal Pengadaan Alat Studio	0	13.688.055.983	13.688.055.983
522191- Belanja Jasa Lainnya	0	49.433.288.259	49.433.288.259
522192- Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	47.103.000	47.103.000
5222100- Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	0	331.819.138.611	331.819.138.611
5222300- Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0	69.729.344.538	69.729.344.538
5222400- Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0	217.862.700	217.862.700
5223500- Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0	617.451.853	617.451.853
522ZZZZ- Belanja Modal Peralatan dan Mesin (BAS Level 4)	0	53.107.484.295	53.107.484.295
5230100- Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	1.226.189.948.731	1.226.189.948.731
5230300- Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara	0	703.251.187	703.251.187
5230700- Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah	0	1.101.224.500	1.101.224.500
5230900- Belanja modal Pengadaan Tugu Titik	0	39.584.221.133	39.584.221.133

Kontrol/Pasti			
523111- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	60.129.559.066	60.129.559.066
523112- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	364.024.481	364.024.481
523119- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	2.360.824.973	2.360.824.973
523121- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	82.841.024.283	82.841.024.283
523123- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	3.924.302.030	3.924.302.030
523125- Belanja Barang Persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	38.745.827.100	38.745.827.100
523129- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	1.358.824.962	1.358.824.962
523131- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	87.739.696.710	87.739.696.710
523132- Belanja Pemeliharaan Irigasi	0	37.225.547.600	37.225.547.600
523133- Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	23.464.607.597	23.464.607.597
523199- Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	2.547.905.461	2.547.905.461
523ZZZZ- Belanja Modal Gedung dan Bangunan (BAS Level 4)	0	3.388.627.173	3.388.627.173
5240100- Belanja modal Pengadaan Jalan	0	1.607.389.493.421	1.607.389.493.421
5240300- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0	211.806.898.349	211.806.898.349
5241100- Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	0	15.800.280.168	15.800.280.168
524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	197.176.114.324	197.176.114.324
524112- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0	308.777.592	308.777.592
524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	32.830.858.978	32.830.858.978
524114- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	79.770.369.079	79.770.369.079
524119- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	37.720.587.433	37.720.587.433
5242000- Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	0	72.897.725.234	72.897.725.234
524211- Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	302.504.131	302.504.131
524ZZZZ- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (BAS Level 4)	0	2.335.562.090	2.335.562.090
5250300- Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0	3.032.286.553	3.032.286.553
5250400- Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0	600.152.628	600.152.628
5250600- Belanja modal Pengadaan Hewan	0	12.235.000	12.235.000
5250700- Belanja modal Pengadaan Tanaman	0	124.510.000	124.510.000
5250800- Belanja modal Pengadaan Dana BOS dan JKN	0	27.717.003.814	27.717.003.814
525111- Belanja Gaji dan Tunjangan	0	124.288.569.788	124.288.569.788
525112- Belanja Barang	0	85.650.634.367	85.650.634.367
525113- Belanja Jasa	0	81.171.505.552	81.171.505.552
525114- Belanja Pemeliharaan	0	10.834.922.555	10.834.922.555
525115- Belanja Perjalanan	0	27.286.340.630	27.286.340.630
525119- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	32.117.173.023	32.117.173.023
525121- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	31.570.117.021	31.570.117.021
525125- Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU	0	77.848.413	77.848.413
525129- Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	16.732.629.429	16.732.629.429
525153- Belanja Barang Persediaan BLU - Penanganan Pandemi COVID-19	0	136.500.000	136.500.000
525162- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	683.953.516	683.953.516
525ZZZZ- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BAS Level 4)	0	16.388.012.236	16.388.012.236
526112- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	8.621.930.980	8.621.930.980
526113- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	71.139.273.589	71.139.273.589
526114- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	427.201.623.894	427.201.623.894
526115- Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	2.333.053.450	2.333.053.450
526122- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	500.000.000	500.000.000
526123- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	1.310.000.000	1.310.000.000
526124- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	11.505.000.000	11.505.000.000

526212- Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah	0	30.600.000	30.600.000
526223- Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	0	10.466.329.987	10.466.329.987
526311- Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	24.468.841.230	24.468.841.230
526312- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0	104.127.138.000	104.127.138.000
5270100- Belanja Modal Aset Lainnya	0	1.954.008.170	1.954.008.170
5310100- Belanja Tak Terduga	0	10.306.126.851	10.306.126.851
531112- Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	33.203.771.797	33.203.771.797
531117- Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	18.500.000	18.500.000
532111- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	88.497.997.868	88.497.997.868
532121- Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	33.262.000	33.262.000
533111- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	383.498.730.269	383.498.730.269
533112- Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	3.268.649	3.268.649
533113- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	42.705.000	42.705.000
533115- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	739.344.645	739.344.645
533118- Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	0	11.607.859	11.607.859
533121- Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	30.949.537.267	30.949.537.267
534111- Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	1.640.901.985.657	1.640.901.985.657
534115- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0	1.436.170.519	1.436.170.519
534121- Belanja Modal Irigasi	0	27.052.119.943	27.052.119.943
534131- Belanja Modal Jaringan	0	314.917.097.758	314.917.097.758
534141- Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	500.107.734.847	500.107.734.847
536111- Belanja Modal Lainnya	0	13.490.251.200	13.490.251.200
536112- Belanja Modal Bahan Baku Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	234.644.968	234.644.968
536113- Belanja Modal Sewa Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	3.692.000	3.692.000
536114- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	135.250.000	135.250.000
536117- Belanja Modal Perjalanan Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	950.386.394	950.386.394
536121- Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	22.000.000	22.000.000
537112- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	46.218.650.313	46.218.650.313
537113- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	41.484.256.587	41.484.256.587
537114- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - BLU	0	7.003.493.044	7.003.493.044
537115- Belanja Modal Lainnya - BLU	0	5.746.738.380	5.746.738.380
571111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Uang	0	1.928.900.600	1.928.900.600
571112- Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial Dalam Bentuk Barang	0	1.768.205.000	1.768.205.000
574111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	22.888.800.000	22.888.800.000
6110100- Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	33.067.664.936	33.067.664.936
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	186.383.238.000	186.383.238.000
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	17.736.556.000	17.736.556.000
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	114.456.721.000	114.456.721.000
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	632.159.725.000	632.159.725.000
611213- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	0	591.473.000	591.473.000
611214- Belanja Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	0	3.263.682.000	3.263.682.000
6120100- Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	1.618.598.817	1.618.598.817
612111- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	0	505.927.443.000	505.927.443.000
612112- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%	0	2.372.965.000	2.372.965.000
612211- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	0	881.604.915.000	881.604.915.000
612212- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%	0	11.623.363.000	11.623.363.000
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap	0	9.477.810.000	9.477.810.000
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	553.336.107.000	553.336.107.000

612412- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Tetap	0	111.847.000	111.847.000
612413- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi - Iuran Produksi (Royalti)	0	1.286.816.000	1.286.816.000
612511- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	0	111.818.000	111.818.000
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	47.829.902.400	47.829.902.400
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	5.578.797.000	5.578.797.000
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	15.416.564.000	15.416.564.000
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	185.144.619.000	185.144.619.000
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	1.562.551.525	1.562.551.525
6210200- Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	0	44.539.944.321	44.539.944.321
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	5.548.034.633.000	5.548.034.633.000
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	446.780.424.000	446.780.424.000
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	32.999.997.914	32.999.997.914
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	811.723.099.455	811.723.099.455
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	477.473.143.028	477.473.143.028
621125- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pekerjaan Umum	0	355.318.284.000	355.318.284.000
6220100- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	1.812.385.276.632	1.812.385.276.632
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	1.087.394.427.695	1.087.394.427.695
643111- Insentif Fiskal	0	123.590.462.500	123.590.462.500
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	780.038.558.529	780.038.558.529
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	6.772.546.788	6.772.546.788
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	16.170.798.950	16.170.798.950
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	715.265.526.647	715.265.526.647
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	262.054.625.100	262.054.625.100
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	49.183.213.000	49.183.213.000
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	4.897.771.000	4.897.771.000
654821- Dana Pelayanan Kepariwisata	0	3.257.265.000	3.257.265.000
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	66.952.931.544	66.952.931.544
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	20.127.418.000	20.127.418.000
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	5.800.000.000	5.800.000.000
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	1.914.400.000	1.914.400.000
655311- Dana Fasilitas Penanaman Modal	0	5.966.400.000	5.966.400.000
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	6.570.250.000	6.570.250.000
655511- Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	0	3.000.000.000	3.000.000.000
662111- Belanja Dana Desa	0	1.187.457.348.579	1.187.457.348.579
7110100- Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	0	(1.265.839.759.907)	(1.265.839.759.907)
7140100- Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	0	(163.628.653.400)	(163.628.653.400)
7190100- Pembentukan SiLPA/SiKPA untuk Mapping LSKP	0	(167.390.011.314)	(167.390.011.314)
7220200- Penyertaan Modal pada BUMD	0	38.000.000.000	38.000.000.000
7230100- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	0	81.814.326.700	81.814.326.700
7230200- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	129.417.540.911	129.417.540.911
7240300- Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat	0	41.569.600.725	41.569.600.725
815111- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan	0	(26.144.239.000)	(26.144.239.000)
815113- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNPB (Swadana)	0	(5.548.907.500)	(5.548.907.500)
815114- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Tahun Anggaran yang Lalu	0	(1.043.000)	(1.043.000)
815131- Penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	(907)	0	(907)
815511- Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan	0	(353.873.165.546)	(353.873.165.546)
815513- Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang	0	(24.108.463.920)	(24.108.463.920)

Persediaan Pengguna PNB (Swadana)			
815514- Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(6.192.000)	(6.192.000)
815619- Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	0	(337.045.782.556)	(337.045.782.556)
817111- Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening	0	(63.618.277.309)	(63.618.277.309)
817717- Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	0	(1.187.457.348.579)	(1.187.457.348.579)
825111- Pengeluaran Uang Persediaan	0	26.207.702.000	26.207.702.000
825113- Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	5.548.907.500	5.548.907.500
825131- Pengeluaran penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan	907	0	907
825511- Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	0	353.877.721.546	353.877.721.546
825513- Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	24.108.463.920	24.108.463.920
825619- Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	0	23.429.828.066	23.429.828.066
827111- Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening	0	63.671.965.291	63.671.965.291
827717- Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	0	1.187.457.348.579	1.187.457.348.579
Jumlah	0	-,0021	-,0021

LAMPIRAN III
NERACA SALDO BUKU BESAR
AKRUAL ELIMINASI/KONSOLIDASI

NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	(186.383.238.000)	(186.383.238.000)
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	(17.736.556.000)	(17.736.556.000)
612211- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	0	(881.604.915.000)	(881.604.915.000)
612212- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%	0	(11.623.363.000)	(11.623.363.000)
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	(114.456.721.000)	(114.456.721.000)
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	(613.128.868.622)	(613.128.868.622)
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	0	(9.477.810.000)	(9.477.810.000)
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	(137.827.977.470)	(137.827.977.470)
612111- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	0	(505.927.443.000)	(505.927.443.000)
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	(5.548.034.633.000)	(5.548.034.633.000)
612112- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%	0	(2.372.965.000)	(2.372.965.000)
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	(780.038.558.529)	(780.038.558.529)
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	(16.170.798.950)	(16.170.798.950)
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	(640.088.790.275)	(640.088.790.275)
643111- Insentif Fiskal	0	(105.888.925.000)	(105.888.925.000)
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	(1.087.394.427.695)	(1.087.394.427.695)
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	(6.772.546.788)	(6.772.546.788)
8210100- Bagi Hasil Pajak - LO	0	931705383621,918	931705383621,918
8210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0	1548834473469,54	1548834473469,54
8210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0	7055554698540,12	7055554698540,12
8210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0	2530465122237,42	2530465122237,42
8220400- Dana Insentif Daerah (DID)	0	105.888.925.000	105.888.925.000
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	(446.780.424.000)	(446.780.424.000)
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	(32.999.997.914)	(32.999.997.914)
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	(811.723.099.455)	(811.723.099.455)
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	(216.016.544.171)	(216.016.544.171)
Jumlah	0	-,002	-,002

LAMPIRAN IV

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

ELIMINASI/KONSOLDASI

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	(186.383.238.000)	(186.383.238.000)
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	(17.736.556.000)	(17.736.556.000)
612211- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi	0	(881.604.915.000)	(881.604.915.000)
612212- Belanja Dana Bagi Hasil Gas Bumi 0.5%	0	(11.623.363.000)	(11.623.363.000)
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	(114.456.721.000)	(114.456.721.000)
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	(613.128.868.622)	(613.128.868.622)
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	0	(9.477.810.000)	(9.477.810.000)
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	(137.827.977.470)	(137.827.977.470)
612111- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	0	(505.927.443.000)	(505.927.443.000)
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	(5.548.034.633.000)	(5.548.034.633.000)
612112- Belanja Dana Bagi Hasil Minyak Bumi 0.5%	0	(2.372.965.000)	(2.372.965.000)
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	(780.038.558.529)	(780.038.558.529)
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	(16.170.798.950)	(16.170.798.950)
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	(640.088.790.275)	(640.088.790.275)
662111- Belanja Dana Desa	0	(957.019.972.116)	(957.019.972.116)
643111- Insentif Fiskal	0	(105.888.925.000)	(105.888.925.000)
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	(1.087.394.427.695)	(1.087.394.427.695)
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	(6.772.546.788)	(6.772.546.788)
4210100- Bagi Hasil Pajak - LRA	0	931705383621,918	931705383621,918
4210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	0	1548834473469,54	1548834473469,54
4210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	0	7055554698540,12	7055554698540,12
4210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	0	2530465122237,42	2530465122237,42
4220400- Dana Insentif Daerah	0	105.888.925.000	105.888.925.000
4220500- Dana Desa	0	957.019.972.116	957.019.972.116
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	(446.780.424.000)	(446.780.424.000)
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	(32.999.997.914)	(32.999.997.914)
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	(811.723.099.455)	(811.723.099.455)
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	(216.016.544.171)	(216.016.544.171)
Jumlah	0	-,002	-,002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAMBI

JALAN MAYJEN M. Y. SINGADIKANE NO. 45, JAMBI 36122; TELEPON (0741) 668802; FAKSIMILI (0741) 668801; SUREL
: KANWIL.JAMBI@GMAIL.COM; SITUS : WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/JAMBI

ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN
ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
KANTOR WILAYAH DJPB PROVINSI JAMBI
PRELIMINARY TAHUN 2023

A. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

1. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Rasio Solvabilitas Jangka Pendek $= \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}}$ $= \frac{5.500.637.549.100}{1.086.631.856.733}$ $= 506,21\%$	Rasio solvabilitas jangka pendek pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Wilayah Provinsi Jambi sebesar 506,21% yang berarti kemampuan pemerintah konsolidasian dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sebesar 5,06 terhadap total aset lancar yang dimiliki. Artinya kondisi ini sangat baik dimana setiap 1 rupiah kewajiban jangka pendek dijamin 5,06 kali aset lancar. Besarnya Aset Lancar sangat dipengaruhi oleh tingginya Kas dan setara kas yang dimiliki oleh Pemerintah Konsolidasi yaitu sebesar Rp2.482.968.094.418 atau 45,14 persen dari total Aset Lancar Konsolidasian.
2.	Rasio Solvabilitas Jangka Panjang $= \frac{\text{Total Aset}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}$ $= \frac{84.943.504.339.172}{235.091.478.270}$ $= 36.132,11\%$	Rasio solvabilitas jangka panjang pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Wilayah Provinsi Jambi sebesar 36.132,11% yang berarti kemampuan pemerintah konsolidasian dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya sebesar 361,32 terhadap total aset yang dimiliki. Artinya kondisi ini sangat baik dimana setiap 1 rupiah kewajiban jangka panjang dijamin 361 kali Total Aset. Besarnya Total Aset sangat dipengaruhi oleh tingginya nilai Aset Tetap yaitu sebesar Rp76.972.871.494.283 atau 90,62 persen dari total Aset.

2. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Kemandirian Keuangan Daerah PAD $= \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Pendapatan}}$ $= \frac{3.244.510.821.178}{17.405.499.980.210}$	Rata-rata tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Wilayah Provinsi Jambi berada pada tingkat " Kurang " dengan perolehan 18,64% yang berarti bahwa partisipasi Pendapatan Asli Daerah terhadap perolehan Total Pendapatan Daerah wilayah Provinsi Jambi masih minim. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah masih rendah,

	= 18,64%	baik partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pembentuk PAD.
2.	Solvabilitas Anggaran $= \frac{\text{Pendapatan LRA} - \text{DAK LRA}}{\text{Total Belanja} - \text{Belanja Modal}}$ $= \frac{17.405.499.980.210 - 2.530.465.122.236}{18.711.556.936.495 - 4.059.981.189.729}$ $= 102\%$	Rata-rata rasio Solvabilitas Anggaran berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jambi adalah 102% , artinya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan untuk menutupi belanja pemerintah selama periode Tahun 2023 dianggap berhasil , hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan pemerintah daerah selain dari transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat mampu menutupi belanja daerah selain belanja modal.
3.	Solvabilitas Layanan $= \frac{\text{Total Aset}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ $= \frac{38.126.656.139.617}{3.631.136}$ $= 10.499.925$	Rata-rata Rasio Solvabilitas Layanan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wilayah Provinsi Jambi adalah sebesar Rp10.499.925 per individu. Artinya adalah bahwa pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi mampu menyediakan kualitas pelayanan untuk publik yang dapat diukur melalui pemanfaatan aset yang dimiliki yaitu senilai Rp10.499.925 per individu.
4.	Solvabilitas Operasional $= \frac{\text{Total Pendapatan LO} - \text{DAK LO}}{\text{Beban Operasional LO}}$ $= \frac{16.448.480.008.094 - 2.530.465.122.236}{12.102.253.147.659}$ $= 1,15$	Rata-rata Rasio Solvabilitas Operasional Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wilayah Provinsi Jambi sebesar 1.15 yang berarti bahwa pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jambi masih belum mampu menghasilkan pendapatan untuk menutupi seluruh beban operasional, Pemerintah Daerah membutuhkan DAK untuk menutupi sebagian Beban Operasional.
5.	Fleksibilitas Keuangan $= \frac{\text{Tot. Pend LO} - \text{DAK LO} - \text{Pbyr Utang} - \text{Beban Op LO}}{\text{Pembayaran Utang} + \text{Beban Op LO}}$ $= \frac{16.448.480.008.094 - 2.530.465.122.236 - 211.231.867.611 - 12.102.253.147.659}{211.231.867.611 + 12.102.253.147.659}$ $= 0,13$	Rata-rata rasio Fleksibilitas Keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Jambi sebesar 0,13 . Artinya bahwa kemampuan fleksibilitas pemerintah dalam menghadapi kondisi peningkatan pendapatan maupun utang masih dianggap rendah .

B. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

1. Analisis Keseimbangan Fiskal

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Keseimbangan Operasi Neto	Keseimbangan Operasi Neto berdasarkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah <i>Preliminary</i> Tahun 2023 adalah bernilai positif pada setiap tingkatan pemerintahan di Provinsi Jambi baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Ini menandakan bahwa pendapatan yang diperoleh mampu menyeimbangkan beban-beban pengeluaran selama triwulan berjalan.
2.	Keseimbangan Operasi Bruto	Keseimbangan Operasi Bruto berdasarkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah <i>Preliminary</i> Tahun 2023 adalah bernilai positif sebesar Rp14.271.078.068.529 pada tingkatan pemerintahan umum di Provinsi Jambi. Ini menandakan bahwa pendapatan yang diperoleh mampu menyeimbangkan beban-beban pengeluaran di luar Beban depresiasi Aset Tetap selama Tahun 2023.
3.	Pinjaman Neto	Pinjaman Neto berdasarkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah <i>Preliminary</i> Tahun 2023 adalah bernilai positif sebesar Rp 7.085.827.771.183 yang diperoleh dari total Pinjaman Neto dari setiap tingkatan pemerintahan di Provinsi Jambi baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Ini artinya bahwa pemerintahan di Provinsi Jambi mampu menghasilkan surplus keuangan yang kemudian dapat dimanfaatkan/dialurkan pendapatan dari sektor ekonomi lain.
4.	Keseimbangan Operasi Primer	Keseimbangan Operasi Primer berdasarkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah <i>Preliminary</i> Tahun 2023 adalah bernilai positif atau sebesar Rp14.277.887.730.246 yang diperoleh dari total selisih Pendapatan dan Beban yang telah dikurangi beban bunga dari setiap tingkatan pemerintahan di Provinsi Jambi baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya adalah bahwa pemerintahan di Provinsi Jambi mampu menghasilkan surplus atas transaksi operasional di luar beban bunga.
5.	Keseimbangan Primer	Keseimbangan Primer berdasarkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah <i>Preliminary</i> Tahun 2023 adalah bernilai positif atau sebesar Rp7.092.637.432.900 yang diperoleh dari total selisih Pendapatan dan Beban yang telah dikurangi beban bunga dari setiap tingkatan pemerintahan di Provinsi Jambi baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Artinya adalah bahwa pemerintahan di Provinsi Jambi mampu memenuhi kewajiban beban

		bunga tanpa perlu melakukan penambahan kewajiban baru.
--	--	---

2. Analisis Fiskal Makroekonomi Lainnya

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Pajak Langsung (<i>Direct Taxes</i>)	Pajak Langsung yang diperoleh oleh Pemerintah di wilayah Provinsi Jambi untuk seluruh tingkatan pemerintahan adalah sebesar Rp 2.139.576.152.211 atau 5,98% dari total pendapatan pemerintahan umum sebesar Rp35.800.032.107.652. Artinya kontribusi pajak langsung terhadap perolehan pendapatan pemerintah di wilayah Provinsi Jambi masih sangat rendah .
2.	Pajak Tidak Langsung (<i>Indirect Taxes</i>)	Pajak Tidak Langsung yang diperoleh oleh Pemerintah di wilayah Provinsi Jambi untuk seluruh tingkatan pemerintahan adalah sebesar Rp7.083.948.672.405 atau 19,79% dari total pendapatan pemerintahan umum sebesar Rp35.800.032.107.652. Artinya kontribusi pajak tidak langsung terhadap perolehan pendapatan pemerintah di wilayah Provinsi Jambi cukup baik
3.	Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>)	Pajak modal yang diperoleh oleh Pemerintah di wilayah Provinsi Jambi untuk seluruh tingkatan pemerintahan adalah sebesar Rp 164.031.243.028 atau 0,46% dari total pendapatan pemerintahan umum sebesar Rp35.800.032.107.652. Artinya kontribusi pajak modal terhadap perolehan pendapatan pemerintah di wilayah Provinsi Jambi masih sangat rendah .
4.	Belanja Konsumsi Final Pemerintah (<i>Government Final Consumption Expenditure</i>)	Belanja Konsumsi Final Pemerintah di wilayah Provinsi Jambi selama Tahun 2023 adalah sebesar Rp 15.906.355.587.466.
5.	Tabungan Bruto (<i>Gross Saving</i>)	Tabungan Bruto yang dimiliki oleh Pemerintah di wilayah Provinsi Jambi per Tahun 2023 adalah sebesar Rp 14.629.657.707.414.

3. Analisis Indikator Pembiayaan

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Total Pembiayaan (<i>Total Financing</i>)	Total Pembiayaan yang dapat digunakan oleh pemerintahan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tahun 2023 adalah bernilai positif atau sebesar Rp7.085.827.771.183 yang diperoleh atas selisih transaksi Aset Keuangan dikurangi transaksi Kewajiban.
2.	Pembiayaan dalam negeri (<i>Domestic Financing</i>)	Pembiayaan dalam negeri berdasarkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah <i>Preliminary</i> Tahun 2023 adalah bernilai negatif sebesar Rp7.085.827.771.183 yang diperoleh atas selisih transaksi aset keuangan dengan unit institusi residen dikurangi transaksi kewajiban dengan unit institusi residen.

3.	Pembiayaan Luar Negeri (<i>Foreign Financing</i>)	Tidak terdapat Pembiayaan Luar Negeri pada Laporan Statistik Keuangan Pemerintah di wilayah Provinsi Jambi <i>Preliminary</i> Tahun 2023
4.	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri (<i>Domestic bank Financing</i>)	Tidak terdapat Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri pada Laporan Statistik Keuangan Pemerintah di wilayah Provinsi Jambi <i>Preliminary</i> Tahun 2023
5.	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri (<i>Domestic Non-Bank Financing</i>)	Tidak terdapat Pembiayaan Non Perbankan Dalam negeri pada Laporan Statistik Keuangan Pemerintah di wilayah Provinsi Jambi <i>Preliminary</i> Tahun 2023

4. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>)	Total Utang Bruto yang dimiliki oleh pemerintah daerah konsolidasi Provinsi Jambi berdasarkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah <i>Preliminary</i> Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.321.723.335.002.
2.	Utang Neto (<i>Net Debt</i>)	Total Utang Neto yang dimiliki oleh pemerintahan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah <i>Preliminary</i> Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.321.723.335.002.

C. Lampiran

1. Perhitungan Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

- Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

No.	Wilayah	Rasio	
		Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	Rasio Solvabilitas Jangka Panjang
1.	Provinsi Jambi	506,21%	36.132%

- Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Wilayah	Rasio				
		Kemandirian Keuangan Daerah	Solvabilitas Anggaran	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Operasional	Fleksibilitas Keuangan
1.	PEMPROV JAMBI	44,14%	95%	2.528.851	1,26	0,26
2.	KAB. BATANGHARI	9,97%	117%	7.370.547	1,28	0,17
3.	KAB. TANJABBAR	8,31%	122%	14.335.433	1,38	0,38
4.	KAB. BUNGO	12,44%	94%	4.729.290	1,00	0,00
5.	KAB. SAROLANGUN	5,93%	91%	7.113.855	0,95	(0,05)
6.	KAB. KERINCI	4,57%	98%	6.165.267	1,10	0,10
7.	KAB. MERANGIN	6,75%	105%	6.924.513	1,18	0,10
8.	KAB. TANJABTIM	11,22%	89%	8.817.104	0,92	(0,08)
9.	KAB. TEBO	4,61%	97%	7.992.404	1,04	0,04
10.	KAB. MUARO JAMBI	5,08%	119%	6.563.644	1,34	0,34

11.	KOTA JAMBI	28,41%	107%	7.638.361	1,05	(0,01)
12.	KOTA SUNGAI PENUH	9,15%	106%	18.081.814	1,10	0,10

2. Perhitungan Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

- Analisis Keseimbangan Fiskal

No.	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Keseimbangan Operasi Neto	Keseimbangan Operasi Bruto	Pinjaman Neto	Keseimbangan Operasi Primer	Keseimbangan Primer
1.	Pemerintah Pusat	11.526.352.352.547	11.526.352.352.547	8.391.884.727.468	11.526.352.352.547	11.526.352.352.547
2.	Pemerintah Provinsi	372.170.141.114	372.170.141.114	(656.944.957.719)	372.170.141.114	372.170.141.114
3.	Pemerintah Kab/Kota	2.372.555.574.868	2.372.555.574.868	(649.111.998.566)	2.379.365.236.585	2.379.365.236.585
4.	Pemerintah Umum	14.271.078.068.529	14.271.078.068.529	7.085.827.771.183	14.277.887.730.246	14.277.887.730.246

- Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

No.	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Pajak Langsung	Pajak Tidak Langsung	Pajak Modal	Belanja Konsumsi Final Pemerintah	Tabungan Bruto
1.	Pemerintah Pusat	2.414.011.728.453	4.997.204.894.309	-	5.021.587.027.429	12.048.963.234.460
2.	Pemerintah Provinsi	-	1.671.507.927.248	-	2.609.480.288.126	372.170.141.114
3.	Pemerintah Kab/Kota	225.922.661.990	415.235.850.848	164.031.243.028	8.275.288.271.911	2.208.524.331.840
4.	Pemerintah Umum	2.139.576.152.211	7.083.948.672.405	164.031.243.028	15.906.355.587.466	14.629.657.707.414

- Analisis Indikator Pembiayaan

No.	Pemerintah Prov/Kab/Kota	Total Pembiayaan	Pembiayaan Dalam Negeri	Pembiayaan Luar Negeri	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri
1.	Pemerintah Pusat	8.391.884.727.468	8.391.884.727.468	-	-	-
2.	Pemerintah Provinsi	(656.944.957.719)	(656.944.957.719)	-	-	-
3.	Pemerintah Kab/Kota	(649.111.998.566)	(649.111.998.566)	-	-	-
4.	Pemerintah Umum	7.085.827.771.183	7.085.827.771.183	-	-	-

- Analisis Indikator Kekayaan dan Utang

No.	Pemerintah Prov/Kab/Kota	Utang Bruto	Utang Neto
1.	Pemerintah Pusat	371.444.605.848	371.444.605.848
2.	Pemerintah Provinsi	484.743.302.036	484.743.302.036
3.	Pemerintah Kab/Kota	465.535.427.118	465.535.427.118
4.	Pemerintah Umum	1.321.723.335.002	1.321.723.335.002

Dibuat di Jambi
pada tanggal 25 Februari 2024
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Jambi



Ditandatangani secara elektronik

Burhani AS





Kanwil DJPb Provinsi Jambi